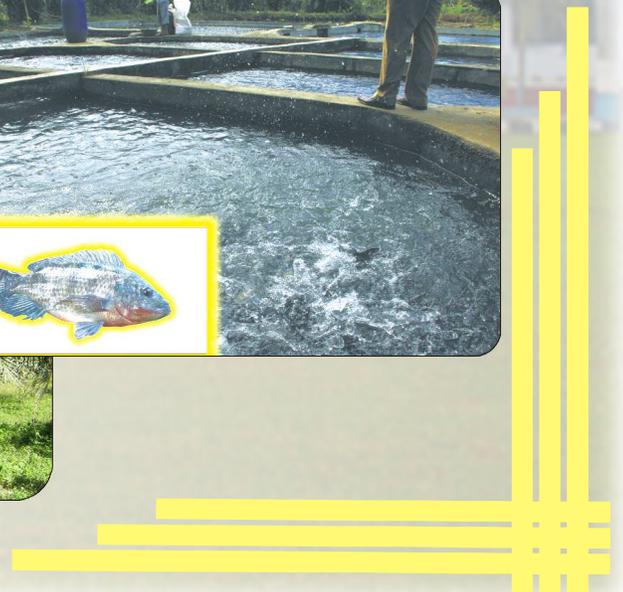
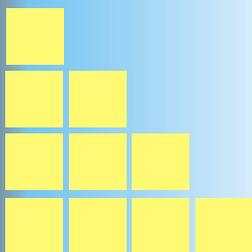
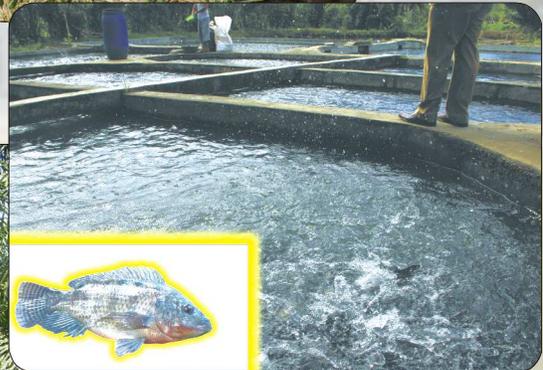




RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TAHUN 2010 - 2015





PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR 09 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD)

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TAHUN 2010-2015



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 09 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2010-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 150 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lima Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Lima Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010-2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010-2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
27. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, No. 0199/MPPN/04/2010, No. PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
28. Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RTRW dan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota;

29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bengkulu;
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu 2005-2025.

Dengan Persetujuan Bersama

BUPATI BENGKULU SELATAN

dan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2010 - 2015**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (3) Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
- (4) Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (6) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2010-2015.
- (7) Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (8) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- (9) Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- (10) Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
- (11) Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

- (12) Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN RPJMD
Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi untuk jangka waktu lima tahun dan satu tahun transisi ke depan, serta berfungsi sebagai:
- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis SKPD;
 - b. Bahan penyusunan dan perbaikan Renstra SKPD dalam mencapai sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - c. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II
SISTEMATIKA DAN MATERI
Pasal 3

- (1) Untuk dapat memperoleh hubungan yang menyeluruh dan terpadu sebagaimana ditetapkan dalam aturan yang berlaku, maka sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan disusun sebagai berikut :

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Gambaran umum
BAB III	: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB IV	: Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
BAB V	: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB VI	: Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
BAB VII	: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
BAB VIII	: Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bengkulu Selatan
BAB IX	: Indikator Kinerja Daerah
BAB X	: Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

- (2) Materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010-2015 secara rinci terdapat pada lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 4

- (1) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2010-2015 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Rincian dari Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PERUBAHAN
Pasal 7

- (1) RPJMD dapat diubah dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan dalam RPJMD belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. merugikan kepentingan nasional dan daerah.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan ini, materi yang belum tertampung dan tidak bertentangan dengan RPJMD ini dapat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
Pada Tanggal : 17 Desember 2011



Diundangkan di Manna
Pada tanggal 17 Desember 2011



LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH

**KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 09 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2010-2015**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	9
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	34
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....	43
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	48
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	69
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN	125
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	142
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	148

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen.....	5
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Bengkulu Selatan	10
Gambar 2.2	Jumlah Produksi Padi Sawah di Kabupaten Bengkulu Selatan.....	12
Gambar 2.3	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkulu Selatan	22
Gambar 2.4	Angka Kriminalitas yang tertangani	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan	9
Tabel 2.2	Luas dan Persentase Hutan menurut Fungsinya	11
Tabel 2.3	Luas Lahan Sawah Per Kecamatan	12
Tabel 2.4	Luas Tanaman Perkebunan Rakyat	13
Tabel 2.5	Potensi Bahan Galian Pertambangan di Kabupaten Bengkulu Selatan	14
Tabel 2.6	Jumlah Usaha Industri menurut Jenis Industri dan Kecamatan	15
Tabel 2.7	Produksi Perikanan Darat Per Kecamatan.....	16
Tabel 2.8	Populasi Ternak Menurut Jenis Per Kecamatan	16
Tabel 2.9	Suku di Kabupaten Bengkulu Selatan	17
Tabel 2.10	Kekayaan Budaya (Tari-Tarian dan Adat Istiadat) Di Kabupaten Bengkulu Selatan	17
Tabel 2.11	Agama di Kabupaten Bengkulu Selatan	18
Tabel 2.12	Potensi Wisata di Kabupaten Bengkulu Selatan	18
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Per Kecamatan	19
Tabel 2.14	PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2009.....	20
Tabel 2.15	PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Tahun 2005-2009.....	21
Tabel 2.16	Sumbangan Sektor Kegiatan Ekonomi terhadap PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkulu Selatan	22
Tabel 2.17	Data Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan	23
Tabel 2.18	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	24
Tabel 2.19	Rasio Penduduk yang Bekerja	24
Tabel 2.20	Persentase Balita Gizi Buruk	24
Tabel 2.21	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga	24
Tabel 2.22	Data Fokus Pendidikan	25
Tabel 2.23	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	26
Tabel 2.24	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Pelayanan	26
Tabel 2.25	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	27
Tabel 2.26	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+).....	27
Tabel 2.27	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular Lainnya.....	27
Tabel 2.28	Cakupan Kunjungan Bayi	28
Tabel 2.29	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	28
Tabel 2.30	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Berkompetensi Kebidanan	28
Tabel 2.31	Matrik Indikator Kunci Utama	30
Tabel 3.1	Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007-2010	36
Tabel 3.2	Neraca Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	37
Tabel 3.3	Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007-2010	39
Tabel 3.4	Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007-2010	40

Tabel 3.5	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2015	41
Tabel 3.6	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2015	42
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan	59
Tabel 7.1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah	81
Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan	126
Tabel 9.1	Indikator Kinerja Daerah	144

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah Propinsi. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Penyusunan RPJMD merupakan sebuah amanah sebagaimana tertuang dalam pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Berdasarkan pasal 5 ayat 2 UU No 25 Tahun 2004, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Dalam penyusunannya, RPJMD disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan 2010-2015 ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dilantik oleh Gubernur Bengkulu pada tanggal 16 September 2010, berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada tanggal 14 Juli 2010. Dengan demikian, RPJMD ini merupakan dokumen strategis dan langkah awal untuk merealisasikan janji-janji yang telah disampaikan kepada publik sebelum pemilihan oleh pasangan terpilih. Melalui RPJMD, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan akan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan terintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan yang lain, mulai dari tingkat pusat dan provinsi. Hal ini perlu dilakukan agar tercipta koordinasi dan sinkronisasi berbagai program, sehingga saling mendukung, dan menghindari terjadinya tumpang tindih. Pada akhirnya, berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai sebuah dokumen perencanaan memiliki nilai strategis dan penting, diantaranya :

1. RPJMD merupakan dokumen yang menjadi pedoman pembangunan di daerah selama 5 (lima) tahun, sebagai implementasi dari janji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye PILKADA.
2. RPJMD merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD).
3. RPJMD merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah,

mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta indikator capaian kinerja yang ditetapkan.

4. RPJMD menjadi alat atau instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan baik jangka menengah maupun tahunan sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsi masing-masing.
5. RPJMD menjadi pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, yang hasilnya identik dengan keberhasilan seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa baktinya 5 (lima) tahun.

Proses penyusunan RPJMD terdiri dari 7 (tujuh) tahap utama yaitu : *tahap pertama* : persiapan penyusunan RPJMD meliputi pembentukan tim, orientasi penyusunan agenda kerja dan pengumpulan data/informasi. *Tahap kedua* : penyusunan rancangan awal RPJMD dimana didalamnya terdapat proses *Focused Group Discussion* (FGD) dengan SKPD, pembahasan dengan DPRD dan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan para pakar dan profesional. *Tahap ketiga* : Penyebaran surat edaran Bupati kepada SKPD untuk menyampaikan rancangan renstra SKPD. *Tahap keempat* : penyusunan rancangan RPJMD berdasarkan masukan dari rancangan Renstra SKPD. *Tahap kelima* : Musrenbang RPJMD. *Tahap keenam* : penyusunan rancangan akhir RPJMD meliputi : perumusan rancangan akhir RPJMD, pembahasan rancangan akhir RPJMD dengan SKPD dan kepala daerah, penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk persetujuan kepala daerah, konsultasi rancangan akhir RPJMD ke Gubernur Bengkulu dan penyempurnaan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil konsultasi. Dan *Tahap ketujuh*: penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Dengan adanya perencanaan daerah yang baik maka akan mampu menjadikan setiap program dan kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berjalan diatas rel yang seharusnya dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Kabupaten Bengkulu Selatan. Perencanaan sendiri didasarkan pada sumber daya atau potensi yang dimiliki, kesempatan-kesempatan yang harus dimanfaatkan, berikut kemungkinan adanya hambatan-hambatan yang mungkin saja terjadi. Dengan demikian, perencanaan itu sedapat mungkin merupakan sesuatu yang terukur.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari pembangunan nasional, sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan yang dilakukan di daerah dapat berjalan dan terintegrasi dengan pembangunan nasional.

Berdasarkan pertimbangan seperti itulah, RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2010-2015 ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun propinsi. Secara lebih rinci, yang dijadikan sebagai landasan penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2010-2015 adalah sebagai berikut:

32. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
33. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

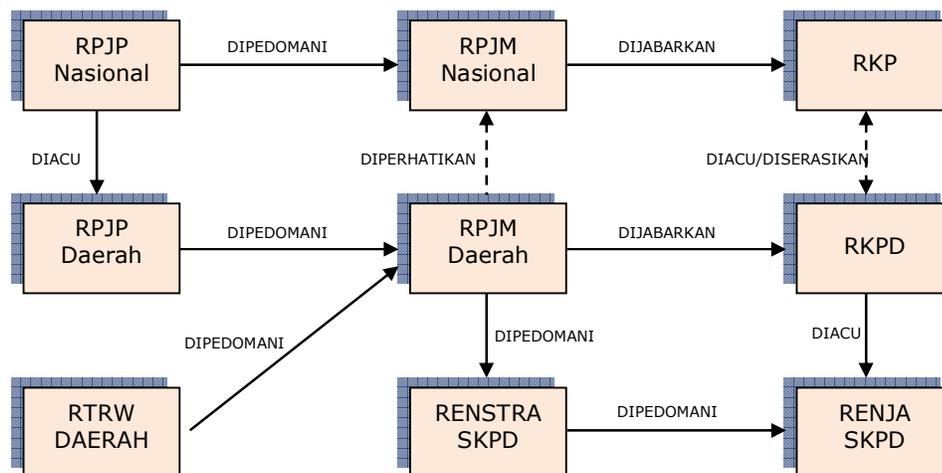
34. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
35. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
36. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
37. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
38. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
39. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
40. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
41. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

49. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
54. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
57. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, No. 0199/MPPN/04/2010, No. PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
58. Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RTRW dan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
59. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
60. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bengkulu;
61. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Bengkulu 2005-2025.
62. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025.
63. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai konsekuensi dari landasan hukum penyusunan RPJMD, maka RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2010-2015 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Adapun penjelasan keterkaitan itu adalah sebagai berikut:

1. RPJP Nasional tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional. Dokumen-dokumen tersebut berisikan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang dan menengah untuk seluruh Indonesia. Sementara itu, RPJP Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 merupakan dokumen yang berisikan perencanaan pembangunan di Propinsi Bengkulu. RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2010-2015 harus memperhatikan dokumen-dokumen itu agar terdapat sinkronisasi dan adanya koordinasi di dalam implementasinya;
2. RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2010-2015 merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan, seperti di dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan; dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Di samping untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi, pengacuan semacam itu dimaksudkan untuk memudahkan tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan 2010-2015.
3. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2010-2015 juga mengacu dan mempedomani dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik itu RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan sendiri maupun RTRW Kabupaten tetangga, dengan harapan tercipta sinkronisasi dalam pembangunan dan pengembangan yang berbasis tata ruang wilayah.



Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan RPJMD serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD.

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi Kabupaten Bengkulu Selatan serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian berhasil pembangunan daerah.

BAB III. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB IV. Analisis Isu-Isu Strategis Daerah

Penyajian isu-isu strategis daerah meliputi permasalahan-permasalahan daerah dan isu-isu strategis daerah. Permasalahan-permasalahan daerah yang disajikan adalah permasalahan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis daerah dapat berasal dari permasalahan-permasalahan daerah maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah.

BAB V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang sekaligus sebagai visi dan misi RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2010-2015 beserta penjelasannya. Bab ini juga menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran dari setiap misi.

Bab VI. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi.

BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menjabarkan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Selain itu disajikan pula penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

BAB VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini disajikan pula pencapaian target indikator

kinerja per program termasuk pagu indikatif per tahunnya dan target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

BAB X. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Bab ini menjelaskan 2 (dua) hal yaitu pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Bagian pedoman transisi menjelaskan bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada pada periode berikutnya. Bagian kaidah pelaksanaan menjelaskan bahwa seluruh *stake holder* pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya. RPJMD juga merupakan pedoman bagi setiap kepala SKPD untuk menyusun Renstra SKPD dan pedoman bagi Bappeda dalam menyusun RKPD.

1.5. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2010-2015 pada dasarnya dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan. Didalamnya juga terdapat rencana- rencana kerja dan kerangka anggaran yang bersifat proyektif dan indikatif selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, semua dokumen operasional didalam perencanaan periode 2010-2015 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari RPJM Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2010-2015 adalah :

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategipembangunan daerah, kebijakan umum,dan Pembangunan daerah 2010-2015;
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dalam menyusun rencana kerja antara 2011 sampai 2015, termasuk di dalam menentukan program-program prioritas;
3. Sebagai pedoman di dalam penyusunan KUA dan PPAS, RAPBD antara 2011 sampai 2015;
4. Sebagai tolok ukur di dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan antara 2011 sampai 2015;

5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh SKPD di lingkungan atau dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
6. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan guna memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU Darurat No. 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan sebelum pemekaran adalah seluas 5.949,14 km². Namun berdasarkan UU No. 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dimekarkan sehingga setelah pemekaran luas wilayahnya menjadi 1.185,70 km² atau 19,93 % yang merupakan wilayah daratan, sedangkan luas wilayah lautan dengan panjang garis pantai 60 km dan dengan luas pengelolaan 4 mil, maka luas keseluruhan wilayah lautan, yaitu 384 km² atau 38.400 ha. Dengan demikian Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan secara keseluruhan, yaitu 156.970 ha atau 1.569,70 km².

Kabupaten Bengkulu Selatan setelah pemekaran memiliki 11 (sebelas) kecamatan, dimana masing-masing kecamatan memiliki luas wilayah yang berbeda satu dengan yang lainnya. Adapun luas wilayah kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Manna	33,17
2	Bunga Mas	35,08
3	Kota Manna	32,16
4	Pasar Manna	5,84
5	Kedurang	234,55
6	Kedurang Ilir	58,20
7	Seginim	61,52
8	Air Nipis	203,28
9	Pino	61,88
10	Ulu Manna	236,92
11	Pino Raya	223,50

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

Ditinjau dari aspek kewilayahan (*spatial*) posisi Kabupaten Bengkulu Selatan cukup strategis, karena Kabupaten Bengkulu Selatan terletak pada jalur lintas yang menghubungkan Propinsi Bengkulu dengan Propinsi Sumatera Selatan (melalui Tanjung Sakti). Secara administratif Kabupaten Bengkulu Selatan berbatasan langsung :

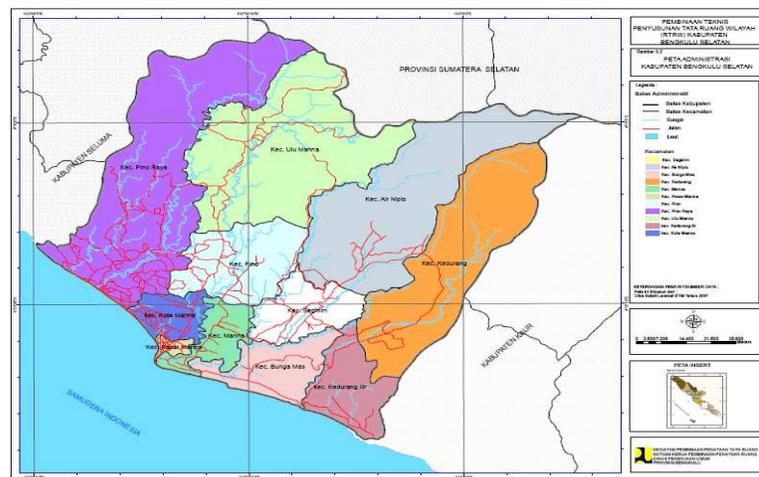
- Sebelah utara dengan Kabupaten Seluma
- Sebelah timur dengan Propinsi Sumatera Selatan
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Kaur
- Sebelah barat dengan Samudera Indonesia

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Bengkulu Selatan secara geografis terletak pada 4⁰ – 5⁰ LS dan 102⁰ – 103⁰ BT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003, Kabupaten Bengkulu Selatan dimekarkan menjadi 3 kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur.

Keadaan Topografi di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari daerah datar dan berbukit. Berdasarkan atas ketinggian dari permukaan laut, maka wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan terbagi atas: daerah yang berada pada ketinggian 0-25 m dpl seluas 6,23 %, pada ketinggian 25 - 100 m dpl seluas 44,71 %, pada ketinggian 100 - 500 m dpl seluas 34,89 %, pada ketinggian 500 – 1000 m dpl dengan luas 8,10 %, pada ketinggian > 1000 m dpl dengan luas 6,07 %.

Gambar 2.1. Peta Kabupaten Bengkulu Selatan



Sedangkan untuk tekstur tanah, berdasarkan data tahun 1995 dan 2005:

- Tekstur halus dan agak halus 69,25 % dan 67,53 %
- Tekstur sedang 15,27 % dan 15,74 %
- Tekstur agak kasar 11,69 % dan 13,95 %, dan
- Tekstur kasar 3,78 % dan 2,78 %.

Data di atas menunjukkan bahwa tanah bertekstur halus dan agak halus masih mendominasi lahan seluas 67,53 % yang selama sepuluh tahun tidak banyak perubahan. Sedangkan tekstur sedang dan kasar tetap seimbang selama 10 tahun terakhir. Kedepan dapat dijadikan lahan sebagai potensi untuk pembangunan pertanian.

Kemiringan tanah di Kabupaten Bengkulu Selatan bervariasi, yaitu: wilayah yang mempunyai kemiringan 0 – 15 derajat seluas 45,86 % dari luas Kabupaten Bengkulu Selatan, wilayah yang mempunyai kemiringan 15 - 25 Derajat seluas 39,66 % dari luas Kabupaten Bengkulu Selatan. Wilayah yang mempunyai kemiringan 25 – 40 derajat seluas 10,46 %, wilayah yang mempunyai kemiringan > 40 derajat seluas 4,02 %,

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki sungai besar dan kecil yang tersebar di kecamatan-kecamatan. Sungai tersebut antara lain: Air Manna, Air Bengkenang, Air Kedurang, Air Nelengau, Air Nipis, Air Pino, Air Manna Hijau dan Air Selali. Sungai di Kabupaten Bengkulu Selatan berfungsi sebagai sumber irigasi dan sumber air minum PDAM.

Suhu udara di suatu tempat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jarak dari pantai. Suhu rata-rata maksimum antara 30°C - 33°C dan suhu rata-rata minimum 22°C - 23°C. Sedangkan kelembaban udara rata-rata relatif antara 80-90%.

Iklim terbentuk oleh unsur-unsur cuaca, yaitu curah hujan, hari hujan, radiasi surya, penyinaran matahari, suhu udara, kelembaban relatif, dan kecepatan angin. Besarnya unsur-unsur pembentukan iklim dapat diuraikan sebagai berikut: menurut kriteria Schmid dan Ferguson dapat diklasifikasikan kedalam tipe iklim A, menurut kriteria Mohr, dapat diklasifikasikan dalam tipe iklim 1a, menurut kriteria Oldeman, dapat diklasifikasikan dalam tipe iklim B1, menurut kriteria Koppen, dapat diklasifikasikan kedalam tipe iklim Af.

Dalam pelaksanaan pembangunan, dilakukan penelaahan terhadap pemanfaatan dan pengembangan tata ruang yang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang penting dilakukan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya.

Dalam rencana pengembangan struktur ruang di Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan penataan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Salah satu yang akan dilakukan dalam rencana struktur ruang adalah penataan pusat perkantoran yang akan dipusatkan pada satu titik lokasi, dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga disusun rencana jaringan energi sebagai upaya menyelesaikan permasalahan kurangnya energi yang dialami masyarakat selama ini.

Berkenaan dengan rencana pola ruang, perlu dilakukan evaluasi terhadap peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Hal ini penting mengingat di Kabupaten Bengkulu Selatan masih terdapat kawasan yang harus ditata kembali, terutama keberadaan hutan. Berikut data mengenai luas dan persentase hutan menurut fungsinya.

Tabel 2.2
Luas dan Persentase Hutan menurut Fungsinya

No	Fungsi Hutan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase dari Luas Wilayah
A.	Kawasan Suaka Alam/ Pelestarian Alam		
	1. Taman Nasional	-	-
	2. Cagar Alam	-	-
	3. Taman Wisata Alam	5,5	0,005
	4. Taman Buru	-	-
	5. Taman Hutan Raya	-	-
B.	Kawasan Hutan		
	1. Hutan Lindung	33.079	27,9
	2. Hutan Produksi Terbatas	14.566,96	12,29
	3. Hutan Produksi Tetap	1.579	1,33
	4. Hutan Produksi Khusus Konversi	-	-
C.	Area Penggunaan Lainnya	69.339,54	58,48

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.2.1. Pertanian

Pertanian tanaman pangan merupakan komoditi penyumbang pendapatan daerah yang cukup signifikan dengan hasil produksi yang relatif meningkat setiap tahun. Hal ini merupakan potensi yang baik untuk terus dikembangkan dalam rangka menopang upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, karena Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki lahan pertanian yang cukup luas, dimana pada tahun 2009 sebagaimana data dari BPS Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat luas lahan sawah di Kabupaten Bengkulu Selatan seluas 11.026 Ha.

Luas lahan pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan tersebar di masing-masing kecamatan yang terbagi menjadi sawah tadah hujan dan sawah irigasi dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.3
Luas Lahan Sawah Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Jenis Sawah	
			Irigasi	Tadah Hujan
1	Manna	594	155	439
2	Bunga Mas	631	50	581
3	Kota Manna	285	12	273
4	Pasar Manna	139	73	66
5	Kedurang	1.396	1.396	-
6	Kedurang Ilir	830	653	177
7	Seginim	2.386	2.376	10
8	Air Nipis	1.910	1.910	-
9	Pino	1.040	435	605
10	Ulu Manna	614	373	241
11	Pino Raya	1.433	512	921

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2011

Tanaman yang menjadi komoditas utama di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah padi dengan jumlah produksi yang relatif meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2009 sebagaimana tercatat pada Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2010 oleh BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, produksi padi sawah (*wetland paddy*) sebesar 81.775 ton. Adapun trend kenaikan jumlah produksi padi sawah di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 sebagaimana terlihat dalam gambar berikut :

Gambar 2.2 Jumlah Produksi Padi Sawah di Kabupaten Bengkulu Selatan



Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

2.1.2.2. Perkebunan

Perkebunan juga menjadi salah satu sub sektor penyumbang PDRB yang cukup besar di Kabupaten Bengkulu Selatan. Perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan relatif merata dan menyebar di seluruh wilayah kabupaten, dengan jenis tanaman yang bervariasi. Tanaman perkebunan yang menjadi komoditi unggulan adalah kelapa sawit kemudian diikuti dengan komoditi lain seperti karet, kopi, coklat dan kelapa. Selain itu terdapat juga komoditas lain yang juga diusahakan oleh rakyat namun jumlahnya relatif kecil diantaranya lada, kayu manis, cengkeh, kemiri, pinang, aren, kapuk, nilam dan jahe. Usaha perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan diusahakan sendiri oleh perkebunan rakyat dan belum ada perusahaan swasta yang mengolah hasil perkebunan tersebut, sehingga hasil perkebunan selalu dibawa atau diolah di luar kabupaten. Namun, dengan perkembangan kegiatan perkebunan terutama untuk komoditi kelapa sawit, telah mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana saat ini telah dilakukan pembangunan pabrik *Crude Palm Oil* (CPO) di Kecamatan Pino Raya dan di Kecamatan Kedurang Ilir. Kedepan diharapkan dengan dibangunnya pabrik CPO tersebut, hasil panen kebun kelapa sawit milik masyarakat dapat ditampung dan diolah di Kabupaten Bengkulu Selatan sendiri, sehingga secara langsung akan mempengaruhi peningkatan daya beli masyarakat yang berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lokasi perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan tersebar di masing-masing kecamatan, dimana pada masing-masing kecamatan memiliki perkebunan yang luasnya bervariasi antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain.

Tabel 2.4
Luas Tanaman Perkebunan Rakyat

No	Kecamatan	Jenis Tanaman Perkebunan				
		Kelapa Sawit	Karet	Kopi	Coklat	Kelapa
1	Manna	1.235	116	88	69	137
2	Bunga Mas	1.407	704,5	46	76	70
3	Kota Manna	644,7	224,5	15	76	58
4	Pasar Manna	157,5	14,5	10	6	30
5	Kedurang	132,71	335	896	182	52
6	Kedurang Ilir	1.051	938,2	157,5	39	43
7	Seginim	319	122	163	74	145
8	Air Nipis	408,3	116	687	108	101
9	Pino	966,5	465,5	87	246	52
10	Ulu Manna	879,5	592,8	660	275,5	67
11	Pino Raya	4.279,5	490	245,5	285,5	120

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

2.1.2.3. Pertambangan dan Industri

Di bidang pertambangan, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi bahan galian pertambangan yang prospeknya cukup baik untuk dieksploitasi dan dimanfaatkan di masa yang akan datang, sebagai penopang sumber perekonomian daerah. Namun dari potensi yang ada tersebut, sampai saat ini baru beberapa potensi pertambangan yang dieksploitasi dan itu pun

masih termasuk kategori bahan galian yang kecil seperti batu sarak/batu tulis dan batu gamping. Kedepan diharapkan potensi-potensi yang masih terkandung di dalam perut bumi Sekundang Setungguan dapat dieksploitasi dengan baik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi Kabupaten yang maju, mandiri dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus.

Eksplorasi dan pemanfaatan bahan galian pertambangan harus mendapat perhatian yang lebih dari para pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah daerah dan investor dengan tetap mengedepankan prinsip *sustainable development* serta kepentingan masyarakat, sehingga nantinya tidak akan memunculkan permasalahan dan ketidaksesuaian dengan kehendak masyarakat.

Beberapa potensi bahan galian pertambangan yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Bengkulu Selatan Dalam Angka (BSDA) diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.5

Potensi Bahan Galian Pertambangan di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Bahan Galian	Lokasi
1.	Batu Gamping	Desa Batu Ampar, Kedurang Disekitar Air Bengkenang, Hulu Air Luwangan Pematang Gaung
2.	Batu Sarak/Batu Tulis	Desa Tanjung Tengah, Seginim Hulu Air Bengkenang Seginim
3.	Pasir Lempungan	Di Air Tebu Telur, Seginim (Desa Tj. Tengah)
4.	Posphat Guano	Gua Dekat Pertemuan Air Kedurang dan Air Cawang Alun, Hulu Air Kedurang
5.	Granit	Bukit Lekendi, Bukit Raja Mendara, Kec. Seginim, Pino, Kedurang
6.	Diorit	Sebelah Utara dan Timur, Bukit Raja Mendara
7.	Andesit	Bukit Raja Mendara (2.000 Ha)
8.	Marmer	Desa Sukarami Kec. Seginim
9.	Mineral Sulfida	Kec. Pino, Seginim dan Kedurang
10.	Batu Rijang	Hulu Air Bengkenang
11.	Mineral Ubahan	- Dijumpai di tempat-tempat penyelidikan di Kec. Pino, Seginim dan Kedurang - Air Purusan Bengkenang (Hulu Air Bengkenang)
12.	Batuan Piroklastik	Di sekitar Air Manna dekat Masat
13.	Biji Besi	Perbatasan Bengkulu Selatan – Lahat
14.	Minyak (Blok Bengkulu)	Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma, Kaur
15.	Pasir Besi	Pantai Selali, Pantai Sulau
16.	Emas	Seginim

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

Kabupaten Bengkulu Selatan selain memiliki potensi bahan galian yang masih memungkinkan untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga memiliki potensi sumber daya manusia produktif dengan potensi memunculkan produk-produk unggulan yang nantinya mampu memberikan *value added* bagi daerah. Produktivitas masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan ditampakkan dengan banyaknya usaha industri kecil dan menengah yang notabene mampu menjadi pilar penegakan dan pengembangan perekonomian daerah.

Usaha industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan cenderung menyebar dan merata di setiap kecamatan dengan jenis usaha industri yang beraneka ragam. Namun yang lebih mendominasi adalah jenis usaha kelompok industri aneka (IA) yang diantaranya bergerak dalam bidang meubeler, produksi makanan dan minuman, produksi jasa, serta produksi bahan bangunan seperti batu bata.

Jenis usaha industri di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dipaparkan dalam Bengkulu Selatan Dalam Angka (BSDA) sebagai berikut:

Tabel 2.6
Jumlah Usaha Industri menurut Jenis Industri dan Kecamatan

No	Kecamatan	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	Industri Aneka	Industri Logam, Mesin dan Elektronik
1	Manna	-	6	-
2	Bunga Mas	-	-	-
3	Kota Manna	-	10	-
4	Pasar Manna	-	4	-
5	Kedurang	-	-	-
6	Kedurang Ilir	-	-	-
7	Seginim	-	-	-
8	Air Nipis	-	1	-
9	Pino	-	1	-
10	Ulu Manna	-	-	-
11	Pino Raya	-	2	-

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

2.1.2.4. Perikanan dan Kelautan

Potensi perikanan di Kabupaten Bengkulu Selatan terbagi menjadi perikanan laut dan perikanan darat. Khusus untuk perikanan laut hanya terdapat 3 (tiga) kecamatan yang mampu memproduksi yaitu Kecamatan Pasar Manna, Kedurang Ilir dan Pino Raya. Sedangkan untuk produksi perikanan darat tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.7
Produksi Perikanan Darat Per Kecamatan

No	Kecamatan	Produksi (Ton)		
		2007	2008	2009
1	Manna	8,05	7,13	5,36
2	Bunga Mas	1,16	1,16	1,13
3	Kota Manna	7,2	7,20	4,5
4	Pasar Manna	1,03	1,03	4,8
5	Kedurang	168,58	165,32	74,2
6	Kedurang Ilir	32,11	30,22	4,5
7	Seginim	315,13	377,1	564,75
8	Air Nipis	320,04	319,01	249,82
9	Pino	22,06	23,07	7,77
10	Ulu Manna	5,14	5,14	38,73
11	Pino Raya	9,23	13,29	7,46

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

2.1.2.5. Peternakan

Peternakan merupakan salah satu faktor penyumbang peningkatan PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan meskipun bukan merupakan faktor yang utama. Peternakan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagian besar diusahakan oleh masyarakat yang tersebar di setiap kecamatan. Jenis ternak yang paling banyak adalah sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam ras pedaging dan itik. Jumlah populasi ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2009, sebagaimana data berikut:

Tabel 2.8
Populasi Ternak Menurut Jenis Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jenis Ternak					
		Sapi	Kerbau	Kambing	Ayam Buras	Ayam Ras Pedaging	Itik/Itik Manila
1	Manna	1.658	916	1.162	30.286	2.104	2.238
2	Bunga Mas	1.388	968	1.085	33.667	-	1.304
3	Kota Manna	733	416	449	13.203	22.970	704
4	Pasar Manna	343	469	354	16.117	12.246	1.061
5	Kedurang	296	658	599	2.507	6.812	818
6	Kedurang Ilir	869	1.100	1.139	4.581	-	656
7	Seginim	815	822	1.646	44.173	5.632	23.112
8	Air Nipis	441	494	974	20.513	-	10.171
9	Pino	480	692	1.173	7.347	1.580	1.238
10	Ulu Manna	120	434	607	20.908	-	1.109
11	Pino Raya	2.178	531	1.419	73.132	2.605	11.206

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

2.1.2.6. Sosial, Budaya dan Agama

Kabupaten Bengkulu Selatan kaya akan bermacam potensi yang dapat dikembangkan untuk memberikan nilai tambah bagi daerah, diantaranya keberagaman budaya dan agama. Keberagaman yang ada tersebut tidak kemudian memunculkan permasalahan, justru fenomena unik yang terjadi di kalangan masyarakat terjalin hubungan sosial yang baik dan harmonis. Hal ini tercermin dalam perilaku masyarakat saling membantu, bekerja sama dan bahu-membahu terutama pada prosesi 3 (tiga) siklus kehidupan manusia yaitu pada saat kelahiran (aqiqah), perkawinan (walimatul ursy) dan kematian (takziah). Sebagaimana diketahui bahwa di Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki berbagai macam suku seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.9

Suku di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Nama Suku	Persentase (%)
1	Serawai	76,87
2	Pasemah	13,39
3	Jawa	2,89
4	Minangkabau	2,21
5	Melayu lainnya	1,06
6	Sunda	0,95
7	Batak	0,73
8	Lainnya	1,89

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2011

Keberagaman suku yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi embrio munculnya beraneka macam kekayaan budaya dalam bentuk seni tradisi maupun adat istiadat yang apabila dikemas dan dikembangkan dengan baik akan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah. Beberapa kekayaan budaya di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2.10

Kekayaan Budaya (Tari-tarian dan Adat Istiadat)
di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Tari - Tarian	Adat Istiadat
1	Tari Sekapur Sirih	Seni Bedandang Mutus Tari
2	Tari Napa	Dundang Padi
3	Tari Rawas	Bimbang Adat
4	Tari Kain	Acara Kayiak Nari
5	Tari Piring	Berzanji
6	Tari Payung	Malam Gegerit
7	Tari Berempat	Padu Padan Kulau
8	Tari Setangan	
9	Tari Mak Inang	
10	Tari Andun	

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bengkulu Selatan, 2011

Selain suku-suku dan kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di atas, juga terdapat agama yang berbeda-beda. Namun

dengan perbedaan agama tersebut, justru memberikan energy positif bagi terciptanya kehidupan di masyarakat yang saling asah, asih dan asuh. Secara nyata dapat dikatakan bahwa kerukunan hidup beragama baik kerukunan intern umat beragama maupun kerukunan antar umat beragama terjaga dan terpelihara dengan baik, sehingga kondisi kehidupan sosial, budaya dan agama di Kabupaten Bengkulu Selatan kondusif.

Berdasarkan data yang tercatat, secara mayoritas penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan memeluk agama Islam dengan data secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.11
Agama di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Agama	Persentase (%)
1	Islam	99,43
2	Protestan	0,46
3	Katholik	0,1
4	Hindu	0,01

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2011

2.1.2.7. Pariwisata

Di bidang kepariwisataan, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi dan daya tarik wisata yang dapat dikelola dan dikembangkan sebagai salah satu potensi yang mampu memberikan *value added* bagi daerah sehingga akan dapat menjadi media promosi bagi daerah agar dikenal baik dalam lingkup lokal, nasional bahkan internasional. Tentunya apabila potensi wisata ini dikembangkan secara maksimal akan mampu menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam, yang akan memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah yang secara langsung maupun tidak langsung sektor perekonomian juga akan menggeliat dan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain:

Tabel 2.12
Potensi Wisata di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Nama Lokasi Wisata	Lokasi
1	Pantai Wisata Pasar Bawah	Kel. Pasar Bawah, Kec. Pasar Manna
2	Air Terjun Geluguran	Desa Batu Aji, Kec. Ulu Manna
3	Muara Kedurang	Desa Tanjung Aur, Kec. Bunga Mas
4	Tebat Rukis	Kel. Tanjung Mulia, Kec. Pasar Manna
5	Air Terjun Tiga Tingkat	Desa Batu Aji, Kec. Ulu Manna
6	Goa Suruman	Desa Batu Ampar, Kec. Kedurang
7	Danau Ulu Seginim	Desa Tanjung Beringin, Kec. Seginim
8	Pantai Mengkudum	Desa Pasar Pino, Kec. Pino Raya
9	Bendungan Air Nipis	Desa Plk Bengkerung, Kec. Air Nipis
10	Arung Jeram Air Manna	Kec. Ulu Manna - Pino
11	Sirkuit Balap	Pagar Dewa, Kec. Kota Manna
12	Kolam Renang Pasar Bawah	Pasar Bawah, Kec. Pasar Manna
13	Pantai Bengkenang	Desa Ketaping, Manggul, Kec. Manna
14	Tebat Gelumpai	Desa Batu Lambang, Kec. Pasar Manna

No	Nama Lokasi Wisata	Lokasi
15	Air Terjun Cawang	Desa Batu Ampar, Kec. Kedurang
16	Keramat Bujang Bandan	Kedurang
17	Telaga Rajak Besi	Kedurang
18	Tebat Besar	Desa Merambung, Kec. Pino
19	Air Terjun Padang Lakaran	Desa Pasar Pino, Kec. Pino Raya
20	Tebat Niniak	Desa Selali, Kec. Pino Raya
21	Danau Ilir	Maras, Keban Jati, Air Nipis
22	Pantai Ketaping	Desa Ketaping, Kec. Manna
23	Wisata Pancur Mas	Desa Selali, Kec. Pino Raya

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk ke dalam salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang memiliki kerawanan terhadap bencana. Untuk itu dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi risiko atas bencana yang akan terjadi dan sebagai upaya untuk menjalankan mandat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB), Kabupaten Bengkulu Selatan telah memiliki sejumlah kebijakan dan regulasi terkait penanggulangan bencana, diantaranya menetapkan strategi penyusunan mitigasi bencana dengan arah kebijakan antara lain meningkatkan kesiagaan dan pencegahan dini, melaksanakan tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana.

2.1.4. Demografi

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki keberagaman penduduk yang mana dalam kehidupan sehari-hari hidup berdampingan, bekerja sama, dan saling membantu. Jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan hasil data dari BPS dalam Bengkulu Selatan Dalam Angka tahun 2010 berjumlah 142.964 jiwa yang terdiri dari 72.786 laki-laki dan 70.178 perempuan. Laju pertumbuhan (*Growth Rate*) penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2005-2009 adalah sebesar 1,19%.

Adapun jumlah penduduk per kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13

Jumlah Penduduk Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		2007	2008	2009
1	Manna	12.417	12.677	12.938
2	Bunga Mas	5.720	5.840	5.960
3	Kota Manna	23.388	23.878	24.369
4	Pasar Manna	17.096	17.455	17.814
5	Kedurang	10.772	10.999	11.226
6	Kedurang Ilir	6.784	6.926	7.068
7	Seginim	15.223	15.543	15.862
8	Air Nipis	9.631	9.833	10.035
9	Pino	11.224	11.460	11.696
10	Ulu Manna	6.914	7.059	7.204
11	Pino Raya	18.034	18.413	18.792

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pelaksanaan pembangunan baik itu pembangunan dalam skala nasional maupun pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan salah satu indikatornya dapat dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat, karena aspek ini sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator kesejahteraan masyarakat dapat dijabarkan ke dalam fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

a. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang memberikan informasi tentang gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi regional Kabupaten Bengkulu Selatan. PDRB dapat disajikan berdasarkan atas dasar harga berlaku dan berdasarkan atas dasar harga konstan.

Penyajian PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan atas dasar harga berlaku memperlihatkan besaran dari nilai tambah bruto masing-masing sektor sesuai dengan keadaan pada tahun tertentu.

Berikut ini disajikan PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan atas dasar harga berlaku:

Tabel 2.14
PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2009 (Juta Rupiah)

NO	SEKTOR	2005		2006		2007		2008		2009	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	Pertanian	242.086	33,96	272.040	33,94	305.384	33,86	339.895	33,83	361.411	33,60
2.	Pertambangan & Penggalian	2.056	0,29	2.279	0,28	2.504	0,28	2.801	0,28	3.168	0,29
3.	Industri Pengolahan	9.616	1,35	10.763	1,34	11.987	1,33	13.703	1,36	15.245	1,42
4.	Listrik Gas dan Air Bersih	1.447	0,20	1.635	0,20	1.734	0,19	1.763	0,18	1.957	0,18
5.	Bangunan	28.705	4,03	32.223	4,02	37.526	4,16	41.733	4,15	46.972	4,37
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	172.341	24,18	194.012	24,21	219.247	24,31	245.094	24,39	264.932	24,63
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	66.849	9,38	75.888	9,47	81.242	9,01	85.189	8,48	87.896	8,17
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	33.885	4,75	36.500	4,55	40.323	4,47	44.518	4,43	49.537	4,61
9.	Jasa-Jasa	155.818	21,86	176.084	21,97	201.969	22,39	230.030	22,89	244.385	22,72
	P D R B	712.803	100	801.424	100	901.915	100	1.004.726	100	1.075.503	100

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

Penyajian PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan harga tetap suatu tahun dasar, semua barang dan jasa yang

dihasilkan, biaya antara yang digunakan ataupun nilai tambah masing-masing sektor dinilai berdasarkan harga tahun dasar. Penyajian seperti ini akan memperlihatkan perkembangan produktivitas secara riil karena pengaruh perubahan harga (inflasi/deflasi) sudah dikeluarkan. Berikut ini disajikan PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan atas dasar harga konstan:

Tabel 2.15
PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Tahun 2005-2009 (Juta Rupiah)

NO	SEKTOR	2005		2006		2007		2008		2009	
		(Rp)	%								
1.	Pertanian	145.212	33,24	154.562	33,40	164.476	33,48	166.100	32,24	171.394	31,84
2.	Pertambangan & Penggalian	1.226	0,28	1.266	0,27	1.318	0,27	1.448	0,28	1.598	0,30
3.	Industri Pengolahan	6.148	1,41	6.410	1,39	6.738	1,37	7.534	1,46	8.170	1,52
4.	Listrik Gas Dan Air Bersih	683	0,16	735	0,16	769	0,16	780	0,15	810	0,15
5.	Bangunan	20.076	4,60	21.079	4,56	22.743	4,63	23.880	4,64	26.243	4,87
6.	Perdagangan, Hotel Dan Restoran	109.891	25,15	116.835	25,25	125.477	25,54	134.091	26,03	141.682	26,32
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	37.010	8,47	38.988	8,43	40.707	8,29	42.366	8,22	43.251	8,03
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	20.681	4,73	21.244	4,59	22.287	4,54	24.550	4,77	26.697	4,96
9.	Jasa-Jasa	95.976	21,97	101.610	21,96	106.768	21,73	114.427	22,21	118.499	22,01
	P D R B	436.903	100	462.729	100	491.283	100	515.176	100	538.344	100

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

2. Laju Inflasi Kabupaten Bengkulu Selatan

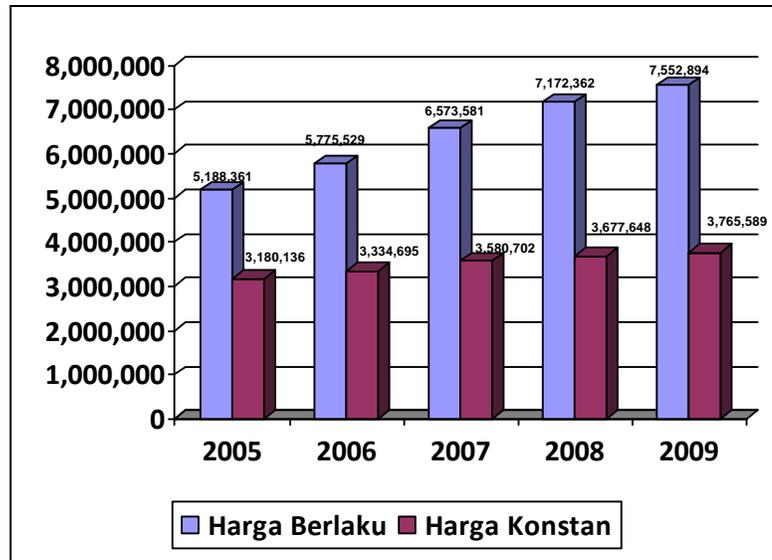
Laju inflasi pada Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2011 diperkirakan berkisar pada 4 %.

3. PRDB Per kapita Kabupaten Bengkulu Selatan

PDRB Perkapita atau yang biasa disebut pendapatan perkapita (*per capita income*) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran yang telah dicapai Kabupaten Bengkulu Selatan. PDRB Perkapita Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan kenaikan tiap tahun. Namun kenaikan tersebut belum menunjukkan kenaikan daya beli masyarakat karena kenaikan tersebut masih terpengaruh oleh adanya kenaikan harga.

PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2005 – 2009 dapat ditampilkan dalam gambar berikut ini :

Gambar 2.3
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Bengkulu Selatan



Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Selatan tentunya ditopang dari berbagai sektor kegiatan ekonomi yang masing-masing sektor memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.16
Sumbangan Sektor Kegiatan Ekonomi terhadap
PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	SEKTOR	2007		2008		2009	
		Nilai (Juta)	%	Nilai (Juta)	%	Nilai (Juta)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pertanian	305.384	33.86	339.895	33.83	361.411	33,60
2	Pertambangan dan Penggalian	2.504	0.28	2.801	0.28	3.168	0,29
3	Industri Pengolahan	11.987	1.33	13.703	1.36	15.245	1,42
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.734	0.19	1.763	0.18	1.957	0,18
5	Bangunan	37.526	4.16	41.733	4.15	46.972	4,37
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	219.247	24.31	245.094	24.39	264.932	24,63
7	Pengangkutan dan Komunikasi	81.242	9.01	85.189	8.48	87.896	8,17
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	40.323	4.47	44.518	4.43	49.537	4,61
9	Jasa - Jasa	201.969	22.39	230.030	22.89	244.385	22,72
PDRB		901.916	100	1.004.726	100	1.075.503	100

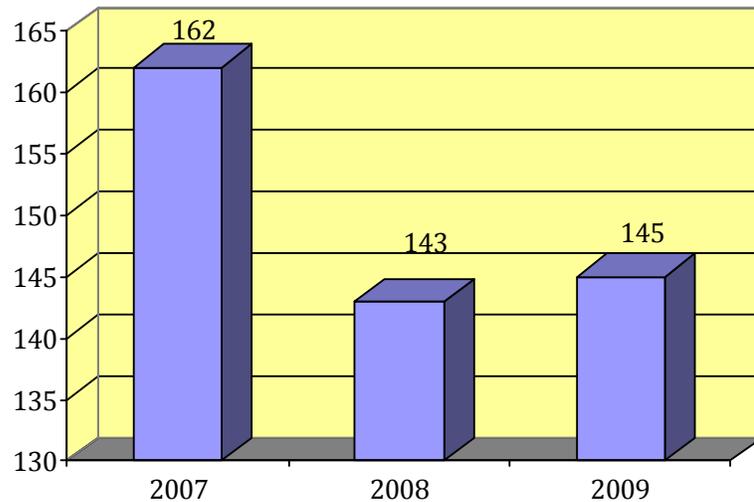
Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

4. Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas yang tertangani pada tahun 2009 yaitu sebesar 10,142 atau naik 0,92 dari Angka Kriminalitas yang tertangani pada tahun 2008 yaitu sebesar 9,22

Gambar 2.4

Angka Kriminalitas yang tertangani



Sumber : Polres Bengkulu Selatan, Tahun

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Bidang Pendidikan

Tabel 2.17

Data Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	URAIAN	5 TAHUN TERAKHIR				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Angka Melek Huruf	90,12	93,98	95,67	97,86	98,84
2	Angka Rata-rata lama Sekolah	97,20	97,59	98,01	98,44	98,73
3	Angka Partisipasi Kasar	98,55	98,68	98,89	99,02	99,11
4	Angka Pendidikan yang ditamatkan	94,51	95,40	96,24	97,27	97,97
5	Angka Partisipasi Murni	82,71	84,34	87,88	89,00	90,45
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	86,24	88,28	92,45	93,56	95,55
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	85,45	87,56	92,04	95,65	98,65
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	75,65	76,45	78,74	79,88	80,25

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Bengkulu Selatan, 2011

2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Tabel 2.18
Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
AKBH	3.617	2.887	3.180	3.160	2.343

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 2009 adalah sebesar 86,7 % dari 3114 jumlah kelahiran.

3. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Tabel 2.19
Rasio Penduduk yang Bekerja

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
Rasio Penduduk Yang Bekerja	59.250	59.651	60.523	60.751	61.219

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2010

Rasio Penduduk yang bekerja di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar 60,7 % dari jumlah penduduk usia angkatan kerja atau sebesar 70557 jiwa.

4. Persentase Balita Gizi Buruk di Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan

Tabel 2.20
Persentase Balita Gizi Buruk

NO	TAHUN	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA DENGAN GIZI BURUK	PERSENTASE	KET
1	2	3	4	5	6
1	2006	-	-	-	-
2	2007	22.039	35	0,16	-
3	2008	22.107	18	0,08	-
4	2009	18.925	27	0,14	-
5	2010	20.228	23	0,11	-

Sumber : Data Dinas Kesehatan Tahun 2010 dari Bulan Januari s/d September 2010

5. Fokus Seni Budaya Dan Olahraga (4 Jenis Data) : (Jumlah Grup Dan Gedung Kesenian, Jumlah Klub OR Dan Gedung OR).

Tabel 2.21
Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah Grup	4	4	6	6	6

Sumber : Dinas Dikpora Bengkulu Selatan, 2010

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan Umum merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Pelayanan umum lebih menentukan keberhasilan pelaksana pembangunan terutama pelayanan umum yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Untuk itu aspek pelayanan umum sudah seharusnya mendapatkan perhatian dari para pelaksana pembangunan. Indikator aspek pelayanan umum meliputi fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

1. Fokus Pendidikan

Tabel 2.22
Data Fokus Pendidikan

NO.	URAIAN	5 TAHUN TERAKHIR				
		2006	2007	2008	2009	2010
	Pendidikan Dasar					
1	Angka Partisipasi Sekolah	99,05	99,26	99,55	99,68	99,73
2	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	1:225	1:200	1:180	1:165	1:155
3	Rasio Guru/Murid	1:25	1:22	1:15	1:12	1:10
4	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata	1:44	1:35	1:30	1:26	1:22
	Pendidikan Menengah					
1	Angka Partisipasi Sekolah	98,05	98,10	98,24	98,36	98,50
2	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	1:426	1:415	1:386	1:362	1:335
3	Rasio Guru/Murid	1:20	1:18	1:16	1:14	1:12
4	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata	1:40	1:36	1:32	1:30	1:24
5	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	90,12	93,98	95,67	97,86	98,84
	Fasilitas Pendidikan					
1	Sekolah pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	650	675	725	780	819
2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	165	168	170	175	177
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.026	1.807	2.419	2.770	3.309
	Angka Putus Sekolah					
1	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	2,05	2,02	2,00	1,18	1,16
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,75	0,73	0,65	0,62	0,55
	Angka Kelulusan					
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,90	99,95	99,96	99,98	99,99
3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	85,02	87,00	89,00	92,03	94,06
4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	98,60	99,25	99,75	99,80	99,87
5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,93	99,96	99,97	99,98	99,99
6	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	76,50	79,65	80,55	83,25	85,75

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bengkulu Selatan, 2011

2. Fokus Kesehatan

1. Rasio Posyandu Persatuan Balita di Kabupaten Bengkulu Selatan

Tabel 2.23
Rasio Posyandu Per Satuan Balita

NO	TAHUN	JUMLAH POSYANDU	JUMLAH BALITA	RASIO	KET
1	2006	-	-	-	-
2	2007	182	22.039	8,3	-
3	2008	185	22.107	8,4	
4	2009	185	18.925	9,8	
5	2010	185	20.228	9,1	

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2011

- Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu persatuan penduduk di Kabupaten Bengkulu adalah sebesar 0,49.
- Rasio Rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar 0,007.
- Rasio dokter per-satuan penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar 0,3.
- Rasio tenaga medis per-satuan penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar 4,30.
- Cakupan puskesmas di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar 127,27 %.
- Cakupan pembantu puskesmas di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar 372,72%.
- Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Pelayanan

Tabel 2.24
Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Pelayanan

NO	TAHUN	JUMLAH BALITA DENGAN GIZI BURUK	JUMLAH BALITA GIZI BURUK YANG MENDAPAT PERAWATAN	PERSENTASE	KET
1	2006	-	-	-	-
2	2007	35	35	100	-
3	2008	18	18	100	-
4	2009	27	27	100	-
5	2010	23	17	74	-

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2011

9. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Tabel 2.25
Cakupan Penemuan dan Penanganan
Penderita Penyakit DBD

No	Tahun	Jumlah Kasus Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
1	2006	69
2	2007	6
3	2008	5
4	2009	9
5	2010	4
6	2011	23*

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2011
(* = Angka Sementara)

10. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)

Tabel 2.26
Cakupan Penemuan dan Penanganan
Penderita Penyakit TBC BTA (+)

No	Tahun	Jumlah Kasus Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)
1	2006	104
2	2007	133
3	2008	87
4	2009	123
5	2010	83

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2011

11. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit GHTR, Malaria dan Kusta

Tabel 2.27
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular Lainnya

No	Penyakit				Ket
	Rabies (GHTR)	Malaria	Kusta		
			PB	MB	
1	106	1.145	1	9	

Sumber : Dinas Kesehatan 2011

Keterangan : GHTR = Gigitan Hewan Tersangka Rabies

PB = Pausi Basiler

MB = Multi Basiler

12. Cakupan Kunjungan Bayi

Tabel 2.28
Cakupan Kunjungan Bayi

NO	TAHUN	SASARAN	KUNJUNGAN	PERSENTASE
1	2006	3627	2730	75,2
2	2007	3579	2722	76,1
3	2008	3590	2920	81,3
4	2009	3594	3114	86,7
5	2010	3890	2679	68,9

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2011

13. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Tabel 2.29
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

NO	TAHUN	SASARAN	20% SASARAN BULIN	YANG TERTANGANI	PERSENTASE
1	2006	-	-	-	-
2	2007	3757	751	523	69,6
3	2008	3770	754	652	86,5
4	2009	3735	747	424	56,8
5	2010	4045	809	221	26,31

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2011

14. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Berkompetensi Kebidanan

Tabel 2.30
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Berkompetensi Kebidanan

NO	TAHUN	SASARAN	PERSALINAN OLEH NAKES	PERSENTASE
1	2006	-	-	-
2	2007	3757	2817	75,0
3	2008	3770	3014	79,9
4	2009	3735	3174	85,0
5	2010	4045	2343	57,92

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2011

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

1. Fokus kemampuan ekonomi daerah

Kemampuan ekonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersentuhan langsung dengan aktivitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan ekonomi daerah antara lain; angka konsumsi RT per kapita, persentase konsumsi RT untuk non pangan, produktivitas 9 sektor PDRB, pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, bangunan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, serta jasa-jasa.

2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur merupakan pemicu pembangunan suatu wilayah serta sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan irigasi merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan jaringan air bersih serta pengelolaannya dan peningkatan layanan publik yang dikelola oleh pemerintah seperti prasarana kesehatan, pendidikan, dan sarana olah raga secara berkelanjutan sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Bengkulu Selatan dilalui oleh jalan arteri yang menghubungkan Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Kaur yang merupakan jalan lintas barat. Adapun rincian jalan berdasarkan permukaan pada tahun 2008 yaitu:

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Jalan Aspal | : 110,95 Km |
| 2. Jalan Hotmix | : 172,75 Km |
| 3. Jalan Kerikil | : 176,70 |
| 4. Jalan Tanah | : 196,50 |

Berdasarkan status antara lain :

- | | |
|----------------------------|----------|
| 1. Panjang Jalan Negara | : 91 Km |
| 2. Panjang Jalan provinsi | : 126 Km |
| 3. Panjang Jalan Kabupaten | : 911 Km |

Terkait dengan penyediaan infrastruktur tersebut permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bengkulu Selatan adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur pertanian dan pedesaan. Pembangunan infrastruktur pertanian (irigasi) merupakan prasarana penting dalam mendukung pembangunan pertanian untuk mencapai ketahanan pangan sedangkan pembangunan jaringan jalan merupakan prasarana transportasi yang penting untuk memperlancar distribusi barang antar daerah serta meningkatkan mobilitas penduduk. Dalam konteks pembangunan pertanian dan pedesaan, jaringan jalan sangat dibutuhkan untuk kelancaran arus faktor produksi maupun pemasaran hasil.

Tabel 2.31
MATRIK INDIKATOR KUNCI UTAMA

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada N-1 s/d N-5				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
A.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1	Pertumbuhan PDRB (%)	5.91	6.17	4.86	4.49	4.5
2	Laju Inflasi Kabupaten (%)	-	-	-	-	
3	PDRB per kapita (Rp)	3,334,695	3,580,702	3,677,648	3,765,589	3,824,754
4	IPM	70.08	70,44	71,03	71,57	71,61
	Pendidikan					
A.2	Kesejahteraan Sosial Pendidikan					
5	Angka Melek huruf (%)	90.12	93.98	95.67	97.86	98.84
6	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	97.2	97.59	98.01	98.44	98.73
7	Angka partisipasi murni	82.71	84.34	87.88	89.01	90.45
	SD	86.24	88.28	92.45	93.56	99.49
	SLTP	85.45	87.56	92.04	95.65	78.1
	SLTA	75.65	76.45	78.74	79.88	75.78
8	Angka partisipasi kasar	98.55	98.68	98.9	99.02	99.12
	SD					100.51
	SLTP	98.92	98.98	98.94	99.01	82.57
	SLTA	91.21	91.32	91.47	91.49	78.98
9	Angka pendidikan yang ditamatkan (tahun)	94.51	95.4	96.24	97.27	97.97
	Kesehatan					
10	Angka kelangsungan hidup bayi	3,617	2,887	3,180	3,160	2,343
11	Angka usia harapan hidup (tahun)	66	66.8	67	67.1	67.25
12	Persentase balita gizi buruk (%)	-	0.16	0.08	0.14	0.11
	Kemisikinan					
14	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	37.45	35.24	27.53	26.43	25.37
	Kesempatan Kerja					
16	Rasio Penduduk yang bekerja	59,250	59,651	60,523	60,751	61,219
17	Pengangguran terbuka (%)	11.32	11.55	11.78	12.05	12.53
	Kriminalitas					
18	Angka kriminalitas yang tertangani	-	162	143	145	
A.3	Seni Budaya dan Olahraga					
19	Jumlah Grup Kesenian	4	4	6	6	6
B	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B.1	Pelayanan Dasar					
	Pendidikan					
	Pendidikan Dasar					
20	Angka partisipasi sekolah	99.05	99.26	99.55	99.68	99.73

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada N-1 s/d N-5				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
21	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	0.19	0.18	0.16	0.15	0.14
22	Rasio Guru murid	1:25	1:22	1:15	1:12	1:10
	Pendidikan Menengah					
25	Angka partisipasi sekolah	98.05	98.1	98.24	98.36	98.5
26	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	0.33	0.32	0.30	0.29	0.27
27	Rasio Guru murid	1:20	1:18	1:16	1:14	1:12
	Kesehatan					
28	Rasio posyandu per satuan balita	-	8.3	8.4	9.8	9.1
29	Rasio puskesmas, poliklinik pusat persatuan penduduk	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
20	Rasio dokter persatuan penduduk	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
31	Rasio tenaga medis persatuan penduduk					
	- Bidan	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	- Perawat	0.00117	0.00117	0.00117	0.00117	0.00117
	Perhubungan					
32	Jumlah Pelabuhan terminal bis	1	1	1	1	1
B.2	Pelayanan Penunjang					
	Penanaman Modal					
33	Jumlah Perusahaan Penanaman Modal dalam negeri	-	-	-	-	2
	KUKM					
34	Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD)	12	12	12	13	
35	Jumlah Koperasi Non KUD	127	138	149	163	
36	Angka partisipasi angkatan kerja	-	-	-	-	71.01
	KB dan KS					
37	Jumlah Pasangan Usia Subur	25,613	27,043	27,733	28,492	
38	Jumlah Peserta KB	22,986	23,201	25,277	25,534	
	Pertanahan					
39	Persentase Luas lahan bersertifikat	40	40	40	40	40
	Pemberdayaan Masyarakat Desa					
40	Jumlah LSM	-	-	-	-	
	Perpustakaan					
41	Jumlah Perpustakaan	-	-	1	1	1
42	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	-	-	760	1542	1833
	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat					
43	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	0.005	0.0051	0.009	0.0066	0.0068
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
C.1	Kemampuan ekonomi Daerah					
44	Angka konsumsi RT per kapita	-	-	-	61.73	
45	Persentase konsumsi RT untuk non pangan	-	-	-	38.27	

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada N-1 s/d N-5				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
46	Produktifitas 9 sektor PRDB	-	-	-	4.5	
47	Pertanian (Jutaan Rp)	272,040	305,384	339,895	361,411	
48	Pertambangan dan penggalian	2,279	2,504	2,801	3,168	
49	industri pengolahan	10,763	11,978	13,703	15,245	
50	Listrik	1,635	1,734	1,763	1,957	
51	Bangunan	32,223	37,526	41,733	46,972	
52	Perdagangan	194,012	219,247	245,094	264,932	
53	Pengangkutan dan komunikasi	75,888	81,242	85,189	87,896	
54	Keuangan	36,500	40,323	44,518	49,537	
55	Jasa-jasa	176,084	201,969	230,030	244,385	
C.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur					
	Aksesibilitas Daerah					
56	Panjang Jalan	495.1	713.68	791.63	741.95	741.95
	Fasilitas Bank					
57	Jumlah Bank	12	13	14	15	15
	Fasilitas Listrik					
58	Jumlah RT yang menggunakan listrik	16,358	16,873	17,503	20,960	
	Ketersediaan Penginapan					
59	Jumlah Penginapan/Hotel	-	-	10	11	11
	Iklim Berinvestasi					
60	Angka kriminalitas	199	242	232	227	284
61	Jumlah Peristiwa Kejahatan Yang Diselesaikan	-	162	143	145	
62	Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas	-	44	41	29	
63	Sumber Daya Manusia					
64	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan	-	145	160	208	210

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kebijakan tersebut membawa angin perubahan yang cukup mendasar terutama dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Kondisi ini menuntut dilakukannya sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, akuntansi dan pemeriksaan.

Serangkaian perubahan tersebut mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan konsep *money follow function*, yaitu pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Dalam konsep ini mengandung tiga elemen yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publiknya, yaitu (1) secara ekonomis dapat meminimalisir pengeluaran atau belanja yang digunakan; (2) efisiensi untuk mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang minimal; dan (3) efektivitas untuk mencapai target yang ditetapkan.

Penganggaran terhadap kegiatan pembangunan sudah selayaknya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Hal ini menuntut pengelolaan keuangan daerah, diarahkan dan dikelola berazaskan :

1. *Fungsi otorisasi*, sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. *Fungsi Perencanaan*, menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. *Fungsi pengawasan*, menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. *Fungsi alokasi*, mengarahkan anggaran daerah untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian;
5. *Fungsi distribusi*, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. *Fungsi stabilisasi*, menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Berdasarkan sejumlah fungsi tersebut, penyusunan pendapatan dan belanja daerah tahun 2010-2015, harus merujuk kepada sejumlah norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut meliputi:

1. *Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah*: merupakan syarat utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan

- rakyat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan dan atau program;
2. *Disiplin Anggaran*: program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
 3. *Keadilan Anggaran*: pendapatan pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang objektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan;
 4. *Efisiensi dan Efektivitas Anggaran*: dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah tidak hanya melakukan *vertical reporting*, tetapi lebih penting daripada itu juga melakukan *horizontal reporting* sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat. Bentuk pertanggung jawaban publik meliputi beberapa hal mendasar, yaitu akuntabilitas regulasi daerah, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

Akuntabilitas regulasi daerah terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain dalam penggunaan sumberdaya publik. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan telah memberikan pelayanan publik yang cepat, reponsif dan murah. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan *feasible* dan *reliable*, serta apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintahan terhadap kebijakan politik yang diambil pemerintah dan lembaga legislatif.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Selama kurun waktu antara tahun 2007-2010, Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan seluruhnya berjumlah Rp. 1,472,116,505,832.44 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp. 67,079,841,152.44 atau sekitar 4,56 persen, dana perimbangan Rp. 1,345,721,440,270.00 atau sekitar 91,41 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 59,315,224,410.00 atau sekitar 4,03 persen. Dari kondisi ini terlihat dengan jelas bahwa komposisi pendapatan daerah tersebut masih menunjukkan ketergantungan daerah yang cukup besar terhadap pemerintah pusat.

Tabel 3.1.
Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2007 s/d 2010

Uraian		2007	2008	2009	2010
PENDAPATAN					
1	Pendapatan Asli Daerah	16.089.927.571,44	16.824.790.616,00	18.084.688.998,00	16.080.433.967,00
a	Pajak Daerah	1.146.649.000,00	1.534.654.000,00	1.585.322.000,00	1.713.070.000,00
b	Retribusi Daerah	11.389.638.395,00	11.340.193.360,00	11.299.841.360,00	9.425.362.760,00
c	Hasil pengelolaan keuangan yang dipisahkan	828.089.306,44	925.391.256,00	1.901.699.483,00	1.679.852.207,00
d	Lain-lain PAD yang sah	2.725.550.870,00	3.024.552.000,00	3.297.826.155,00	3.262.149.000,00
2	Dana Perimbangan	315.097.000.000,00	350.487.920.000,00	340.219.666.000,00	339.916.854.270,00
a	Dana bagi hasil pajak/bukan pajak	15.807.000.000,00	17.519.780.000,00	17.589.000.000,00	18.453.045.270,00
b	DAU	242.370.000.000,00	267.650.140.000,00	272.434.666.000,00	285.481.509.000,00
c	DAK	56.920.000.000,00	65.318.000.000,00	50.196.000.000,00	35.982.300.000,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	3.606.577.000,00	11.649.238.200,00	3.606.577.000,00	40.452.832.210,00
a	Hibah	0,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
b	Dana Darurat	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
c	Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	3.606.577.000,00	4.000.000.000,00	3.606.577.000,00	7.496.420.972,00
d	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	0,00	0,00	0,00	19.226.137.200,00
e	Dana penyesuaian dan otonomi Daerah	0,00	3.649.238.200,00	0,00	13.730.274.038,00
Jumlah Pendapatan		334.793.504.571,44	378.961.948.816,00	362.304.354.998,00	396.450.120.447,00

Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, 2011

Pertumbuhan pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2007-2010 bersifat fluktuatif, mengalami pertumbuhan yang positif namun ada juga terjadi pertumbuhan negatif. Pada tahun 2008 terjadi pertumbuhan positif dari tahun 2007. Namun pada tahun 2009 terjadi pertumbuhan negatif, dan pada tahun 2010 terjadi pertumbuhan positif meskipun tidak begitu signifikan. Pola pertumbuhan Pendapatan Daerah ini dipengaruhi oleh banyak faktor dimana salah satunya adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan belum menggali potensi dan peluang pendapatan secara optimal.

Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras agar komposisi perimbangan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan pendapatan dari pusat mencapai titik keseimbangan (*equilibrium*) di masa yang akan datang.

Pendapatan daerah tertinggi diperoleh Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2010, meskipun tidak terlalu signifikan pertumbuhannya dari tahun-tahun sebelumnya namun pertumbuhan yang positif ini mampu memberikan kontribusi yang cukup terhadap upaya pembangunan daerah. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 yang disebabkan oleh menurunnya pos-pos penyumbang pendapatan. Selain itu juga dipengaruhi oleh kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan yang pada tahun 2009 masih disibukkan dengan permasalahan pemilihan kepala daerah.

3.1.2. Neraca Daerah

Tabel 3.2
NERACA DAERAH
Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	URAIAN	2010	2009
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
1.1.1	- Kas	25,401,154,108.05	27,904,391,879.58
1.1.2	- Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
1.1.3	- Piutang	1,770,421,727.00	1,483,493,075.00
1.1.4	- Piutang Lain-lain	2,298,097,268.85	4,384,642,587.33
1.1.5	- Persediaan	2,238,961,844.00	1,318,694,541.00
	JUMLAH ASET LANCAR	31,708,634,947.90	35,091,222,082.91
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.1	- Investasi Non Permanen	808,585,991.00	808,637,327.00
1.2.2	- Investasi Permanen	17,473,781,299.00	17,473,781,299.00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	18,282,367,290.00	18,282,418,626.00
1.3	ASET TETAP		
1.3.1	- Tanah	151,843,356,183.00	151,797,759,500.00
1.3.2	- Peralatan dan Mesin	124,170,618,068.00	101,209,945,648.00
1.3.3	- Gedung dan Bangunan	319,358,043,661.00	311,910,598,000.00
1.3.4	- Jalan, Jaringan dan Instalasi	261,350,609,940.00	245,884,549,000.00
1.3.5	- Aset Tetap Lainnya	3,022,708,050.00	2,674,963,200.00
1.3.6	- Konstruksi dalam Pengerjaan	1,583,749,000.00	1,583,749,000.00
1.3.7	- Akumulasi Penyusutan	0.00	0.00
	JUMLAH ASET TETAP	861,329,084,902.00	815,061,564,348.00
1.4	DANA CADANGAN		
1.4.1	Dana Cadangan	0.00	0.00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0.00	0.00
1.5	ASET LAINNYA		
1.5.1	- Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	42,334,500.00	42,334,500.00
1.5.2	- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0.00	0.00
1.5.3	- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00
1.5.4	- Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00
1.5.5	- Aset Lain-lain	399,000,000.00	0.00
	JUMLAH ASET LAINNYA	441,334,500.00	42,334,500.00
	JUMLAH ASET	911,761,421,639.90	868,477,539,556.91
2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.1.1	- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
2.1.2	- Utang Bunga	4,851,541,094.66	5,138,841,475.11
2.1.3	- Utang Pajak	0.00	0.00
2.1.4	- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	2,877,934,815.18	2,877,934,815.18
2.1.5	- Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00
2.1.6	- Utang Jangka Pendek Lainnya	800,441,650.00	461,418,731.00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	8,529,917,559.84	8,478,195,021.29
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
2.2.1	- Utang Dalam Negeri	790,914,936.42	790,914,936.42
2.2.2	- Utang Luar Negeri	0.00	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	790,914,936.42	790,914,936.42

	JUMLAH KEWAJIBAN	9,320,832,496.26	9,269,109,957.71
3	EKUITAS DANA		
3.1	EKUITAS DANA LANCAR		
3.1.1	- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	25,401,154,108.05	27,904,391,879.58
3.1.2	- Cadangan untuk Piutang	4,068,518,995.85	5,868,135,662.33
3.1.3	- Cadangan untuk Persediaan	2,238,961,844.00	1,318,694,541.00
3.1.4	- Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(8,529,917,559.84)	(8,478,195,021.29)
3.1.5	- Pendapatan yang Ditangguhkan	0.00	0.00
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	23,178,717,388.06	26,613,027,061.62
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI		
3.2.1	- Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	18,282,367,290.00	18,282,418,626.00
3.2.2	- Diinvestasikan dalam Aset Tetap	861,329,084,902.00	815,061,564,348.00
3.2.3	- Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	441,334,500.00	42,334,500.00
3.2.4	- Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka Panjang	(790,914,936.42)	(790,914,936.42)
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	879,261,871,755.58	832,595,402,537.58
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN		
3.3.1	- Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0.00	0.00
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	0.00	0.00
	JUMLAH EKUITAS DANA	902,440,589,143.64	859,208,429,599.20
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	911,761,421,639.90	868,477,539,556.91

Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, 2011

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan keleluasan untuk melaksanakan fungsi utamanya melayani masyarakat melalui pelimpahan kewenangan yang melalui aspek politik, administratif maupun fiskal. Khusus dalam aspek keuangan, sebagaimana tertuang dalam penjelasan UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah bertindak sebagai *Chief Financial Officer* (CFO) yang dibantu lembaga berupa badan, dinas dan kantor. Kepala satuan Kerja bertindak sebagai *Chief Operation officer* (COO). Prinsip pemisahan ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya *checks and balances* serta mendorong peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Keuangan daerah merupakan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah. Keuangan Daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin dari proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Sebelum menentukan arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan kebijakan umum anggaran lima tahun yang akan datang, maka perkembangan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah perlu mendapat perhatian penuh dari pemerintah daerah agar struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah lebih mengarah pada upaya pencapaian tujuan pembangunan baik pembangunan daerah maupun pembangunan skala nasional.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Pengelolaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun system akuntansi. Seiring dengan dilakukannya penyempurnaan di bidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya keuangan publik secara transparan, sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung, dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*) melalui pendekatan kinerja (*performance oriented*). Disamping itu pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi terkait, mendasarkan pada standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip *value for money*. Identifikasi belanja pengeluaran akan dibedakan menurut belanja langsung dan tidak langsung guna meningkatkan aspek transparansi.

Selama kurun waktu 2007-2010, Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan seluruhnya berjumlah Rp. 1,612,092,427,961.26 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 891,679,568,122.25 atau sekitar 55,31% dari total belanja dan belanja langsung sebesar Rp. 720,412,859,839.01 atau sekitar 44,69%.

Tabel 3.3
Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2007 s/d 2010

No	Uraian	2007	2008	2009	2010
1	Belanja Tidak Langsung	158.146.104.555,86	199.080.400.230,65	249.179.762.679.16	285.273.300.656.58
a	Belanja Pegawai	145.871.790.400,00	169.830.216.108,00	220.392.121.815.00	239.982.406.500.58
b	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Belanja Subsidi	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
d	Belanja Hibah	800.000.000,00	15.540.185.000,00	11,027,000,000.00	33,278,940,000.00
e	Belanja Bantuan Sosial	5.579.861.000,00	6.340.000.000,00	8,655,000,000.00	8,610,166,200.00
f	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Belanja Bantuan Keuangan	3.893.850.000,00	5.132.000.000,00	5,831,200,000.00	1,688,620,000.00
h	Belanja tidak tetap/tak terduga	2.000.603.155,86	2.037.999.122,65	3,274,440,864.16	1,713,167,956.00
2	Belanja Langsung	212.036.519.260,00	223.746.487.879,01	148.048.641.030.00	136.581.211.670.00
a	Belanja Pegawai	27.909.735.900,00	24.781.612.196,00	0,00	26,162,271,200.00
b	Belanja Barang dan Jasa	59.219.840.029,00	72.007.547.464,00	69,212,330,380.00	64,282,047,450.00
c	Belanja Modal	124.906.943.331,00	126.957.328.219,01	78,836,310,650.00	46,136,893,020.00
	Jumlah Belanja	370.182.623.816,86	422.826.888.109,66	397.228.403.709,16	421,854,512,326.58

Sumber : Data yang diolah, 2011

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja APBD Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2007-2010 bersifat fluktuatif. Dimana pada tahun 2007 terdapat pertumbuhan yang negatif, namun kemudian terjadi pertumbuhan yang positif dan sangat besar

pada tahun 2008. Selanjutnya pertumbuhan yang negatif terjadi lagi pada tahun 2009 dan akhirnya meningkat lagi menjadi positif walaupun nilai pertumbuhannya cukup kecil. Pola pertumbuhan sebagian besar berasal dari belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan komponen belanja langsung yang cenderung mengalami pertumbuhan negatif setiap tahunnya selama periode 2007-2010. Dari kondisi ini menunjukkan fenomena yang menunjukkan ketimpangan dimana belanja pegawai yang tercakup dalam belanja tidak langsung mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya, namun belanja untuk pembangunan yang tertampung dalam belanja langsung justru mengalami pertumbuhan negatif setiap tahunnya. Kondisi ini harus segera dilakukan evaluasi dan perbaikan sehingga kedepannya pembangunan semakin meningkat dan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan semakin maju dan sejahtera.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dapat dikategorikan sebagai kegiatan investatif berdimensi dalam waktu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan selama kurun waktu 2007-2010 adalah sebesar Rp. 147,479,410,981.82, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 7,896,911,873.00 dan pembiayaan netto sebesar Rp. 139,582,499,108.82. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4
Pertumbuhan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2007 s/d 2010

No	Uraian	2007	2008	2009	2010
1	Penerimaan Pembiayaan				
a	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
b	Penggunaan SiLPA	38.498.119.244,42	46.161.851.166,66	34.913.048.711,16	27.867.016.838,58
c	Hasil Penjualan Kekayaan yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Penerimaan pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Penerimaan Kembali pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Penerimaan piutang Daerah	0,00	0,00	11.000.000,00	26.375.041,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	38.498.119.244,42	46.161.851.166,66	34.924.048.711,16	27.904.391.879,58
2	Pengeluaran Pembiayaan				
a	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Penyertaan Modal	3.100.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
c	Pembayaran hutang pokok	0,00	296.911.873,00	0,00	2.500.000.000,00
d	Pemberian pinjaman ke perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Pemberian pinjaman dana bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran	3.100.000.000,00	2.296.911.873,00	2.296.911.873,00	2.500.000.000,00

Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, 2011

3.3. Kerangka Pendanaan

A. Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2010-2015

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah di bidang pendapatan pada masa yang akan datang diupayakan melalui :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
2. Optimalisasi asset dan kekayaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk memberdayakan BUMD yang sudah ada secara optimal.
3. Melakukan reformasi regulasi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dalam pelaksanaan optimalisasi pendapatan mempunyai dasar legalitas yang jelas.
4. Melakukan pendataan dan sosialisasi dalam bidang pendapatan daerah sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat berperan aktif dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
5. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Pendapatan dan sarana dan prasarana pendukung di unit teknis terkait.

Berdasarkan beberapa kebijakan di atas, maka diproyeksikan pendapatan Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode 2011-2015 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2011 s/d 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
PENDAPATAN						
1	Pendapatan Asli Daerah	15,455,633,967.00	13,866,048,560.00	14,559,350,988.00	15,287,318,536.00	16,051,684,462.00
a	Pajak Daerah	1,713,070,000.00	2,005,055,000.00	2,105,307,750.00	2,210,573,137.00	2,321,101,794.00
b	Retribusi Daerah	9,425,362,760.00	7,879,993,560.00	8,273,993,238.00	8,687,692,899.00	9,122,077,544.00
c	Hasil pengelolaan keuangan yang dipisahkan	1,679,852,207.00	1,702,500,000.00	1,787,625,000.00	1,877,006,250.00	1,970,856,562.00
d	Lain-lain PAD yang sah	2,637,349,000.00	2,278,500,000.00	2,392,425,000.00	2,512,046,250.00	2,637,648,562.00
2	Dana Perimbangan	378,580,227,270.00	458,925,126,438.00	481,871,382,759.00	505,964,951,897.00	531,263,199,491.00
a	Dana bagi hasil pajak/bukan pajak	18,453,045,270.00	18,065,494,438.00	18,968,769,159.00	19,917,207,617.00	20,913,067,998.00
b	DAU	322,484,482,000.00	396,665,102,000.00	416,498,357,100.00	437,323,274,955.00	459,189,438,702.00
c	DAK	37,642,700,000.00	44,194,530,000.00	46,404,256,500.00	48,724,469,325.00	51,160,692,791.00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	39,215,571,172.00	57,545,815,960.00	60,423,106,758.00	63,444,262,095.00	66,616,475,200.00
a	Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Dana bagi hasil pajak dr. Prop dan Pemda lainnya	7,496,420,972.00	9,369,768,200.00	9,838,256,610.00	10,330,169,440.00	10,846,677,912.00
d	Bantuan Keuangan dr. Prop atau Pemda lainnya	31,719,150,200.00	48,176,047,760.00	50,584,850,148.00	53,114,092,655.00	55,769,797,288.00
e	Dana penyesuaian dan otonomi Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Pendapatan		433,251,432,409.00	530,336,990,958.00	556,853,840,505.00	584,696,532,528.00	613,931,359,153.00

Sumber : Data yang diolah, 2011

B. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2011-2015

Belanja Daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan lainnya, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal yang dipergunakan mendanai pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.6.
Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2011 s/d 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
BELANJA						
1	Belanja Tidak Langsung	302,029,393,539.00	363,557,529,860.00	381,735,406,353.00	400,822,176,669.00	420,863,285,503.00
a	Belanja Pegawai	279,220,393,539.00	327,917,904,160.00	344,313,799,368.00	361,529,489,336.00	379,605,963,803.00
b	Belanja Bunga	0,00	-	-	-	-
c	Belanja Subsidi	0,00	-	-	-	-
d	Belanja Hibah	8,919,500,000.00	28,924,541,000.00	30,370,768,050.00	31,889,306,452.00	33,483,771,775.00
e	Belanja Bantuan Sosial	5,361,500,000.00	5,175,000,000.00	5,433,750,000.00	5,705,437,500.00	5,990,709,375.00
f	Belanja Bagi Hasil	0,00	-	-	-	-
g	Belanja Bantuan Keuangan	6,528,000,000.00	1,004,000,000.00	1,054,200,000.00	1,106,910,000.00	1,162,255,500.00
h	Belanja tidak tetap/tak terduga	2,000,000,000.00	536,084,700.00	562,888,935.00	591,033,381.00	620,585,050.00
2	Belanja Langsung	133,482,038,870.00	190,808,632,900.00	200,349,064,545.00	210,366,517,771.00	220,884,843,660.00
a	Belanja Pegawai	0,00	-	-	-	-
b	Belanja Barang dan Jasa	35,766,375,870.00	58,690,425,400.00	61,624,946,670.00	64,706,194,003.00	67,941,503,703.00
c	Belanja Modal	97,715,663,000.00	132,118,207,500.00	138,724,117,875.00	145,660,323,768.00	152,943,339,957.00
Jumlah Belanja		435,511,432,409.00	554,366,162,760.00	582,084,470,898.00	611,188,694,440.00	641,748,129,163.00

Sumber : Data yang diolah, 2011

Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan selama 4 (Empat) tahun terakhir (Tahun 2007 sampai dengan tahun 2010) memperlihatkan bahwa terdapat komponen kondisi dimana terjadi pertumbuhan/penurunan proporsi sumber pendapatan, pencapaian target pendapatan, realisasi belanja, proporsi penggunaan anggaran dan pembiayaan.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah, maka dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain:

1. Bidang perekonomian rakyat dan iklim investasi

- a. Masih belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan masih belum maksimalnya penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah
- b. Struktur perekonomian masih belum berkembang optimal secara menyeluruh karena hanya beberapa sektor yang berkembang diantaranya sektor pertanian
- c. Produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perdagangan masih belum berkembang secara signifikan.
- d. Kreativitas dan penguasaan teknologi bagi industri mikro dan kecil masih rendah, serta akses terhadap permodalan masih sulit.
- e. Perekonomian rakyat belum dikembangkan secara komprehensif
- f. Prosedur perizinan dan regulasi investasi yang belum mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif

2. Bidang sumber daya manusia

- a. Kualitas sumber daya manusia (SDM) masih rendah yang menyebabkan kreativitas juga rendah
- b. Sarana dan prasarana serta kebijakan terkait peningkatan kualitas pendidikan masih belum optimal
- c. Kurangnya sarana dan akses pelayanan serta tenaga kesehatan baik itu tenaga medis, dokter maupun dokter spesialis.

3. Bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan

- a. Masih cukup tingginya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
- b. Masih cukup tingginya kesenjangan sosial ekonomi antar golongan pendapatan, antar masyarakat dan antar wilayah
- c. Masih banyaknya wilayah yang tergolong tertinggal baik pada tingkat desa/kelurahan maupun kecamatan

4. Bidang revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan

- a. Masih rendahnya tingkat produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian
- b. Masih belum optimalnya penggunaan teknologi dalam peningkatan produktivitas pertanian
- c. Masih rendahnya teknologi, sarana dan prasarana perikanan tangkap
- d. Kurangnya modal kerja dan manajemen pengelolaan perikanan darat belum profesional

- e. Masih rendahnya dukungan infrastruktur terutama jalan sentra produksi untuk memperlancar distribusi dan pemasaran produk-produk pertanian

5. Bidang infrastruktur dasar

- a. Kondisi infrastruktur dasar masih banyak yang kurang pemeliharaan sehingga mengalami kerusakan
- b. Perlunya kelanjutan pembangunan sarana dan prasarana yang belum terselesaikan dan belum berfungsi optimal
- c. Masih belum optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana yang sudah ada
- d. Pasokan energi listrik yang masih sangat rendah sehingga menjadi permasalahan yang tidak kunjung selesai.

6. Bidang sumber daya alam, lingkungan hidup dan mitigasi bencana

- a. Belum optimalnya kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- b. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup masih belum berjalan secara maksimal
- c. Pengelolaan sumber daya mineral dan tambang yang belum berjalan optimal
- d. Perlunya peningkatan kualitas informasi bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana alam
- e. Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan masih belum berjalan optimal

7. Bidang pariwisata, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi

- a. Perencanaan dan pengembangan potensi wisata masih belum optimal, terpadu dan terintegrasi
- b. Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan promosi wisata belum optimal
- c. Pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman budaya masih belum maksimal
- d. Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah tangga
- e. Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha mikro dan kecil serta bidang pertanian

8. Bidang pemerintahan, hukum dan ketertiban umum

- a. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam menjalankan mekanisme pembangunan daerah
- b. Belum optimalnya perbaikan dan peningkatan pelayanan publik
- c. Belum optimalnya pembangunan "*capacity building*" institusi-institusi pemerintahan sehingga kurang berperan dalam alokasi sumber daya secara efektif dan efisien
- d. Masih rendahnya moralitas di jajaran pemerintahan yang tercermin dalam banyaknya kasus-kasus pelanggaran asusila, narkoba maupun korupsi
- e. Masih rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

- f. Rendahnya partisipasi masyarakat dan aparatur negara dalam melaksanakan pembangunan daerah
- g. Kurangnya sinergitas antar stakeholder dalam pembangunan daerah

Dari permasalahan-permasalahan tersebut disusunlah isu-isu strategis daerah dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, kemampuan sumber daya aparatur pelaksana, pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah, dampak yang ditimbulkannya terhadap publik, daya ungkit terhadap pembangunan daerah dan kemudahan untuk dilaksanakan.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis dinamika lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan selama 5 (lima) tahun yang akan datang, yang memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian untuk menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Proses penentuan strategi pembangunan dilakukan dengan menganalisis isu-isu yang berkembang dilihat secara umum dan sistematis, dengan jalan melakukan identifikasi berbagai faktor-faktor dalam lingkungan internal dan eksternal RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010-2015. Beberapa isu strategis daerah yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut :

1. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah

Sempitnya wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan pasca pemekaran menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk berupaya semaksimal mungkin menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah sehingga pembiayaan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah dapat berlangsung secara maksimal.

2. Bengkulu Selatan merupakan daerah tertinggal dan rawan bencana

Perlunya dilakukan upaya untuk peningkatan kualitas informasi bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana alam. Kedepan perlu dilakukan sosialisasi mitigasi bencana, pembentukan satgas bencana, pembangunan jalur evakuasi bencana, pemetaan daerah rawan bencana, penyusunan dokumen RTRW berbasis mitigasi bencana.

3. Perlunya peningkatan sarana dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan

Sarana dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan perlu ditingkatkan sehingga akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan terhadap masyarakat.

4. Adanya Kerusakan Lingkungan dan Perambahan Hutan Lindung

Pasca pemekaran pada tahun 2003, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki luas wilayah yang relative lebih sempit dibandingkan dengan Kabupaten hasil pemekaran. Dengan lebih sempitnya luas wilayah ini diikuti dengan berkurangnya potensi daerah yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan eksese yang cukup signifikan bagi upaya peningkatan kesejahteraan daerah terutama yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini mendorong perilaku masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai aktivitas yang berdampak pada perusakan lingkungan bahkan sampai pada perambahan hutan lindung.

5. Masih Rendahnya Pemeliharaan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur Dasar

Kabupaten Bengkulu Selatan telah memiliki pondasi yang kuat dalam hal pembangunan karena telah didukung oleh infrastruktur yang bisa dikatakan telah merata di semua wilayah dalam kabupaten. Dengan kata lain sudah tidak ada lagi wilayah di Kabupaten Bengkulu Selatan yang tidak bisa dijangkau.

Namun, kondisi yang tergambar saat ini justru yang menjadi permasalahan bagi Kabupaten Bengkulu Selatan adalah belum maksimalnya pengembangan infrastruktur yang telah ada tersebut, sehingga banyak ditemui infrastruktur baik itu jalan, jembatan dan lain-lain yang sudah rusak dan membutuhkan perbaikan, peningkatan dan bahkan pembangunan baru lagi.

6. Belum Berkembangnya Kawasan Strategis Perkotaan Maupun Ekonomi

Kawasan strategis perkotaan maupun ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan belum berkembang secara maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor selain permasalahan anggaran, diantaranya adalah belum berjalannya plotting atau penentuan rencana pembangunan kawasan baik itu kawasan strategis perkotaan maupun ekonomi. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan, belum tampak rencana pengembangan kawasan tersebut. Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait seharusnya sudah mulai merancang rencana pengembangan kawasan-kawasan strategis tersebut sehingga Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki arah pembangunan yang jelas dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7. Perlunya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik

Pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari *rule government* menjadi *good governance*. Membangun *good governance* bukan semata-mata masalah memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah persoalan etika, sikap dan perilaku. Dalam *good governance* tidak lagi pemerintah, tetapi juga *citizen*, masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan dalam *governance*, masyarakat bangsa.

Efektivitas dan efisiensi penerapan *good governance* dapat dilakukan melalui sinergi manajemen sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat, yang saling berinteraksi dan berkoordinasi. Pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik.

8. E-Government (e-Gov)

Sesuai dengan rencana pembangunan daerah, percepatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah perlu dimulai dengan pembangunan infrastruktur TIK yang memadai. Selanjutnya TIK dimanfaatkan untuk mendorong reformasi pelayanan publik didukung dengan penerapan manajemen mutu dan komitmen untuk meningkatkan kualitas SDM. Dengan pelayanan publik yang baik diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam bidang pemerintahan, hukum dan politik, sehingga dapat mengurangi biaya tinggi serta mendorong aktivitas perekonomian.

9. Rendahnya produktivitas dan daya saing daerah

Produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor pendukung PDRB masih rendah terutama pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalan serta industri pengolahan. Kedepan diharapkan dapat ditingkatkan produktivitas terutama pada sektor-sektor yang memberikan kontribusi tinggi bagi PDRB sehingga daya saing daerah meningkat.

10. Masih terjadinya krisis energi

Peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan stabilitas ketahanan sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahasannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal, dan terpadu. Sementara itu, kelangkaan ketersediaan energi tak terbarukan juga terus terjadi karena pola konsumsi energi masih menunjukkan ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan.

Tantangan utama dalam penyediaan energi adalah mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan meningkatkan energi terbarukan seperti biogas, biomassa, panas bumi (geothermal), energi matahari, arus laut, dan tenaga angin. Masyarakat mulai mengambil peran dalam lingkungan dan inisiasi pemanfaatan energi terbarukan, antara lain melalui kajian pemanfaatan bio-energi, panas bumi, dan tenaga surya untuk kelistrikan sebagai upaya mengatasi kelangkaan ketersediaan energi.

11. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan relatif mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis.

12. Peningkatan kerjasama antar daerah

Kerjasama dalam bentuk yang beragam dirasakan masih belum memunculkan hasil yang memadai sehingga perlu dibangun kolaborasi strategis (jangka panjang) yang bersifat kelembagaan. Kerjasama antara daerah tetangga, kemitraan daerah dan keterpaduan kebijakan pusat-daerah perlu dibangun untuk memadukan potensi pembangunan. Kondisi geografis yang sangat strategis menghubungkan Propinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kaur sebagai jalur Lintas Barat Sumatera merupakan potensi yang sangat baik untuk dikembangkan dengan meningkatkan kualitas jalan dan membuka akses jalan alternative.

13. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam menjalankan mekanisme pembangunan daerah.

Pelaksanaan pembangunan yang baik dan *accountable* harus diawali dengan perencanaan yang baik, terarah dan terukur. Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang baik dan aplikatif, harus didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia terutama dalam bidang perencanaan yang memiliki kemampuan analisis dan berpengetahuan luas.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2010-2015 menetapkan visi yang akan dicapai yaitu menuju "***Bengkulu Selatan Tangguh***", dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kalimat "TANGGUH" dalam visi tersebut merupakan kata kunci yang menjadi kontrak politik yang harus diwujudkan. Dimensi yang terkandung dalam kalimat "TANGGUH" adalah Mewujudkan Bengkulu Selatan yang Transparan dan Akuntabel, Aspiratif, Normatif, Gotong-royong, dan Tumbuhnya Sektor Ekonomi Usaha Rakyat berbasis komoditas perkebunan dan ternak, serta Interaksi Sosial yang Harmonis Berlandaskan kehidupan masyarakat yang religius.

5.2. Misi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, disusun misi sebagai langkah untuk mempermudah dan mempercepat pencapaian visi.

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance* dan *clean government*).
2. Mewujudkan kemandirian dalam pembangunan daerah dengan pendekatan partisipatif dan berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi rakyat, didukung oleh infrastruktur yang baik dan SDM yang berkualitas.
4. Mewujudkan tatanan sosial kemasyarakatan yang harmonis, etis, demokratis, religius dengan tetap bertumpu pada nilai-nilai kearifan lokal.
5. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesetaraan gender dalam pembangunan daerah.

Misi Kesatu : Menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance* dan *clean government*).

Penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan yang mana pada saat ini telah menjadi wacana nasional dimana disetiap lini dan sektor pemerintahan baik itu pusat maupun daerah harus mampu melaksanakan reformasi birokrasi. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang rujukan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, dan untuk melengkapinya telah dibentuk perangkat kelembagaan berupa Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Misi ini memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance* dan *clean government*) dengan mengoptimalkan *Resources Base* aparatur Pemerintah Daerah pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Misi Kedua : Mewujudkan kemandirian dalam pembangunan daerah dengan pendekatan partisipatif dan berwawasan lingkungan.

Seiring bergulirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai representasi dari pelaksanaan otonomi daerah, menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu mengkreasikan kebijakan dan melaksanakan pembangunan yang mengedepankan berkembangnya partisipasi masyarakat dan berwawasan lingkungan. Dengan konsep *bottom up* memungkinkan perencanaan pembangunan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari pembangunan yang dilaksanakan dan akhirnya memiliki *sense of belonging* terhadap hasil pembangunan tersebut.

Misi ini memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan kemandirian dalam pembangunan daerah dengan pendekatan partisipatif dan berwawasan lingkungan, dengan menggali dan mengoptimalkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), unit pengelola keuangan, Perencanaan, lingkungan hidup, penanggulangan bencana dan kebersihan.

Misi Ketiga : Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi rakyat, didukung oleh infrastruktur yang baik dan SDM yang berkualitas.

Indikator yang memiliki pengaruh kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diupayakan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penyediaan infrastruktur yang baik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Misi ini memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan ekonomi rakyat, didukung oleh infrastruktur yang baik dan SDM yang berkualitas, melalui optimalisasi *Resources Base* yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat desa, perindustrian, perdagangan dan koperasi, perikanan dan kelautan.

Misi Keempat : Mewujudkan tatanan sosial kemasyarakatan yang harmonis, etis, demokratis, religius dengan tetap bertumpu pada nilai-nilai kearifan lokal.

Pembangunan daerah yang dilaksanakan diarahkan untuk meningkatkan kondisi daerah yang kondusif dimana tatanan sosial kemasyarakatan berjalan harmonis, etis dan demokratis, serta kebersamaan dan kerukunan dalam kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat tercipta dengan tetap bertumpu pada nilai-nilai kearifan lokal.

Memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan tatanan sosial kemasyarakatan yang harmonis, etis, demokratis, religius dengan tetap bertumpu pada nilai-nilai kearifan lokal.

Misi Kelima : Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesetaraan gender dalam pembangunan daerah

Pelaksanaan pembangunan yang baik adalah yang mampu mengakomodir dan memaksa seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif sehingga pembangunan dapat berhasil guna dan berdaya guna. Tanpa terkecuali, pembangunan juga harus melibatkan dan memfokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan dengan konsep kesetaraan gender, sehingga pembangunan akan dapat berjalan maksimal dan optimal.

Memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas dan peran perempuan, pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dari dirumuskannya visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah:

Misi 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik (*Good Governance* dan *Clean Governance*)

Tujuan :

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan umum
- Meningkatkan kapasitas birokrasi
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sasaran :

- Meningkatnya opini audit pengelolaan keuangan daerah oleh BPK dari WDP ke WTP
- Meningkatnya Penilaian LAKIP Kabupaten dan LPPD dari tahun ke tahun oleh BPKP
- Meningkatnya kompetensi Aparatur dan kapasitas organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah
- Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public

Misi 2 : Mewujudkan kemandirian dalam pembangunan daerah dengan pendekatan partisipatif dan berwawasan lingkungan

Tujuan :

- Meningkatkan Kemandirian dalam pembangunan daerah
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
- Meningkatkan Kualitas dan pelestarian lingkungan hidup serta mitigasi bencana

Sasaran :

- Meningkatkan Pendapatan Daerah
- Terwujudnya desa maju mandiri
- Terwujudnya Pembangunan yang berwawasan lingkungan
- Minimalisasi resiko bencana

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi rakyat didukung oleh infrastruktur yang baik dan sdm yang berkualitas

Tujuan :

- Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
- Peningkatan SDM yang berkualitas

Sasaran :

- Peningkatan perekonomian masyarakat
- Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur
- Meningkatkan rata2 lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas
- Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas
- Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah, Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun serta Menurunnya disparitas dan kualitas pelayanan

pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan dan masyarakat.

- Meningkatnya umur harapan hidup, Menurunnya angka kematian ibu dan bayi, Menurunnya prevalensi kekurangan gizi
- Meningkatkan peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan

Misi 4 : Mewujudkan tatanan sosial kemasyarakatan yang harmonis, etis, demokratis, religius dengan tetap bertumpu pada nilai-nilai kearifan lokal

Tujuan :

- Mewujudkan tatanan sosial kemasyarakatan yang demokratis dan harmonis
- Mewujudkan tatanan masyarakat sosial yang religius
- Mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal

Sasaran :

- Tumbuhnya iklim demokrasi yang kondusif
- Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan daerah
- Menumbuhkembangkan iklim yang harmonis dalam masyarakat
- Menumbuhkan pemahaman keagamaan
- Meningkatkan aktifitas keagamaan
- Meningkatkan minat masyarakat dan peran lembaga adat untuk melestarikan adat istiadat dan budaya lokal

Misi 5 : Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesetaraan gender dalam pembangunan daerah

Tujuan :

- Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan
- Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan

Sasaran :

- Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dalam pembangunan daerah
- Semakin berdayanya perempuan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pembangunan
- Semakin tingginya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan

5.4. Prioritas Pembangunan Daerah

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan
3. Revitalisasi sektor pertanian dan ketahanan pangan
4. Infrastruktur dasar (pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika)
5. Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan
6. Sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
7. Peningkatan peran dan perlindungan perempuan
8. Pariwisata, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi
9. Politik, hukum dan ketertiban umum

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau untuk memperlancar dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan komponen dari bagian yang diperlukan dalam mencapai misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagai dasar perumusan program menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rumusan strategi merupakan uraian pernyataan yang menjelaskan bagaimana misi, tujuan dan sasaran akan diwujudkan. Strategi akan dilengkapi dengan arah kebijakan, yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar menuju pada pencapaian misi, tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Untuk mewujudkan 5 (lima) misi, 13 (tiga belas) tujuan dan 23 (dua puluh tiga) sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010-2015, maka disusunlah 30 (tiga puluh) strategi dan 106 (seratus enam) arah kebijakan dengan rincian : a) Misi I sebanyak 4 strategi dan 10 arah kebijakan; b) Misi II sebanyak 5 strategi dan 12 arah kebijakan; c) Misi III sebanyak 14 strategi dan 65 arah kebijakan dan d) Misi IV sebanyak 6 strategi dan 16 arah kebijakan; e) Misi V sebanyak 4 strategi dan 5 arah kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance dan clean governance*)

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan Misi I dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Strategi : Melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan taat azaz

Dalam rangka mensukseskan strategi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang taat azaz, maka disusunlah beberapa arah kebijakan diantaranya meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten dan desa, serta pengembangan sistem pelaporan keuangan daerah

2. Strategi : Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran

Arah kebijakan yang direncanakan untuk merealisasikan strategi tersebut adalah meningkatkan penilaian LAKIP Kabupaten dan LPPD dengan melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan program kegiatan pembangunan dan peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, serta mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah

3. Strategi : Melakukan Reformasi Birokrasi

Dalam menunjang keberhasilan strategi diatas, disusun arah kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana, disiplin, kapasitas sumberdaya, pendidikan kedinasan, pembinaan dan pengembangan aparatur, serta peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan Penataan Peraturan perundang – undangan

4. Strategi : Menerapkan Standar Pelayanan Prima

Arah kebijakan yang disusun guna mendukung tercapainya strategi di atas adalah dengan mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan publik.

B. Misi 2 : Mewujudkan kemandirian dalam pembangunan daerah dengan pendekatan partisipatif dan berwawasan lingkungan

1. Strategi : Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan yang disusun dalam rangka optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah adalah mengoptimalkan dan memperluas sumber pendapatan daerah, menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah, dan pengembangan usaha perdagangan sektor jasa, perikanan dan kelautan serta pariwisata.

2. Strategi : Pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam pembangunan

Dalam rangka mensukseskan strategi diatas, maka disusun arah kebijakan diantaranya peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa, dan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.

3. Strategi : Optimalisasi penataan ruang

Optimalisasi penataan ruang merupakan strategi yang cukup strategis, terkait dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan yang merata bagi seluruh rakyat, namun tetap memperhatikan penataan ruang. Dalam upaya mensukseskan strategi optimalisasi penataan ruang, disusun arah kebijakan penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

4. Strategi : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam

Arah kebijakan yang disusun untuk menunjang strategi tersebut adalah pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, serta pemanfaatan, perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam

5. Strategi : Meningkatkan pengelolaan resiko bencana

Dalam menunjang strategi tersebut dirumuskan arah kebijakan meningkatkan kesiagaan dan pencegahan dini, melaksanakan tanggap darurat bencana dan penanganan pasca bencana.

C. Misi 3 : Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi rakyat didukung oleh infrastruktur yang baik dan SDM yang berkualitas

1. Strategi : Mewujudkan perekonomian masyarakat dengan menjadikan industri rakyat sebagai motor penggerak

Dalam rangka menunjang strategi tersebut, maka dirumuskan arah kebijakan diantaranya : mengembangkan sektor perdagangan dan jasa sebagai penggerak roda penggerak perekonomian masyarakat, membangun pola jaringan rumpun industri (*industrial cluster*) sesuai dengan potensi daerah, mengembangkan industri berbasis sumber daya (*resource-based industries*) terutama pertanian, pariwisata, pertambangan, kehutanan dan kelautan serta perikanan, pengembangan sumber-sumber penggerak dan pengembangan energy alternative, dan meningkatkan ketersediaan data dan sinergitas perencanaan pembangunan ekonomi.

2. Strategi : Meningkatkan dan memberdayakan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi sebagai pelaku ekonomi yang berdaya saing tinggi

Dalam upaya mencapai strategi tersebut diatas, dirumuskan arah kebijakan antara lain; meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk-produk UMKM dan koperasi, meningkatkan akses permodalan dan pemasaran produk-produk UMKM dan koperasi dan menjamin ketersediaan bantuan teknis, manajemen dan teknologi tepat guna bagi UMKM dan koperasi

3. Strategi : Optimalisasi kebijakan revitalisasi pertanian, kelautan dan perikanan

Arah kebijakan untuk menunjang strategi diatas adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, dan meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan, meningkatkan permodalan dan pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan peternakan serta kelautan dan perikanan, meningkatkan teknologi, sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan, meningkatkan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan berkelanjutan, meningkatkan pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan serta kelautan dan perikanan, meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dan meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya

4. Strategi : Peningkatan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/keberpihakan

Dalam menunjang strategi diatas, dirumuskan arah kebijakan antara lain menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan.

5. Strategi : Mengembangkan pusat-pusat ekonomi dan kewirausahaan masyarakat serta peningkatan kualitas tenaga kerja

Dalam menunjang pencapaian strategi tersebut, dirumuskan arah kebijakan diantaranya menumbuhkembangkan pusat-pusat ekonomi lokal, mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga, optimalisasi peran latihan kerja dalam mencetak wirausahawan baru, meningkatkan pengawasan, perlindungan dan keselamatan tenaga kerja, dan peningkatan kesempatan, Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja.

6. Strategi : Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial

Arah kebijakan yang direncanakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah meningkatkan kualitas kebijakan, manajemen dan kelembagaan pelayanan sosial, dan meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan kesejahteraan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan fakir miskin.

7. Strategi : Optimalisasi pengelolaan investasi

Arah kebijakan yang direncanakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah meningkatkan promosi investasi yang berdimensi lokal, regional, nasional dan internasional, meningkatkan dan memperbanyak sumber, jenis dan nilai investasi baik dalam negeri maupun luar negeri, debirokrasi prosedur investasi dari dalam maupun luar negeri dan Menjamin keamanan dan iklim bisnis yang menguntungkan.

8. Strategi : Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur yang memadai

Arah kebijakan yang direncanakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi dan drainase, Meningkatkan sarana dan prasarana kebinamargaan, Pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi darat, Meningkatkan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perhubungan, Mengembangkan prasarana lingkungan, air baku dan limbah, Mengembangkan perumahan rakyat yang sesuai standar dan terjangkau dan Meningkatkan pemberdayaan dan pemerataan pembangunan sarana prasarana komunikasi dan informatika serta penyebaran informasi.

9. Strategi : Perluasan dan pemerataan akses pendidikan

Arah kebijakan yang direncanakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan dan Menambah dan meningkatkan pusat-pusat pembelajaran dan pelatihan untuk masyarakat, serta Meningkatkan fungsi perpustakaan menjadi *learning society*.

10. Strategi : Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan

Arah kebijakan yang direncanakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah Meningkatkan kualitas pendidikan, Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan

11. Strategi : Pembangunan sarana dan pasarana serta peningkatan mutu pendidik

Arah kebijakan yang direncanakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah Menetapkan wajib belajar 9 tahun dan menerapkan jam wajib belajar bagi anak usia sekolah, Mendukung pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi(KBK) dan relevan dengan kebutuhan daerah, Meningkatkan akses pembelajaran melalui teknologi informatika dan Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembaga pendidikan perguruan tinggi.

12. Strategi : Perluasan dan pemerataan akses kesehatan

Dalam rangka menunjang keberhasilan strategi perluasan dan pemerataan akses kesehatan dengan arah kebijakan membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana kesehatan.

13. Strategi : Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan

Arah kebijakan yang direncanakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah Memperbanyak dan pemerataan penempatan dokter umum dan spesialis serta tenaga medis, Meningkatkan pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin, Meningkatkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat, Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat, Meningkatkan pengembangan pola hidup bersih dan sehat, Memperbanyak dan pemerataan fasilitas kesehatan di perdesaan dan di daerah terpencil, Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular, Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita dan Meningkatkan standarisasi, Promosi dan kemitraan pelayanan kesehatan.

14. Strategi : Peningkatan peran, potensi dan prestasi pemuda dan olahraga

Arah kebijakan yang direncanakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan di segala bidang, Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan, Melindungi segenap generasi muda dari berbagai pola hidup negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat, Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga, dan Meningkatkan pemasyarakatan, pembinaan dan prestasi olahraga.

D. Misi 4 : Mewujudkan tatanan sosial kemasyarakatan yang harmonis, etis, demokratis, religius dengan tetap bertumpu pada nilai-nilai kearifan lokal

1. Strategi : Meningkatkan peran serta dan inovasi masyarakat dalam berpolitik dan pengambilan keputusan

Arah kebijakan yang direncanakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah Mengembangkan infrastruktur dan suprastruktur politik, dan Meningkatkan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat.

2. Strategi : Membangun sistem politik dan kerjasama antar pemerintah daerah sehingga mampu menciptakan stabilitas dan kemajuan daerah

Arah kebijakan yang direncanakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah Mengoptimalkan peran politisi dan Kepala Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan

3. Strategi : Menegakkan hukum dan keamanan

Untuk menunjang strategi diatas, maka disusun arah kebijakan diantaranya Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat, Menurunkan jumlah kasus penyakit masyarakat dan Meningkatkan Tatanan Sosial yang Harmonis.

4. Strategi : Meningkatkan peran pemerintah dan peran serta organisasi keagamaan dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang religius

Arah kebijakan yang direncanakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah Meningkatkan peran perangkat agama dan lembaga-lembaga agama dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama, Pembuatan dan penegakan regulasi penanganan penyakit masyarakat dan Memperbanyak dan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

5. Strategi : Memfasilitasi kegiatan pembangunan dan peningkatan SDM di bidang keagamaan

Arah kebijakan yang direncanakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah Memberikan insentif bagi aktifitas pendidikan keagamaan dan Pembangunan dan perbaikan sarana ibadah.

6. Strategi : Optimaliasi peran pemerintah dan lembaga adat (BMA)

Arah kebijakan yang direncanakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah Pembinaan terus menerus terhadap lembaga adat (BMA) dan komunitas pelestari budaya lokal, Penguatan terhadap kelompok dan komunitas pelestari budaya lokal, Menetapkan kurikulum lokal (seni dan budaya) dalam pendidikan dan Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai seni dan budaya daerah.

E. Misi 5 : Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesetaraan gender dalam pembangunan daerah

1. Strategi : Memberikan akses seluas-luasnya bagi perempuan dalam pendidikan dan kesehatan

Arah kebijakan yang direncanakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah Meningkatkan kualitas perempuan melalui peningkatan keluasaan akses terhadap pendidikan, Meningkatkan kualitas perempuan melalui peningkatan keluasaan akses terhadap pelayanan kesehatan dan Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dengan keahlian dan keterampilan khusus.

2. **Strategi : Pemberian dukungan bagi keleluasaan perempuan untuk berkarya**

Arah kebijakan yang direncanakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah Memberdayakan perempuan dalam organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan dan Memberikan akses seluas-luasnya bagi perempuan untuk berorganisasi dan bermasyarakat.

3. **Strategi : Pelibatan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah**

Arah kebijakan yang direncanakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah Memberikan porsi keterlibatan perempuan dalam pembangunan daerah

Tabel 6.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi 1 : Menuju “Bengkulu Selatan Tangguh”, dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan yang berkelanjutan			
Misi 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik (Good Governance dan Clean Governance)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya opini audit pengelolaan keuangan daerah oleh BPK dari WDP ke WTP Meningkatnya Penilaian LAKIP Kabupaten dan LPPD dari tahun ke tahun oleh BPKP 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah dengan taat azaz Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan dan aset daerah Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten dan desa Pengembangan sistem pelaporan keuangan daerah Meningkatkan penilaian LAKIP Kabupaten dan LPPD Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatkan Kapasitas Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kompetensi Aparatur dan kapasitas organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan Reformasi Birokrasi 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan sarana dan prasarana, disiplin, kapasitas sumberdaya, pendidikan kedinasan, pembinaan dan pengembangan aparatur Melaksanakan Penataan Peraturan perundang - undangan
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> Menerapkan Standar Pelayanan Prima 	<ol style="list-style-type: none"> Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pelayanan Publik

Misi 2 : Mewujudkan kemandirian dalam pembangunan daerah dengan pendekatan partisipatif dan berwawasan lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kemandirian dalam pembangunan daerah	1. Meningkatkan Pendapatan Daerah	1. Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan dan memperluas sumber pendapatan daerah 2. Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah 3. Pengembangan usaha perdagangan sektor jasa, perikanan dan kelautan serta pariwisata
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	1. Terwujudnya desa maju mandiri	1. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa 3. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
3. Meningkatkan Kualitas dan pelestarian lingkungan hidup serta mitigasi bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Pembangunan yang berwawasan lingkungan 2. Minimalisasi resiko bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penataan ruang 2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam 1. Meningkatkan pengelolaan resiko bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 1. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 2. Pemanfaatan, perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam 1. Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan dini 2. Melaksanakan tanggap darurat bencana 3. Penanganan pasca bencana

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi rakyat didukung oleh infrastruktur yang baik dan SDM yang berkualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>1. Peningkatan perekonomian masyarakat</p>	<p>1. Mewujudkan perekonomian masyarakat dengan menjadikan industri rakyat sebagai motor penggerak</p> <p>2. Meningkatkan dan memberdayakan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi sebagai pelaku ekonomi yang berdaya saing tinggi</p> <p>3. Optimalisasi kebijakan revitalisasi pertanian, kelautan dan perikanan</p>	<p>1. Mengembangkan sektor perdagangan dan jasa sebagai penggerak roda penggerak perekonomian masyarakat</p> <p>2. Membangun pola jaringan rumpun industri (<i>industrial cluster</i>) sesuai dengan potensi daerah</p> <p>3. Mengembangkan industri berbasis sumber daya (<i>resource-based industries</i>) terutama pertanian, pariwisata, pertambangan, kehutanan dan kelautan serta perikanan</p> <p>4. Pengembangan sumber-sumber penggerak dan pengembangan energy alternatif</p> <p>5. Meningkatkan ketersediaan data dan sinergitas perencanaan pembangunan ekonomi</p> <p>1. Meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk-produk UMKM dan koperasi</p> <p>2. Meningkatkan akses permodalan dan pemasaran produk-produk UMKM dan koperasi</p> <p>3. Menjamin ketersediaan bantuan teknis, manajemen dan teknologi tepat guna bagi UMKM dan koperasi</p> <p>1. Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan</p> <p>2. Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan</p>

		<p>4. Peningkatan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/keberpihakan</p> <p>5. Mengembangkan pusat-pusat ekonomi dan kewirausahaan masyarakat serta peningkatan kualitas tenaga kerja</p>	<p>3. Meningkatkan permodalan dan pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan peternakan serta kelautan dan perikanan</p> <p>4. Meningkatkan teknologi, sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan</p> <p>5. Meningkatkan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan berkelanjutan</p> <p>6. Meningkatkan pemberdayaan penyuluh pertanian /perkebunan serta kelautan dan perikanan</p> <p>7. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</p> <p>8. Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya</p> <p>1. Menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat</p> <p>2. Meningkatkan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan</p> <p>1. Menumbuh kembangkan pusat-pusat ekonomi lokal</p> <p>2. Mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Keluarga</p> <p>3. Optimalisasi peran latihan kerja dalam mencetak wirausahawan baru</p> <p>4. Meningkatkan pengawasan, perlindungan dan keselamatan tenaga kerja</p> <p>5. Peningkatan kesempatan, Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja</p>
--	--	--	--

	<p>2. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur</p>	<p>6. Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial</p> <p>7. Optimalisasi pengelolaan investasi</p> <p>1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur yang memadai</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas kebijakan. Manajemen dan kelembagaan pelayanan sosial</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan kesejahteraan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan fakir miskin</p> <p>1. Meningkatkan promosi investasi yang berdimensi lokal, regional, nasional dan internasional</p> <p>2. Meningkatkan dan memperbanyak sumber, jenis dan nilai investasi baik dalam negeri maupun luar negeri</p> <p>3. Debirokrasi prosedur investasi dari dalam maupun luar negeri.</p> <p>4. Menjamin keamanan dan iklim bisnis yang menguntungkan</p> <p>1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi dan drainase</p> <p>2. Meningkatkan sarana dan prasarana kebinamargaan</p> <p>3. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi darat</p> <p>4. Meningkatkan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perhubungan</p> <p>5. Mengembangkan prasarana lingkungan, air baku dan limbah</p> <p>6. Mengembangkan perumahan rakyat yang sesuai standar dan terjangkau</p>
--	--	--	---

			7. Meningkatkan pemberdayaan dan pemerataan pembangunan sarana prasarana komunikasi dan informatika serta penyebaran informasi
2. Peningkatan SDM yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya rata2 lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas 2. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas 3. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah, Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun serta Menurunnya disparitas dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan dan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan 1. Peningkatan mutu dan relevansi pendidika 1. Pembangunan sarana dan pasarana serta peningkatan mutu pendidik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan 2. Menambah dan meningkatkan pusat-pusat pembelajaran dan pelatihan untuk masyarakat 3. Meningkatkan fungsi perpustakaan menjadi <i>learning society</i> 1. Meningkatkan kualitas pendidikan 2. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik 3. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan 1. Menetapkan wajib belajar 9 tahun dan menerapkan jam wajib belajar bagi anak usia sekolah 2. Mendukung pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi(KBK) dan relevan dengan kebutuhan daerah 3. Meningkatkan akses pembelajaran melalui teknologi informatika 4. Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembaga pendidikan perguruan tinggi

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Melindungi segenap generasi muda dari berbagai pola hidup negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat 4. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga 5. Meningkatkan pemasyarakatan, pembinaan dan prestasi olahraga
Misi 4 : Mewujudkan tatanan sosial kemasyarakatan yang harmonis, etis, demokratis, religious dengan tetap bertumpu pada nilai-nilai kearifan lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan tatanan sosial kemasyarakatan yang demokratis dan harmonis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumbuhnya iklim demokrasi yang kondusif 2. Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan daerah 3. Menumbuhkembangkan iklim yang harmonis dalam masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran serta dan inovasi masyarakat dalam berpolitik dan pengambilan keputusan 2. Membangun sistem politik dan kerjasama antar pemerintah daerah sehingga mampu menciptakan stabilitas dan kemajuan daerah 1. Menegakkan hukum dan keamanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan infrastruktur dan suprastruktur politik 2. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat 1. Mengoptimalkan peran politisi dan Kepala Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah 2. Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan 1. Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat 2. Menurunkan jumlah kasus penyakit masyarakat 3. Meningkatkan Tatanan Sosial yang Harmonis

2. Mewujudkan tatanan masyarakat sosial yang religius	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan pemahaman keagamaan 2. Meningkatkan aktifitas keagamaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran pemerintah dan peran serta organisasi keagamaan dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang religius 1. Memfasilitasi kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran perangkat agama dan lembaga-lembaga agama dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama 2. Pembuatan dan penegakan regulasi penanganan penyakit masyarakat 3. Memperbanyak dan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan beragama 1. Memberikan insentif bagi aktifitas pendidikan keagamaan 2. Pembangunan dan perbaikan sarana ibadah
3. Mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal	1. Meningkatkan minat masyarakat dan peran lembaga adat untuk melestarikan adat istiadat dan budaya lokal	1. Optimaliasi peran pemerintah dan lembaga adat (BMA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan terus menerus terhadap lembaga adat (BMA) dan komunitas pelestari budaya lokal 2. Penguatan terhadap kelompok dan komunitas pelestari budaya lokal 3. Menetapkan kurikulum lokal (seni dan budaya) dalam pendidikan 4. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai seni dan budaya daerah
Misi 5 : Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesetaraan gender dalam pembangunan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan	1. Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dalam pembangunan daerah	1. Memberikan akses seluas-luasnya bagi perempuan dalam pendidikan dan kesehatan	1. Meningkatkan kualitas perempuan melalui peningkatan keluasaan akses terhadap pendidikan

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Semakin berdayanya perempuan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian dukungan bagi keleluasaan perempuan untuk berkarya 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan kualitas perempuan melalui peningkatan keluasan akses terhadap pelayanan kesehatan 3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dengan keahlian dan keterampilan khusus. 1. Memberdayakan perempuan dalam organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan 2. Memberikan akses seluas-luasnya bagi perempuan untuk berorganisasi dan bermasyarakat
<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin tingginya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelibatan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan porsi keterlibatan perempuan dalam pembangunan daerah

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Kebijakan umum bertujuan menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja, dan berfungsi sebagai acuan dalam menyusun program pembangunan daerah jangka menengah. Program yang disusun untuk mewujudkan sasaran strategis, dengan memakai sumberdaya, sesuai dengan ketentuan serta berdasarkan strategi maupun arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan dan program pembangunan daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance dan clean governance*)

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan dan aset daerah
Program :
 - Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penataan dan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
2. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten dan desa
Program :
 - Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
3. Pengembangan sistem pelaporan keuangan daerah
Program :
 - Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah
4. Meningkatkan penilaian LAKIP Kabupaten dan LPPD
Program :
 - Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Program :
 - Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
6. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah
Program :
 - Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Meningkatkan sarana dan prasarana, disiplin, kapasitas sumberdaya, pendidikan kedinasan, pembinaan dan pengembangan aparatur
Program :
 - Pendidikan Kedinasan

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - Fasilitasi pindah/purna tugas PNS
 - Peningkatan disiplin aparat
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
8. Melaksanakan Penataan Peraturan perundang – undangan
Program :
- Penataan Peraturan Perundang-Undangan
9. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik
Program :
- Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
10. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pelayanan Publik
Program :
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
 - Penataan Administrasi Kependudukan

B. Misi 2 : Mewujudkan kemandirian dalam pembangunan daerah dengan pendekatan partisipatif dan berwawasan lingkungan

Arah Kebijakan :

1. Mengoptimalkan dan memperluas sumber pendapatan daerah
Program :
 - Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah
Program :
 - Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Pengembangan usaha perdagangan sektor jasa, perikanan dan kelautan serta pariwisata
Program :
 - Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
 - Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
 - Pengembangan budidaya perikanan
 - Pengembangan perikanan tangkap
 - Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - Pengembangan Kemitraan
4. Peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Program :
 - Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
5. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa
Program :
 - Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
6. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Program :
 - Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

7. Penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
Program :
 - Perencanaan Tata Ruang
 - Pemanfaatan Ruang
 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - Pengembangan Wilayah Perbatasan
 - Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
8. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Program :
 - Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan
 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
9. Pemanfaatan, perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam
Program :
 - Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
 - Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
 - Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
 - Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
 - Perencanaan dan pengembangan baton
 - Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Hutan Pantai
 - Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
 - Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
10. Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan dini
Program :
 - Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
 - Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
11. Melaksanakan tanggap darurat bencana
Program :
 - Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
 - Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
 - Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
12. Penanganan pasca bencana
Program :
 - Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
 - Tanggap darurat Jalan dan Jembatan
 - Perbaiki perumahan akibat bencana alam/sosial

C. Misi 3 : Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi rakyat didukung oleh infrastruktur yang baik dan SDM yang berkualitas

Arah Kebijakan :

1. Mengembangkan sektor perdagangan dan jasa sebagai penggerak roda penggerak perekonomian masyarakat

Program :

- Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
 - Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
 - Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Membangun pola jaringan rumpun industri (*industrial cluster*) sesuai dengan potensi daerah

Program :

- Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
 - Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
3. Mengembangkan industri berbasis sumber daya (*resource-based industries*) terutama pertanian, pariwisata, pertambangan, kehutanan dan kelautan serta perikanan

Program :

- Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - Pengembangan kemitraan
 - Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
4. Meningkatkan ketersediaan data dan sinergitas perencanaan pembangunan ekonomi

Program :

- Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - Pengembangan Data/Informasi
 - Pengembangan data/informasi/statistik daerah
 - Perbaikan sistem administrasi kearsipan
 - Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 - Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan
5. Meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk-produk UMKM dan koperasi

Program :

- Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
6. Meningkatkan akses permodalan dan pemasaran produk-produk UMKM dan koperasi

Program :

- Pengembangan Sistem Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
7. Menjamin ketersediaan bantuan teknis, manajemen dan teknologi tepat guna bagi UMKM dan koperasi

Program :

- Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
8. Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan

Program :

- Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
9. Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan

Program :

- Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

- Perencanaan Bidang ekonomi
 - Peningkatan Produksi Peternakan
 - Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
 - Pengembangan Budidaya Perikanan
10. Meningkatkan permodalan dan pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan peternakan serta kelautan dan perikanan
Program :
- Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perikanan dan Perkebunan
 - Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
11. Meningkatkan teknologi, sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan
Program :
- Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
 - Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 - Program peningkatan produksi hasil peternakan
 - Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 - Peningkatan penerapan teknologi peternakan
 - Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap
12. Meningkatkan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan berkelanjutan
Program :
- Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
 - Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
 - Peningkatan Kesejahteraan Petani
13. Meningkatkan pemberdayaan penyuluh pertanian /perkebunan serta kelautan dan perikanan
Program :
- Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan dan Pangan
 - Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
 - Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan
 - Penyuluhan Kegiatan RHL dan KTA
14. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Program :
- Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
15. Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya
Program :
- Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan
 - Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut
16. Menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
Program :
- Perencanaan Sosial dan Budaya
 - Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

17. Meningkatkan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan
Program :
 - Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - Pengembangan Data/Informasi
18. Menumbuhkembangkan pusat-pusat ekonomi lokal
Program :
 - Pengembangan Wilayah Transmigrasi
 - Transmigrasi Lokal
 - Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
19. Mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Keluarga
Program :
 - Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
20. Optimalisasi peran latihan kerja dalam mencetak wirausahawan baru
Program :
 - Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
21. Meningkatkan pengawasan, perlindungan dan keselamatan tenaga kerja
Program :
 - Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
22. Peningkatan kesempatan, Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja
Program :
 - Peningkatan Kesempatan Kerja
23. Meningkatkan kualitas kebijakan. Manajemen dan kelembagaan pelayanan sosial
Program :
 - Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
24. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan kesejahteraan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan fakir miskin
Program :
 - Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
 - Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
 - Pembinaan panti asuhan/ panti jompo
 - Pembinaan anak terlantar
 - Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
25. Meningkatkan promosi investasi yang berdimensi lokal, regional, nasional dan internasional
Program :
 - Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
26. Meningkatkan dan memperbanyak sumber, jenis dan nilai investasi baik dalam negeri maupun luar negeri
Program :
 - Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

27. Debirokrasi prosedur investasi dari dalam maupun luar negeri
Program :
 - Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
28. Menjamin keamanan dan iklim bisnis yang menguntungkan
Program :
 - Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
29. Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi dan drainase
Program :
 - Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
 - Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
 - Pembangunan turap/talud/brojong
 - Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
 - Rehabilitasi/ pemeliharaan talud/bronjong
 - Pengendalian banjir
 - Pembangunan infrastruktur perdesaan
 - Pengelolaan areal pemakaman
30. Meningkatkan sarana dan prasarana kebinamargaan
Program :
 - Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
31. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi darat
Program :
 - Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 - Peningkatan pelayanan angkutan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - Peningkatan dan pengamanan lalu lintas
 - Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
32. Meningkatkan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perhubungan
Program :
 - Perencanaan pembangunan daerah
33. Mengembangkan prasarana lingkungan, air baku dan limbah
Program :
 - Penyediaan dan pengolahan air baku
 - Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
 - Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
34. Mengembangkan perumahan rakyat yang sesuai standar dan terjangkau
Program :
 - Pengembangan Perumahan
 - Pemberdayaan Jasa Konstruksi
 - Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

- Lingkungan Sehat Perumahan
 - Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
 - Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
35. Meningkatkan pemberdayaan dan pemerataan pembangunan sarana prasarana komunikasi dan informatika serta penyebaran informasi
- Program :
- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - Pengkajian dan penelitian bidang kominfo
 - Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
 - Pengembangan data/informasi
36. Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan
- Program :
- Pengembangan pendidikan anak usia dini
 - Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - Pendidikan Menengah
 - Pendidikan Luar Biasa
37. Menambah dan meningkatkan pusat-pusat pembelajaran dan pelatihan untuk masyarakat
- Program :
- Pendidikan Non Formal
38. Meningkatkan fungsi perpustakaan menjadi learning society
- Program :
- Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
39. Meningkatkan kualitas pendidikan
- Program :
- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Pendidikan Anak Usia Dini
 - Pendidikan Menengah
40. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik
- Program :
- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
41. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan
- Program :
- Manajemen Pelayanan Pendidikan
42. Menetapkan wajib belajar 9 tahun dan menerapkan jam wajib belajar bagi anak usia sekolah
- Program :
- Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
43. Mendukung pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi(KBK) dan relevan dengan kebutuhan daerah
- Program :
- Pendidikan Menengah
44. Meningkatkan akses pembelajaran melalui teknologi informatika
- Program :
- Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- Pendidikan Menengah
45. Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembaga pendidikan perguruan tinggi
- Program :
- Pendidikan Tinggi
46. Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana kesehatan
- Program :
- Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
 - Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
47. Memperbanyak dan pemerataan penempatan dokter umum dan spesialis serta tenaga medis
- Program :
- Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
48. Meningkatkan pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin
- Program :
- Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
 - Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
49. Meningkatkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat
- Program :
- Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - Pengembangan obat asli Indonesia
 - Pengawasan Obat dan Makanan
 - Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
50. Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat
- Program :
- Perbaikan Gizi Masyarakat
 - Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
 - Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
51. Meningkatkan pengembangan pola hidup bersih dan sehat
- Program :
- Pengembangan Lingkungan Sehat
 - Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
52. Memperbanyak dan pemeratakan fasilitas kesehatan di perdesaan dan di daerah terpencil
- Program :
- Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya

53. Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular
Program :
 - Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
54. Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita
Program :
 - Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
 - Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
55. Meningkatkan standarisasi, Promosi dan kemitraan pelayanan kesehatan
Program :
 - Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
56. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan di segala bidang
Program :
 - Peningkatan peran serta kepemudaan
57. Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan
Program :
 - Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
58. Melindungi segenap generasi muda dari berbagai pola hidup negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat
Program :
 - Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
59. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga
Program :
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
60. Meningkatkan pemasyarakatan, pembinaan dan prestasi olahraga
Program :
 - Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 - Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga

D. Misi 4 : Mewujudkan tatanan sosial kemasyarakatan yang harmonis, etis, demokratis, religius dengan tetap bertumpu pada nilai-nilai kearifan lokal

1. Mengembangkan infrastruktur dan suprastruktur politik
Program :
 - Pendidikan politik masyarakat
2. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat
Program :
 - Pengembangan wawasan kebangsaan
3. Mengoptimalkan peran politisi dan Kepala Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah
Program :
 - Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 - Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
 - Penataan Daerah Otonomi Baru

4. Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan
Program :
 - Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
5. Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat
Program :
 - Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
 - Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
6. Menurunkan jumlah kasus penyakit masyarakat
Program :
 - Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal
 - Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
 - Pengembangan wawasan kebangsaan
7. Meningkatkan Tatanan Sosial yang Harmonis
Program :
 - Pengelolaan areal pemakaman
8. Meningkatkan peran perangkat agama dan lembaga-lembaga agama dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama
Program :
 - Peningkatan pelayanan kehidupan beragama
 - Perencanaan sosial budaya
 - Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
9. Pembuatan dan penegakan regulasi penanganan penyakit masyarakat
Program :
 - Peningkatan pelayanan kehidupan beragama
 - Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
10. Memperbanyak dan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan beragama
Program :
 - Peningkatan pelayanan kehidupan beragama
11. Memberikan insentif bagi aktifitas pendidikan keagamaan
Program :
 - Peningkatan pelayanan kehidupan beragama
12. Pembangunan dan perbaikan sarana ibadah
Program :
 - Peningkatan pelayanan kehidupan beragama
13. Pembinaan terus menerus terhadap lembaga adat (BMA) dan komunitas pelestari budaya lokal
Program :
 - Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
14. Penguatan terhadap kelompok dan komunitas pelestari budaya lokal
Program :
 - Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

15. Menetapkan kurikulum lokal (seni dan budaya) dalam pendidikan
Program :
 - Pengelolaan Kekayaan Budaya
16. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai seni dan budaya daerah
Program :
 - Pengembangan Nilai Budaya

E. Misi 5 : Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesetaraan gender dalam pembangunan daerah

1. Meningkatkan kualitas perempuan melalui peningkatan keluasan akses terhadap pendidikan
Program :
 - Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
2. Meningkatkan kualitas perempuan melalui keluasan akses terhadap pelayanan kesehatan
Program :
 - Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dengan keahlian dan keterampilan khusus
Program :
 - Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
 - Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
4. Memberdayakan perempuan dalam organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan
Program :
 - Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
5. Memberikan akses seluas-luasnya bagi perempuan untuk berorganisasi dan bermasyarakat
Program :
 - Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
6. Memberikan porsi keterlibatan perempuan dalam pembangunan daerah
Program :
 - Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
 - Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Tabel 7.1
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya opini audit pengelolaan keuangan daerah oleh BPK dari WDP ke WTP	<p>Strategi:</p> <p>1 Melakukan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah dengan taat azaz</p> <p>Arah Kebijakan :</p> <p>1 Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan dan aset daerah</p> <p>2 Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten dan desa</p> <p>3 Pengembangan sistem pelaporan keuangan daerah</p>	<p>Selesainya tindak lanjut temuan BPK terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah</p> <p>Terpenuhinya jasa keuangan</p> <p>Terlaksananya Sertifikasi Tanah</p> <p>Terlaksananya evaluasi raperda tentang pajak dan retribusi daerah</p> <p>Tersedianya dokumen standar satuan harga</p> <p>Tersedianya rancangan perda tentang APBD</p>	<p>12 Bln</p> <p>12 Bln</p> <p>70 Sertikat</p> <p>4 Perda</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p>	<p>12 Bln</p> <p>12 Bln</p> <p>350 sertifikat</p> <p>50 Perda</p> <p>5 dokumen</p> <p>5 dokumen</p>	<p>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Program Penataan dan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</p> <p>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</p> <p>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</p> <p>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>Pemerintahan Umum</p> <p>Pemerintahan Umum</p> <p>Pemerintahan Umum</p> <p>Pemerintahan Umum</p> <p>Pemerintahan Umum</p> <p>Pemerintahan Umum</p>	<p>DPPKAD</p> <p>Bagian Keuangan Setda B/S</p> <p>DPPKAD Bagian Tata Pemerintahan Setda B/S</p> <p>Setda Bagian hukum</p> <p>BPMD dan Sekretariat Daerah</p> <p>DPPKAD</p> <p>DPPKAD</p>

		Tersedianya dana untuk penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1 dokumen	5 dokumen	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Umum	DPPKAD
		Tersedianya dana untuk penyusunan peraturan perubahan APBD	1 dokumen	5 dokumen	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Umum	DPPKAD
		Tersedianya dana penyusunan rancangan peraturan KDH penjabaran perubahan APBD	1 dokumen	5 dokumen	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Umum	DPPKAD
		Tersedianya dana penyusunan laporan pertanggung jawaban APBD	1 dokumen	5 dokumen	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Umum	DPPKAD
		Tersedianya dana penyusunan rancangan peraturan KDH penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	1 dokumen	5 dokumen	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Umum	DPPKAD
		Tersedianya dana untuk penyusunan sistem informasi keuangan daerah	1 dokumen	5 dokumen	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Umum	DPPKAD
		Tersedianya dana untuk peningkatan manajemen aset/barang daerah	1 dokumen	5 dokumen	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Umum	DPPKAD
		Tersedianya dana untuk melaksanakan pendataan sumber-sumber pendapatan daerah	1 dokumen	5 dokumen	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Umum	DPPKAD
		Tersedianya dana untuk pemutakhiran data PBB	1 dokumen	5 dokumen	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Umum	DPPKAD
		Tersedianya dana untuk pemutakhiran pajak reklame	1 dokumen	5 dokumen	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Umum	DPPKAD

		Tersedianya dana untuk peningkatan penerimaan PBB	1 dokumen	5 dokumen	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Umum	DPPKAD
		Tersedianya dana untuk koordinasi keuangan	1 Tahun	5 Tahun	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Umum	DPPKAD
		Tersedianya dana untuk pengelolaan gaji PNS	1 Tahun	5 Tahun	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Umum	DPPKAD
		Tersedianya dana untuk penyusunan laporan keuangan semesteran Kabupaten Bengkulu Selatan	2 Dokumen	10 Dokumen	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Umum	DPPKAD
		Tersedianya dana untuk mengevaluasi dan pelaporan	1 Tahun	5 Tahun	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Umum	DPPKAD
		Tersedianya dana untuk membuat laporan pertanggung jawaban keuangan bantuan sosial	1 dokumen	5 dokumen	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Umum	DPPKAD
		Tersedianya dana untuk tuntutan ganti rugi milik pemerintah	1 Tahun	5 Tahun	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Umum	DPPKAD
		Tersedianya dana untuk verifikasi RKA dan DPA Anggaran SKPD	1 Tahun	5 Tahun	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Umum	DPPKAD
		Pedoman Penatausahaan Perbendaharaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Umum	Bagian Keuangan Setda B/S
		Sistem Informasi Keuangan Efektif	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Umum	Bagian Keuangan Setda B/S
		Terlaksananya koordinasi dan kerjasama dengan perbankan dan non perbankan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	10%	100%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Umum	Bagian Adm. Perekonomian

			Terlaksananya koordinasi antar Pemerintah Daerah	1 Kab/Kota	80%	Program Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah	Pemerintahan Umum	Bagian Adm. Perekonomian
2	Meningkatnya Penilaian LAKIP Kabupaten dan LPPD dari tahun ke tahun oleh BPKP	<p>Strategi:</p> <p>1 Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran</p> <p>Arah Kebijakan :</p> <p>1 Meningkatkan penilaian LAKIP Kabupaten dan LPPD</p> <p>2 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</p>	<p>Tersusunnya Dokumen LAKIP Kabupaten</p> <p>Tersusunnya Dokumen LPPD</p> <p>Tersusunnya Dokumen LKPJ</p> <p>Terlaksananya Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</p> <p>Terlaksananya Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah</p> <p>Terlaksananya Tindak lanjut hasil temuan pengawasan</p> <p>Terlaksananya pengawasan internal secara berkala</p>	<p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>5 dokumen</p> <p>5 dokumen</p> <p>5 dokumen</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</p> <p>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</p> <p>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</p> <p>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</p>	<p>Perencanaan Pembangunan</p> <p>Perencanaan Pembangunan</p> <p>Perencanaan Pembangunan</p> <p>Pemerintahan Umum</p> <p>Pemerintahan Umum</p> <p>Pemerintahan Umum</p> <p>Pemerintahan Umum</p>	<p>Sekretariat Daerah (Bagian Ortala & Adm. Pemerintahan Umum)</p> <p>Sekretariat Daerah (Bagian Ortala & Adm. Pemerintahan Umum)</p> <p>Sekretariat Daerah (Bagian Ortala & Adm. Pemerintahan Umum)</p> <p>Inspektorat Daerah</p> <p>Inspektorat Daerah</p> <p>Inspektorat Daerah</p> <p>Inspektorat Daerah</p>

			Terlaksananya Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	1 Tahun	5 Tahun	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pemerintahan Umum	Inspektorat Daerah
		3	Mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			Tingginya partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	0	4 kegiatan			
			Terselenggaranya Musrenbang RKPD	1 kali	5 kali	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			Tersusunnya Dokumen RKPD	1 dokumen	5 dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			Tersusunnya Perbup RKPD	1 dokumen	5 dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			Tersusunnya Dokumen KUA PPA	2 dokumen	10 dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			Tersusunnya Dokumen Perda RPJMD	1 dokumen	1 dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			Tersusunnya Dokumen Perda RPJPD	0	1 dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			Terjalannya koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	0	1 kegiatan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	0	1 tahun	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			Tersusunnya dokumen Perencanaan DAK dan TP	1 dokumen	4 dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			Tersusunnya Dokumen KUA dan PPA	1 dokumen		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			Adanya penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah (One District One Product)	1 kegiatan	4 kegiatan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA

			Tersusunnya Dokumen Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SP2D)	0 dokumen	1 dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bagian Adm. Pembangunan Setda B/S
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pembangunan	1 Tahun	1 Tahun	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bagian Adm. Pembangunan Setda B/S
			Terlaksananya Evaluasi terhadap Kegiatan Dana Swadaya Masyarakat	0	1 Kali	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bagian Adm. Pembangunan Setda B/S
			Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	0	1 Tahun	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bagian Adm. Pembangunan Setda B/S
3	Meningkatnya kompetensi Aparatur dan kapasitas organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah	<p>Strategi:</p> <p>1 Melakukan Reformasi Birokrasi</p> <p>Arah Kebijakan :</p> <p>1 Meningkatkan sarana dan prasarana, disiplin, kapasitas sumberdaya, pendidikan kedinasan, pembinaan dan pengembangan aparatur</p>	<p>Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah</p> <p>Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah</p> <p>Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah</p> <p>Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah/ Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah</p> <p>Terlaksananya Pelatihan Operator SAPK</p>	<p>744 Orang CPNSD selesai Prajabatan Pim III =17 Orang ,Pim II = 10,PiM IV=0</p> <p>39 Orang</p> <p>160 Orang</p> <p>4 Orang</p>	<p>1526 CPNSD</p> <p>18 Diklat Pim II, 63 Diklat Pim III dan 160 Diklat Pim IV</p> <p>306</p> <p>400</p> <p>20 Orang</p>	<p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p>	<p>Kepegawaian Kepegawaian</p> <p>Kepegawaian</p> <p>Kepegawaian</p> <p>Kepegawaian</p> <p>Kepegawaian</p>	<p>BKD</p> <p>BKD</p> <p>BKD</p> <p>BKD</p> <p>BKD</p>

		Tersedianya PPNS bidang Perhubungan	0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kepegawaian	budparHub
		Terpenuhinya penghargaan bagi PNS yang berprestasi	0	4 Tahun	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kepegawaian	Sekretariat DP Korpri
		Tercapainya disiplin PNS	0	4 tahun	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kepegawaian	Sekretariat DP Korpri
		Terlaksananya sumpah PNS	0	4 tahun	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kepegawaian	Sekretariat DP Korpri
		Terlaksananya Penanganan izin perkawinan/perceraian PNS	0	4 tahun	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kepegawaian	Sekretariat DP Korpri
		Tercapainya sosialisasi & penertiban Pakian Dinas lengkap	0	4 tahun	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kepegawaian	Sekretariat DP Korpri
		Tercapainya sosialisasi & Penertiban pakaina dinas lengkap	0	4 tahun	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kepegawaian	Sekretariat DP Korpri
		Terlaksananya pemberian penghargaan kepada PNS yang pensiun	0	4 tahun	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kepegawaian	Sekretariat DP Korpri
		tersedianya Sumber Daya Manusia yang terampil	0	3 Kegiatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kepegawaian	Bagian Keuangan Setda B/S
		Terlaksananya Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	5909	1526 CPNSD	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian	BKD
		Terlaksananya Seleksi penerimaan calon PNS	184 CPNS	18 Diklat Pim II, 63 Diklat Pim III dan 160 Diklat Pim IV	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian	BKD
		Terlaksananya Penyelenggaraan Sumpah PNS	800 PNS	3500 PNS	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian	BKD
		Terlaksananya Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	5905 PNS	36005	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian	BKD

		Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Kepegawaian Tersusunnya Buku Dalam Angka	108 Buku	5 Paket	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian	BKD
			0	230 Buku	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian	BKD
		Terlaksananya Penyediaan Administrasi Informasi Kepegawaian Daerah dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	0	200	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian	BKD
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi dan Persiapan Purna Tugas PNS	97 Orang	690 Orang	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian	BKD
		Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Tahun	5 Tahun	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian	BKD
		Terselenggaranya Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	1 Tahun	5 tahun	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian	BKD
		Terselenggaranya Koordinasi penyelenggaraan diklat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian	BKD
		Terlaksananya Bantuan Pemulangan pegawai yang pensiun dan Tewas dalam Melaksanakan Tugas	97 Orang	1472 Orang	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Kepegawaian	BKD
		Terlaksananya Pengadaan mesin/kartu absensi	0	1	Program peningkatan disiplin aparatur	Kepegawaian	BKD
		Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	160	Program peningkatan disiplin aparatur	Kepegawaian	BKD
		Terselenggaranya bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	0	4 kali	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
2	Melaksanakan Penataan Peraturan perundang - undangan	Terlaksananya Sosialisasi produk hukum daerah di kecamatan	11 Kecamatan dan 11 Desa	11 Kecamatan dan 256 Desa	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)

			Terlaksananya bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Per UU	0 Org	500 Org	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
			Terlaksananya bimbingan tehnik produk hukum daerah	0 Orang	250 Org	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
			Tercapainya pemahaman oleh aparatur tentang RANHAM	1 Dok	5 Dok	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
			Tercapainya pemahaman oleh aparatur tentang RANHAM	1 Dok	5 Dok	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
			Terlaksananya Lomba Keluarga Sadar Hukum di Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi	1 Kali	5 Kali	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
			Terselesainya masalah hukum di Kabupaten Bengkulu Selatan	1 Dok	5 Dok	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
			Terciptanya kesadaran hukum di lingkungan aparatur pemda BS	0 Dok	5 Dok	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
			Terlaksananya koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	0 Kali	5 kali	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
			Terlaksananya penyusunan rencana kerja rancangan perundang-undangan	0 Kali	5 kali	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
			Terlaksananya Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	10 Perda	50 Perda	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
			Terlaksananya Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 Kali	5 Kali	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
			Publikasi peraturan perundang-undangan	1 Dok	5 Dok	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
			Terlaksananya Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-	0 Dok	5 Dok	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)

			undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah					
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang rawan terhadap pelanggaran HAM	1 Kali	5 Kali	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
4	Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	<p>Strategi:</p> <p>1 Menerapkan Standar Pelayanan Prima</p> <p>Arah Kebijakan :</p> <p>1 Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>2 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pelayanan Publik</p>	<p>Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)</p> <p>Terlaksananya Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat</p> <p>Tercapainya Penyusunan sistem Informasi terhadap layanan publik</p> <p>Berjalannya Pengoperasian SIAK secara terpadu</p> <p>Tercapainya Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)</p> <p>Tersedianya tenaga pengelola SIAK yang memadai</p> <p>Tersedianya informasi kependudukan yang dapat diakses masyarakat</p> <p>Tersedianya pelayanan publik dalam bidang kependudukan yang memadai</p> <p>Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan</p>	<p>0</p> <p>0 TAHUN</p> <p>0 TAHUN</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>1 Kegiatan</p> <p>4 TAHUN</p> <p>4 TAHUN</p> <p>5 Kegiatan</p> <p>5 kegiatan</p> <p>4 tahun</p> <p>5 kegiatan</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p>	<p>Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</p> <p>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</p> <p>Program Penataan Administrasi Kependudukan</p>	<p>Pemerintahan Umum</p> <p>Pemerintahan Umum</p> <p>Pemerintahan Umum</p> <p>Kependudukan dan Catatan Sipil</p>	<p>Bagian Adm. Pembangunan Setda B/S</p> <p>KPTSP</p> <p>KPTSP</p> <p>Dinas Dukcapil</p> <p>Dinas Dukcapil</p> <p>Dinas Dukcapil</p> <p>Dinas Dukcapil</p> <p>Dinas Dukcapil</p> <p>Dinas Dukcapil</p>

			Tersedianya data base kependudukan yang baik	0	5 tahun	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Dukcapil
			Tersusunnya kebijakan dalam bidang kependudukan	0	5 tahun	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Dukcapil
			Meningkatnya kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	0	5 tahun	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Dukcapil
			Tersosialisasikannya kebijakan dalam bidang kependudukan	0	5 tahun	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Dukcapil
			Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0	5 tahun	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Dukcapil
5	Meningkatkan Pendapatan Daerah	<p>Strategi:</p> <p>1 Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> <p>Arah Kebijakan :</p> <p>1 Mengoptimalkan dan memperluas sumber pendapatan daerah</p> <p>2 Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah</p> <p>3 Pengembangan usaha perdagangan sektor jasa, perikanan dan kelautan serta pariwisata</p>	<p>Terwujudnya produk hukum tentang pajak dan retribusi</p> <p>Berkembangnya sektor perdagangan, jasa, perikanan dan kelautan serta pariwisata</p>	4 Perda	50 Perda	<p>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir</p>	<p>Pemerintahan Umum</p> <p>Pemerintahan Umum</p> <p>Perdagangan</p> <p>Perdagangan</p> <p>Perdagangan</p> <p>Perikanan dan Kelautan</p>	<p>DPPKAD</p> <p>DPPKAD</p> <p>Dinas Koperindag</p> <p>Dinas Koperindag</p> <p>Dinas Koperindag</p> <p>Dinas Kelautan dan Perikanan</p>

						Program pengembangan budidaya perikanan	Perikanan dan Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Program pengembangan perikanan tangkap	Perikanan dan Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Program pengembangan perikanan tangkap	Perikanan dan Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Dinas Hubkominfo Budpar
						Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Dinas Hubkominfo Budpar
						Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Dinas Hubkominfo Budpar
						Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Dinas Hubkominfo Budpar
						Program Pengembangan Kemitraan	Pariwisata	Dinas Hubkominfo Budpar
						Program Pengembangan Kemitraan	Pariwisata	Dinas Hubkominfo Budpar
6	Terwujudnya desa maju mandiri	<p>Strategi:</p> <p>1 Pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam pembangunan</p> <p>Arah Kebijakan :</p> <p>1 Peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</p>	<p>Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (Pilkades)</p> <p>Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat (Pelatihan KPMD)</p>	7 Desa	125 Desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMD
				0	1 tahun	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMD

		Terlaksananya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	9 Kecamatan	11 Kecamatan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMD
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PNPM-MP	1 tahun	5 Tahun	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMD
		Terlaksananya Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Pembinaan LPMD)	0	142 Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMD
		Terlaksananya musyawarah pembangunan desa (PAP PNPM Integrasi)	0	5 Tahun	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMD
		Terlaksananya Pemberian stimulan pembangunan desa (Lomba Desa/Kelurahan)	2 kali	10 Kali	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMD
		Terlaksananya Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa (Pelatihan P3MD)	0	5 tahun	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMD
	2	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa			Terlaksananya Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMD
		Terlaksananya Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa (Bimtek)	11 Kec	11 Kec	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMD
		Terlaksananya Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa (Bimtek)	0	11 Kec	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMD
		Terlaksananya Pengembangan Prasarana Kantor Desa	0	8 Kantor Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMD
		Terlaksananya Pembinaan Administrasi Keuangan Desa	0	142 Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMD
		Terlaksananya Penyusunan Raperda tentang Desa	0	6 Dokumen	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMD

		3 Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Terlaksananya Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	0	15 klp	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BP4K
			Terlaksananya Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	0	1 Tahun	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMD
			Terfasilitasinya permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	0	20 Kelompok	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMD
			Terfasilitasinya kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	1 Tahun	5 tahun	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMD
			Terfasilitasinya Pembentukan Badan Usaha Milik Desa	0	10 BUMDES	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMD
			Terfasilitasinya Pembentukan Lembaga Keuangan Desa	0	5 Tahun	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMD
			Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pasar Desa	0	6 Pasar desa	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMD
7	Terwujudnya Pembangunan yang berwawasan lingkungan	<p>Strategi:</p> <p>1 Optimalisasi penataan ruang</p> <p>Arah Kebijakan :</p> <p>1 Penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang</p>	<p>Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan</p> <p>Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten</p> <p>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tata Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan</p> <p>Tersedianya peralatan dan perlengkapan Pemetaan dan Penataan</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0 Tahun</p>	<p>1 Dokumen</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Program Perencanaan Tata Ruang</p> <p>Program Perencanaan Tata Ruang</p> <p>Program Perencanaan Tata Ruang</p> <p>Program Perencanaan Tata Ruang</p>	<p>Penataan Ruang</p> <p>Penataan Ruang</p> <p>Penataan Ruang</p> <p>Penataan Ruang</p>	<p>BAPPEDA</p> <p>BAPPEDA</p> <p>BAPPEDA</p> <p>Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota</p>

		Terlaksananya kebijakan tentang penyusunan tata ruang	0	Kelompok Masyarakat	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	BPBD
		Tercapainya Survey dan pemetaan	0	Kelompok Masyarakat	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	BPBD
		Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang	0	1 Tahun	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	BPBD
		Terlaksananya survey dan Pemetaan	0 Tahun	4 Tahun	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	DKPTK
		Terlaksananya fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang.	0 Tahun	4 Tahun	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
		Terlatihnya aparat dalam bidang pemanfaatan ruang	0 Tahun	4 Tahun	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
		Terciptanya Ketetapan Tentang Perizinan	0 Dokumen	1 Dokumen	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Perizinan	0 Tahun	4 Tahun	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
		Terlaksananya Penyusunan rancangan Perda tentang Perizinan	0 Dokumen	1 Dokumen	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
		Terciptanya Surat Izin Mendirikan Bangunan	0 Tahun	4 Tahun	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
		Terciptanya Surat Izin Papan Reklame	0 Tahun	4 Tahun	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

			Terciptanya Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	0 Tahun	4 Tahun	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
			Terlaksananya survey dan Pemetaan Perizinan	0 Tahun	4 Tahun	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
			Tersusunnya Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang	0 Dokumen	1 Dokumen	Program Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
			Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang	0	1 Tahun	Program Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	BAPPEDA
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Pembuatan Perizinan	0 Tahun	4 Tahun	Program Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penunjang Perizinan	0 Tahun	4 Tahun	Program Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
			Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pemanfaatan tata ruang	0 Tahun	4 Tahun	Program Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
			Tersosialisasinya kebijakan, norma, standar, dan prosedur dan manual Pemanfaatan ruang	0 Tahun	4 Tahun	Program Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
			Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten	0 Tahun	4 Tahun	Program Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
			Terlaksananya Survey dan Pemetaan Penataan Kota	0 Tahun	4 Tahun	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

		Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0	1 Tahun	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	BAPPEDA
		Terkoordinasinya penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	0 Tahun	4 Tahun	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan, Izin Papan Reklame, dan Izin Usaha Jasa Konstruksi	0 Tahun	4 Tahun	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan	0 Tahun	4 Tahun	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
		Tersusunnya Kebijakan tentang Perizinan	0 Dokumen	1 Dokumen	Program Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
		Terkoordinasinya Masalah Perizinan	0 Tahun	4 Tahun	Program Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
		Terlaksananya Pelatihan aparat dalam Perencanaan Penyusunan Perizinan	0 Tahun	4 Tahun	Program Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
		Terlaksannanya Pengawasan Pemanfaatan Ruang	0 Tahun	4 Tahun	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
		Terlaksananya Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Perbatasan	0	1 Tahun	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
		Tersusunnya Perencanaan Pengembangan Perbatasan	0	2 Dokumen	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
		Terciptanya Pintu Gerbang Kota Kabupaten	0 Tahun	4 Tahun	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Perencanaan Pembangunan	DKPTK

		Terlaksananya Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	0	1 Tahun	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
		Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1 Dokumen	1 Dokumen	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
		Strategi: 2 Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam					
		Arah Kebijakan : 1 Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup					
		Meningkatnya kebersihan lingkungan di Kota Manna dengfan kegiatan Adipura	1 tahun	4 Tahun	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
		Terkendalinya pencemaran udara	0	4 Tahun	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
		Tersedianya dokumen UKL/ UPL	0	4 Tahun	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
		Terlaksananya Pengawasan Kebijakan Lingkungan Hidup	0	3 Tahun	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
		Tersusunnya zonasi kegiatan pertambangan	0	4 Tahun	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
		Terkelolanya limbah B-3 secara benar	0	1 tahun	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
		Tersusunnya Dokumen Dampak Lingkungan	0	4 dokumen	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
		Tertibnya lokasi pertambangan sesuai RUTR	0	4 Tahun	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup

			Tersusunnya Kebijakan Pencemaran dan perusakan LH	0	2 Dokumen	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Terpenuhinya dokumen lingkungan bagi perusahaan	1	5 dokumen	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Tercegahnya pencemaran lingkungan	0	4 tahun	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Mengurangi pelanggaran hukum masalah lingkungan	0	4 tahun	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Tertibnya pengusaha galian C dan mengendalikan lingkungan hidup akibat penambangan	25%	90%	Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Bagian Adm. Perekonomian
			Terlaksananya koordinasi pendataan hasil bidang pertambangan	20 Pelaku Usaha	70 Pelaku Usaha	Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan	Energi dan SDM	Bagian Adm. Perekonomian
			tercapainya Perencanaan Penyusunan Dokumen dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan liar	0	1 Dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Tercapainya Perencanaan Penyusunan dokumen Rencana aksi Dampak Kerusakan akibat penambangan liar	0	1 dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			Tercapainya Monitoring dan evaluasi Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Liar	0	1 tahun	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan	1 Tahun	5 Tahun	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Pertamanan Tata Kota
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Tahun	5 Tahun	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Pertamanan Tata Kota

			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Tahun	5 Tahun	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Pertamanan Tata Kota
			Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	0 Tahun	4 Tahun	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Pertamanan Tata Kota
			Terlaksananya Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	0 Tahun	4 Tahun	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Pertamanan Tata Kota
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Persampahan	0 Tahun	4 Tahun	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Pertamanan Tata Kota
			Terbangunnya Workshop Kegiatan Pengelolaan Persampahan	0	1 Bangunan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Pertamanan Tata Kota
			Terpeliharanya Gedung Workshop Kegiatan Pengelolaan Persampahan	0 Tahun	4 Tahun	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Pertamanan Tata Kota
			Tersedianya Sarana dan Prasarana WorkShop Kegiatan Pengelolaan Persampahan	0 Tahun	4 Tahun	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Pertamanan Tata Kota
			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana WorkShop Kegiatan Pengelolaan Persampahan	0 Tahun	4 Tahun	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Pertamanan Tata Kota
			Terciptanya Kolam Lindi	0	1 Bangunan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Pertamanan Tata Kota
			Tersedianya Alat Berat dan Wales Penunjang Kegiatan Pengelolaan Persampahan	0	4 Unit	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Pertamanan Tata Kota

			Tersusunnya kebijakan Retribusi Persampahan	0 Dokumen	1 Dokumen	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Pertamanan Tata Kota
			Tersusunnya sistem pengelolaan sampah	0	1 dokumen	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Terlaksananya kegiatan 3R	0	4 tahun	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Tersusunnya Kebijakan pengelolaan sampah	0	1 dokumen	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Tersedianya dana pengelolaan sampah 3R	0	4 tahun	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Tereduksinya sampai melalui kegiatan 3R	1 tahun	5 tahun	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Terkelolanya sampah dengan benar	0	3 tahun	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Terlaksananya diklat pengelolaan persampahan	0	2 tahun	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Terlaksananya koordinasi pengelolaan sampah	0	2 tahun	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Terjalannya pengelolaan sampah antar daerah	0	1 tahun	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Diketahui sistem pengelolaan sampah	0	2 tahun	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Terpisahannya sampah organik, an organik dan B-3	0	2 tahun	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Tersusunnya laporan volume sampah harian kota Manna	1	5 dokumen	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup

			Terciptanya Penataan RTH	1 tahun	5 tahun	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Tertata kebijakan, norma pengelolaan RTH	0	1 dokumen	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Terlaksananya pengenalan kebijakan/norma RTH	0	3 Tahun	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Tertatanya analisis data/informasi pengelolaan RTH	0	1 dokumen	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Tertatanya pengelolaan RTH	0	1 dokumen	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Tersusunnya Ruang Terbuka Hijau	0	4 Tahun	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Tercapainya Ruang Terbuka Hijau	0	4 Tahun	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Tersedianya RTH guna Riset (penelitian) Siswa	0	4 Tahun	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Terjaganya dan pelestarian RTH	1 tahun	5 tahun	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Terlaksananya pengertian RTH terhadap masyarakat	0	4 Tahun	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian RTH	1 Tahun	5 Tahun	Program PengelolahanRuang Terbuka Hijau	Lingkungan Hidup	DKPTK dan LH
			Terlaksananya Peningkatan Taman Kota sebagai Taman Pintar tanah lapang 1	0 Tahun	5 Tahun	Program PengelolahanRuang Terbuka Hijau	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
			Terpeliharanya dan pengembangan taman kota tanah lapang 2	1 Tahun	5 Tahun	Program PengelolahanRuang Terbuka Hijau	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

			Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Taman Hutan Kota Padang panjang	1 Tahun	5 Tahun	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
			Terlaksananya Pengembangan taman rekreasi pasar bawah	1 Tahun	5 Tahun	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
			Terlaksananya Pemeliharaan dan Peningkatan Taman Dua Jalur Jl. Padang Panjang.	0 Tahun	5 Tahun	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
			Terlaksananya Pemeliharaan Taman Kota Jalan Dua Jalur jalan sudirman	1 Tahun	5 Tahun	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
			Terlaksananya Pemeliharaan dan pengembangan Taman di jembatan Batu kuning	0 Tahun	5 Tahun	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
			Terlaksananya Pemeliharaan Taman Tugu Kayu Kunyit	0 Tahun	5 Tahun	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
			Terlaksananya Pemeliharaan Taman di Tugu Hiu Jl. Pangeran Duayu	0 Tahun	5 Tahun	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
			Terlaksananya Pembangunan Taman Sekolah Alam Bumi Perkemahan	0 Tahun	5 Tahun	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
			Tersedianya kendaraan Operasional Pertamanan	0 Tahun	4 Tahun	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Prasarana Pertamanan	0 Tahun	91 Unit	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

		2	Pemanfaatan, perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Mengurangi Limpasan Air dan meningkatkan kualitas dan kuantitas air tanah	1	5 tahun	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Menurunkan tingkat abrasi pantai	0	4 tahun	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Meningkatnya vegetasi di kawasan wisata dan menjaga keseimbangan ekologi kawasan wisata	0	4 tahun	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Menurunnya konsentrasi gas rumah kaca	0	4 tahun	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Menurunnya kerusakan hutan dan lahan	0	3 tahun	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Meningkatnya daerah tangkapan air	0	4 tahun	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Terlaksananya pengendalian dan pengawasan SDA	0	4 tahun	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Adanya komitmen bersama terhadap SDA	0	4 tahun	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Meningkatnya keanekaragaman hayati dan ekosistem	0	3 tahun	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	0	4 tahun	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			meningkatkan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi	0	4 tahun	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kawasan konservasi dan terkendalinya kerusakan lingkungan	1 tahun	5 tahun	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup

			Terlaksananya Upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	0	5 kegiatan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan & ESDM
			Terlaksananya Upaya sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan	0	5 kegiatan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Lingkungan Hidup	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan	0	5 kegiatan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Lingkungan Hidup	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	0	5 kegiatan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Lingkungan Hidup	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	0	5 kegiatan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Lingkungan Hidup	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya Upaya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kehutanan	0	8 Peraturan perundang-undangan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Lingkungan Hidup	Kehutanan dan ESDM
			Terselenggaranya operasi rutin/berkala pengamanan hutan	0	5 kegiatan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Lingkungan Hidup	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya rekonstruksi PAL batas kawasan hutan	0	5 kegiatan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Lingkungan Hidup	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya kegiatan review tata ruang kawasan hutan Kabupaten Bengkulu Selatan	0	5 kegiatan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Lingkungan Hidup	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya inventarisasi lokasi Tahura	0	5 kegiatan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Lingkungan Hidup	Kehutanan dan ESDM
			Tersusunnya Masterplan Tahura	0	5 kegiatan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Lingkungan Hidup	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya inventarisasi perambah hutan Kabupaten Bengkulu Selatan	0	5 kegiatan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Lingkungan Hidup	Kehutanan dan ESDM

			Terlaksananya Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan	0	5 kali	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Lingkungan Hidup	BP4K
			Terlaksananya Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	0	5 kali	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Lingkungan Hidup	BP4K
			Tercapainya Perencanaan Penyusunan Masterplan Review kawasan Hutan Lindung	0	1 Dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		BAPPEDA
			Terlaksananya pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat	0	5 kegiatan	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Kehutanan & ESDM dan Sekretariat Daerah (Bag. Ekonomi)
			Terlaksananya upaya monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat	0	5 kegiatan	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi	0	5 kegiatan	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Kehutanan dan ESDM
			Terbentuknya kesatuan pengelolaan hutan produksi	0	5 kegiatan	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan & ESDM
			Terlaksananya Upaya Pengembangan hutan tanaman	0	5 kegiatan	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya Pengembangan hasil hutan non-kayu	0	5 kegiatan	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan	0	5 kegiatan	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan	0	5 kegiatan	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM

			Terlaksananya upaya optimalisasi PNB	0	5 kegiatan	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya pengelolaan dan pemanfaatan hutan	0	5 kegiatan	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	0	5 kegiatan	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan	0	5 kegiatan	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan	0	5 kegiatan	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya Upaya pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	0	1 juta Bibit	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata (hutan kota)	0	1 juta pohon	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata (hutan kota)	0	5 kegiatan	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya Upaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	0	5 kegiatan	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya Upaya peningkatan pecan serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	0	5 kegiatan	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya Upaya monitoring, evaluasi dan pelaporan	0	5 kegiatan	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya Upaya pengembangan hutan rakyat dan pengkayaan vegetatif	0	5 kegiatan	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM

			Terlaksananya Upaya penghijauan lingkungan	0	5 kegiatan	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya Upaya pembangunan konservasi tanah dan air	0	5 kegiatan	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya Upaya pembangunan konservasi tanah dan air (KTA)	0	5 kegiatan	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya penyusunan RPRHL dan RTn-RHL	0	5 kegiatan	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM
			Tersusunnya peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan	0	8 Peraturan Daerah	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan	0	8 Peraturan Daerah	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan	0	5 kegiatan	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan	0	5 kegiatan	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0	5 kegiatan	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya pengembangan hutan masyarakat adat	0	5 kegiatan	Program perencanaan dan pengembangan baton	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat	0	5 kegiatan	Program perencanaan dan pengembangan baton	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM
			Tersedianya tanaman jenis mangrove	0	1 juta tanaman	Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Hutan Pantai	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM

			Terlaksananya upaya penanaman pohon jenis mangrove	0	1 juta tanaman	Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Hutan Pantai	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai	0	5 kegiatan	Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Hutan Pantai	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM
			Tersusunnya regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C	0	5 kegiatan	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C	0	5 kegiatan	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C	0	5 kegiatan	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan	0	5 kegiatan	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C	0	5 kegiatan	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya pemantauan dan Inventarisasi serta pengendalian pertambangan, geologi air tanah dan energi	0	5 kegiatan	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pangkalan minyak tanah dan SPBU	0	5 kegiatan	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya koordinasi pengembangan ketenaga listrikan	0	5 kegiatan	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya pengembangan jaringan listrik pedesaan/perkotaan	0	5 kegiatan	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Kehutanan dan ESDM

			Terlaksananya pekerjaan pemasangan lampu/dekorasi kota	0	5 kegiatan	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya pemeliharaan lampu jalan dan lampu hias	0	5 kegiatan	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya pelatihan teknis operasi pemeliharaan sistem pembangkit listrik	0	5 kegiatan	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya pelaksanaan study kelayakan pembangkit listrik tenaga mikro hidro	0	5 kegiatan	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Kehutanan dan ESDM
			Terlaksananya upaya pelatihan teknis dan manajemen pengelolaan ketenagalistrikan	0	5 kegiatan	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Kehutanan dan ESDM
8	Minimalisasi resiko bencana	Strategi:						
		1 Meningkatkan pengelolaan resiko bencana						
		Arah Kebijakan :						
		1 Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan dini				Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	BAPPEDA, BPBD
			Tersedianya Informasi Bencana	1 tahun	1 tahun	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kesatuan Bangsa dan Politik
			Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Profil Daerah Rawan Bencana	0	3 Tahun	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
		2 Melaksanakan tanggap darurat bencana				Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	SKPD Terkait
			Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam kepada Masyarakat	0	Kelompok Masyarakat	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	BPBD

			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana	0	Kelompok Masyarakat	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	BPBD
			Terciptanya Pendataan dan Pemetaan Wilayah Potensi Rawan Bencana	0	Kelompok Masyarakat	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	BPBD
			Tersedianya Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	0	Kelompok Masyarakat	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	BPBD
			Tersedianya Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	0	Kelompok Masyarakat	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	BPBD
			Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	0	Kelompok Masyarakat	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	BPBD
			Tersedianya Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	0	Kelompok Masyarakat	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	BPBD
			Tersedianya Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	0	Kelompok Masyarakat	Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Sosial	BPBD
			Terlaksananya Penunjang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	0	Kelompok Masyarakat	Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Sosial	BPBD
			Terlaksananya penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	0	Kelompok Masyarakat	Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Sosial	BPBD
			Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Daerah Rawan Bencana	0	2 tahun	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA

		3	Penanganan pasca bencana			Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA dan BPBD
			Tercapainya Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat	0	Jalan dan Jembatan	Program Tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	BPBD
			Terlaksananya Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat	0	Jalan dan Jembatan	Program Tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	BPBD
			Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0	Kelompok Masyarakat	Program Tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	BPBD
			Terlaksananya Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam	0	Kelompok Masyarakat	Perumahan Perumahan Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Perumahan	BPBD
			Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0	Kelompok Masyarakat	Perumahan Perumahan Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Perumahan	BPBD
9	Peningkatan perekonomian masyarakat	Strategi:						
		1	Mewujudkan perekonomian masyarakat dengan menjadikan industri rakyat sebagai motor penggerak					
		Arah Kebijakan :						
		1	Mengembangkan sektor perdagangan dan jasa sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat	1 Tahun	5 Tahun	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	Dinas Koperindag
			Terciptanya operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetropolitan daerah	1 Tahun	5 Tahun	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Perdagangan	Dinas Koperindag
			Terciptanya Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	1 Tahun	5 Tahun	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Perdagangan	Dinas Koperindag
			Terlaksananya penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	1 Tahun	5 Tahun	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Perdagangan	Dinas Koperindag

			Terciptanya penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	1 Tahun	5 Tahun	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Perdagangan	Dinas Koperindag
			Terbinanya, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	1 Tahun	5 Tahun	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Perdagangan	Dinas Koperindag
			Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	1 Tahun	5 Tahun	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Perdagangan	Dinas Koperindag
			Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa	1 Tahun	5 Tahun	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Perdagangan	Satpol PP
		2	Membangun pola jaringan rumpun industri (industrial cluster) sesuai dengan potensi daerah					
			Tersedianya sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	1 Tahun	5 Tahun	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Perindustrian	Dinas Koperindag
			Terlaksananya Pameran Luar Provinsi Bengkulu	1 Tahun	5 Tahun	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Perindustrian	Dinas Koperindag
			Terlaksananya Bantuan Peralatan Pengerajin Batu Akik	1 Tahun	5 Tahun	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Perindustrian	Dinas Koperindag
			Tercapainya Bantuan Peralatan Abon Ikan	1 Tahun	5 Tahun	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Perindustrian	Dinas Koperindag
			Terlaksananya Bantuan Peralatan Bubuk Kopi	1 Tahun	5 Tahun	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Perindustrian	Dinas Koperindag
			Terlaksananya Bantuan Peralatan Pengemasan Makanan Ringan dan Bubuk Kopi	1 Tahun	5 Tahun	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Perindustrian	Dinas Koperindag
			Terlaksananya Bantuan Peralatan Pengemasan Makanan Ringan dan Bubuk Kopi	1 Tahun	5 Tahun	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Perindustrian	Dinas Koperindag
			Terlaksananya Bantuan Peralatan Bengkel	1 Tahun	5 Tahun	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Perindustrian	Dinas Koperindag

			Terciptanya Peningkatan Volume Pasar Dan Produk	1 Tahun	5 Tahun	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Perindustrian	Dinas Koperindag
			Terciptanya Pelatihan Pembuatan Cinderamata Limbah Kayu Kelapa	1 Tahun	5 Tahun	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian	Dinas Koperindag
			Terciptanya Pelatihan Pengrajin Batu akik	1 Tahun	5 Tahun	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian	Dinas Koperindag
			Terciptanya Pelatihan Pembuatan Abon Ikan	1 Tahun	5 Tahun	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian	Dinas Koperindag
			Terciptanya Magang /Praktek Kerja Pengrajin Bordir ke Sumbar	1 Tahun	3 Tahun	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian	Dinas Koperindag
			Tercapainya Pelatihan Pembuatan Makanan Ringan	1 Tahun	5 Tahun	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian	Dinas Koperindag
			Tersosialisasi Peningkatan Kualitas Pembuatan TDI dan SIUI	1 Tahun	5 Tahun	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian	Dinas Koperindag
			Terciptanya Pelatihan Perajin Kayu Kelapa	1 Tahun	5 Tahun	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian	Dinas Koperindag
		3 Mengembangkan industri berbasis sumber daya (resource-based industries) terutama pertanian, pariwisata, pertambangan, kehutanan dan kelautan serta perikanan	Tercapainya Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	0	4 Tahun	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Bappeda
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	0	4 Tahun	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Bappeda
			Meningkatnya peranserta masyarakat untuk tercapainya peningkatan PAD	0	4	Program pengembangan kemitraan	Pariwisata	Dinas Koperindag
			Meningkatnya capaian PAD	1	5	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pariwisata	Dinas Koperindag

		4 Meningkatkan ketersediaan data dan sinergitas perencanaan pembangunan ekonomi	Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 tahun	5 tahun	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA dan Sekretariat Daerah
			Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1 tahun	4 tahun	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Review Kawasan hutan Lindung	0	1 tahun	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Tersusunnya Masterplan Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten Bengkulu Selatan	0	1 Dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Tercapainya Penyusunan Dokumen Pengembangan Kawasan Pusat jajanan Rakyat di Kabupaten Bengkulu Selatan	0	1 Dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Tersusun dan Terhimpunnya Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Kali	1 Kali	Pengembangan Data/Informasi	Perencanaan Pembangunan	Bagian Adm. Pembangunan Setda B/S
			Terlaksananya Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Penunjang Pembuatan Perizinan	0 Tahun	4 Tahun	Program Pengembangan Data/Informasi	Perencanaan Pembangunan	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
			Tersusunnya data informasi pembangunan ekonomi daerah dalam bentuk dokumen PDRB	1 dokumen	4 dokumen	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Statistik	BAPPEDA
			Terlaksananya Pengumpulan data	0	4 Kegiatan	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Statistik	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Terlaksananya Pengklasifikasikan data	0	4 Kegiatan	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Statistik	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Terlaksananya Penyusunan sistem katalog data	0	4 Kegiatan	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Statistik	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

			Terlaksananya Pengadaan sarana penyimpanan data	0	4 Kegiatan	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Statistik	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Terlaksananya Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan	0	4 Kegiatan	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Statistik	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Terlaksananya Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	0	4 Kegiatan	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Statistik	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Terlaksananya Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	0	4 Kegiatan	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Statistik	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Terlaksananya Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	0	4 Kegiatan	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Statistik	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	0	4 Kegiatan	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Statistik	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	0	4 Kegiatan	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Statistik	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
		2	Meningkatkan dan memberdayakan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi sebagai pelaku ekonomi yang berdaya saing tinggi					
			Arah Kebijakan :					
		1	Meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk-produk UMKM dan koperasi	1 Tahun	5 Tahun	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian	Dinas Koperindag
						Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperindag
			Terbentuknya koperasi PNS dilingkup Kab. B/S	0	4 Tahun	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sekretariat DP Korpri

		2	Meningkatkan akses permodalan dan pemasaran produk-produk UMKM dan koperasi	Terpatauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1 Tahun	5 Tahun	Program Pengembangan Sistem Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperindag
				Terciptanya Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	1 Tahun	5 Tahun	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperindag
				Terciptanya Fasilitas Pengembangan sarana promosi hasil produksi	1 Tahun	5 Tahun	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperindag
		3	Menjamin ketersediaan bantuan teknis, manajemen dan teknologi tepat guna bagi UMKM dan koperasi	TerSosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	1 Tahun	5 Tahun	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperindag
				Terciptanya monitoring, evaluasi dan pelaporan		4 Tahun	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperindag
				Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna di Perdesaan	0	8 Kecamatan	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	BPMD
		3	Optimalisasi kebijakan revitalisasi pertanian, kelautan dan perikanan						
			Arah Kebijakan :						
		1	Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan	Tersedianya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis, berkurangnya hama babi, meningkatnya motivasi petani dalam pengendalian OPT	1 tahun	5 tahun	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	Dinas Pertanian
				Terdidiknya petugas dan petani melalui pelatihan (magang) perbengkelan alsintan	1 tahun	5 tahun	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	Dinas Pertanian
				Terlatihnya petani dalam penggunaan pupuk berimbang	1 tahun	5 tahun	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	Dinas Pertanian

			Tersedianya dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis, akan terbentuk 200 KPA yang terampil dan memiliki pengetahuan imtek	1 tahun	5 tahun	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	Dinas Pertanian
			Lomba UPJA berprestasi	1 tahun	5 tahun	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	Dinas Pertanian
			Terlaksananya pelatihan petani dan pelaku agribisnis	1 x	5 x	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	BP4K
			Terwujudnya Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	1 tahun	5 tahun	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	BP4K
			Terwujudnya Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	0	25 x	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	BP4K
			Terfasilitasinya modal usaha masyarakat pesisir	0	16 kelompok	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		2 Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan	Terlaksananya Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	0	25 kali	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	BP4K
			Tersusunnya dokumen potensi dan Kendala Peternakan hewan ternak unggulan	0	1 Dokumen	Program Perencanaan Bidang ekonomi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Tersusunnya dokumen potensi komoditi perkebunan Kabupaten Bengkulu Selatan	0	1 Dokumen	Program Perencanaan Bidang ekonomi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Tersusunnya dokumen potensi komoditi tanaman pangan Kabupaten Bengkulu Selatan	0	1 Dokumen	Program Perencanaan Bidang ekonomi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Tercapainya Penyusunan Laporan dan Evaluasi Tenaga Penyuluh Kabupaten Bengkulu Selatan	0	1 dokumen	Program Perencanaan Bidang ekonomi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Tersusunnya dokumen diversifikasi makanan pokok Kabupaten Bengkulu Selatan	0	1 Dokumen	Program Perencanaan Bidang ekonomi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda

						Program Peningkatan Produksi Peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian	
			Terwujudnya reboisasi di daerah pesisir, terciptanya wilayah pantai yang bersih, Tersedianya sarana air bersih untuk nelayan.	0,0,0	4 paket, 4 paket, 4 paket	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya sarana dan prasarana budidaya perikanan. Tersedianya Pakan ikan, tersedianya benih ikan sidat, tersedianya KJA, terbaharuinya stok ikan di PU	10 paket, 5 ton,0,0,0	50 paket, 25 Ton, 20 paket, 12 paket, 40.000 ekor	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersusunnya dokumen Prospek dan Kendala Perikanan Darat	0	1 Dokumen	Program Perencanaan Bidang ekonomi	Kelautan dan Perikanan	Bappeda	
			Tercapainya Penyusunan Masterplan kawasan Minapolitan di kabupaten Bengkulu Selatan	0	1 Dokumen	Program Perencanaan Bidang ekonomi	Kelautan dan Perikanan	Bappeda	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Perikanan yang meliputi : (a) Terbaharuinya stok ikan di perairan umum, (b) Tersedianya induk ikan unggul, (c) Tersedianya keramba jaring apung, (d) Tersedianya Pakan dan Pupuk, (e) Tersedianya UPR, (f) Tersedianya benih ikan sidat, (g) Pembangunan BBI Pematang Gambir	1 Tahun	1 Tahun	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3	Meningkatkan permodalan dan pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan	Terlaksananya pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian	15%	80%	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Pertanian	Bagian Adm. Perekonomian Setda B/S
				Terlaksananya promosi atas hasil produksi pertanian, perikanan dan perkebunan unggul daerah	0	4 x	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	Pertanian	BP4K

						Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian	
			Terlaksananya kegiatan pengolahan dan pemasaran, Tersedianya alat pengolahan ikan, tersedianya informasi pemasaran, tersosialisasinya perizinan usaha, terlaksananya gerakan makan ikan, terlaksananya perlombaan menu ikan.	1 paket	6 paket , 4 paket, 4 paket, 4 paket,4 paket	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		4	Meningkatkan teknologi, sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	1 tahun	5 tahun	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian
				terlaksananya bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	1 tahun	5 tahun	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian
				Tesedianya dana penyediaan sarana dan prasarana pertanian	1 tahun	5 tahun	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian
				Tersedianya Penyediaan traktor roda 4	1 tahun	5 tahun	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian
				Penyediaan mesin pompa air	1 tahun	5 tahun	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian
				Penyediaan unit pengolah pupuk organik	1 tahun	5 tahun	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian
				Penyediaan mesin rumput	1 tahun	5 tahun	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian
				Tersedianya Pengembangan agribisnis peternakan	1 tahun	5 tahun	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian
				Terlaksananya penyuluhan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna	300 org	3000 org	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	BP4K

			Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	15 buku	75 buku	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	BP4K	
			Terlaksananya pengembangan IB, Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan hasil dan limbah peternakan	1 tahun	5 tahun	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian	
			Tersedianya mesin pencacah pakan ternak	1 tahun	5 tahun	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian	
			Meningkatnya SDM nelayan, terlaksananya study kelayakan dermaga dan break water, terlaksananya pembangunan break water dan dermaga, peningkatan sarana dan prasaran perikanan tangkap	10 orang, 0,0, 1 paket	60 orang, 1 paket, 3 paket, 40 paket	Program Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		5	Meningkatkan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan berkelanjutan	Tersedianya data base potensi produk pangan.- Terlaksananya peningkatan produksi dan produktivitas dan mutu produk pertanian	1 tahun	5 tahun	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian
			Tersedianya alsintan perontok padi	1 tahun	5 tahun	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian	
			Tersedianya alsintan pemipil jagung	1 tahun	5 tahun	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian	
			Tersedianya alsintan penggilingan padi	1 tahun	5 tahun	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian	
			Tersedianya Pengembangan sistem informasi pasar diperolehnya	1 tahun	5 tahun	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian	
			Tercapainya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian	1 tahun	5 tahun	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian	
			Tersedianya Peningkatan produksi , produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	1 tahun	5 tahun	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian	

			Tersedianya pelaporan statistik pertanian tanaman pangan, tersedianya informasi harga komoditi tanaman pangan	1 tahun	5 tahun	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian
			Terlaksananya koordinasi kebijakan perberasan	20%	80%	Peningkatan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkebunan	Pertanian	Bagian Adm. Perekonomian Setda B/S
			Meningkatnya pemanfaatan pekarangan masyarakat melalui : (a) pemberdayaan KWT P2KPG (b) Meningkatkan skor PPH	(a) 5 KWT P2KPG, (b) PPH 68,7	(a) 55 KWT P2KPG, (b) PPH 95,0	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Pertanian	Kantor Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian
			Meningkatnya jumlah desa yang mandiri pangan.	11 Desa Mandiri Pangan (DMP)	4 Desa Mandiri Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Pertanian	Kantor Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian
			Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan Masyarakat	0%	11 kecamatan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Pertanian	Kantor Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian
			Meningkatnya Lumbung Pangan Desa	10 Lumbung Pangan	28 lumbung pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Pertanian	Kantor Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian
			Meningkatnya Peran Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.	2 kali Rapat Dewan Ketahanan Pangan	4 kali rapat DKP	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Pertanian	Kantor Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian
						Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	BP4K dan Dinas Pertanian
		6	Meningkatkan pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan serta kelautan dan perikanan			Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan dan Pangan	Pertanian	BP4K
			Terlaksananya Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan	1 tahun	5 tahun	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan dan Pangan	Pertanian	BP4K

			Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian / perkebunan	102 buku	510 buah	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan dan Pangan	Pertanian	BP4K	
			Terwujudnya Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	0	5 tahun	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan dan Pangan	Pertanian	BP4K	
			Terlaksananya Kajian sistem penyuluhan perikanan	0	3 tahun	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	BP4K	
			Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan	0	5 paket	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM	
			Terlaksananya upaya rehabilitasi sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan	0	5 paket	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM	
			Terlaksananya Upaya penyuluhan kegiatan RHL	0	5 kegiatan	Program Penyuluhan Kegiatan RHL dan KTA	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM	
			Terlaksananya upaya penyuluhan Kegiatan KTA	0	5 kegiatan	Program Penyuluhan Kegiatan RHL dan KTA	Kehutanan	Kehutanan dan ESDM	
		7	Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Terpenuhinya Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	1 tahun	5 tahun	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pertanian	Dinas Pertanian
		8	Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya	Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan, terlaksananya operasional pengawasan	0,0	4 paket, 4 paket	Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Tesosialisasinya UU Perikanan, tersusunnya Draf Perda Terumbu Karang, Tersosialisasinya Perda Terumbu Karang, terlaksananya Evaluasi perda Terumbu Karang.	3 kali,0,0,0	18 kali,1 Paket,2 paket, 2 paket	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	

		4	Peningkatan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/keberpihakan						
			Arah Kebijakan :						
		1	Menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	0	4 Tahun	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
				Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dana DAK, dan DAU	1 tahun	4 Tahun	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
				Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dana DAK dan TP	1	4 tahun	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
				Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Masterplan Pariwisata	0	1 Dokumen	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
				Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial	0	1 Tahun	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
		2	Meningkatkan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penanggulangan Kemiskinan	1 Tahun	5 Tahun	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
				Tercapainya Penyusunan Dokumen Rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	1 dokumen	1 dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
				Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	0	1 tahun	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
				Tercapainya Penyusunan Dokumen Rencana aksi pengembangan ekonomi daerah kabupaten Bengkulu selatan	0	1 Dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda

			Terlaksananya monitoring dan evaluasi Rencana aksi pengembangan ekonomi daerah kabupaten bengkulu selatan	0	1 Tahun	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			Tercapainya Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap	0	1 Tahun	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda/KPTSP
			Tersusunnya dokumen evaluasi data induk SKPD di bidang perencanaan ekonomi	0	1 Dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Tersusunnya Dokumen evaluasi Sektor Unggulan dalam Upaya Peningkatan Pembangunan ekonomi	0	1 dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Terlaksananya Monitoring dan pelaporan dana TP	0	4 Tahun	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Adanya data informasi capaian target pembangunan daerah dalam bentuk Bengkulu Selatan Dalam Angka	1 tahun	1 Tahun	Program Pengembangan Data / Informasi	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
		5	Mengembangkan pusat-pusat ekonomi dan kewirausahaan masyarakat serta peningkatan kualitas tenaga kerja Arah Kebijakan :					
		1	Menumbuh kembangkan pusat-pusat ekonomi lokal	1 Paket	5 Paket	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Transmigrasi	Dinas Sosnakertrans
			Meningkatnya Kesejahteraan Transmigrasi dan Masyarakat Sekitar	1 Paket	5 Paket	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Transmigrasi	Dinas Sosnakertrans
			Tersedianya Tenaga Penyuluh	1 Paket	4 Paket	Program Transmigrasi Lokal	Transmigrasi	Dinas Sosnakertrans
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana pemukiman Transmigrasi	1 Paket	4 Paket	Program Transmigrasi Lokal	Transmigrasi	Dinas Sosnakertrans

			Tersedianya Calon Lokasi Untuk di RTSP	1 Paket	4 Paket	Program Transmigrasi Lokal	Transmigrasi	Dinas Sosnakertrans
			Tersedianya lokasi Trans yang layak huni	0	4 Paket	Program Transmigrasi Lokal	Transmigrasi	Dinas Sosnakertrans
			Terlaksananya Pelatihan	1 Kegiatan	4 Kegiatan	Program Transmigrasi Lokal	Transmigrasi	Dinas Sosnakertrans
						Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
		2	Mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Keluarga			Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Perdagangan	Dinas Koperindag
		3	Optimalisasi peran latihan kerja dalam mencetak wirausahawan baru	1 Dokumen	5 Dokumen	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Sosnakertrans
			Tersedianya Peralatan Pelatihan dan Pendidikan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	0	5 Kegiatan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Sosnakertrans
			Tersedianya Peralatan Pelatihan dan Pendidikan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	1 Kegiatan	5 Kegiatan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Sosnakertrans
			Tersedianya Jumlah Tenaga Kerja yang disertifikasi	1 Kegiatan	4 Kegiatan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Sosnakertrans
			Terlaksananya Rehabilitasi Gedung LLK	0	4 Paket	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Sosnakertrans
			Tersedianya Dokumen Monev dan Laporan LPK	1 Kegiatan	5 Kegiatan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Sosnakertrans
		4	Meningkatkan pengawasan, perlindungan dan keselamatan tenaga kerja	1 Kegiatan	5 Kegiatan	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Dinas Sosnakertrans

			Terlaksananya peraturan Ketenagakerjaan diperusahaan	0	4 Paket	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Dinas Sosnakertrans	
			Terbantunya Pekerja dan Pengusaha	0	4 Kegiatan	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Dinas Sosnakertrans	
			Tersedianya Jamsostek pada perusahaan-perusahaan	0	4 Kegiatan	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Dinas Sosnakertrans	
			Tersedianya Laporan Bulanan dan Monev Kegiatan d bidang HI	0	4 Tahun	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Dinas Sosnakertrans	
		5	Peningkatan kesempatan, Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja	Tersedianya Dokumen IPK	1 Tahun	5 Tahun	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Sosnakertrans
			Tersedianya Dokumen IPK	1 Tahun	5 Tahun	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Sosnakertrans	
			Jumlah Tenaga Kerja pada PK infrastruktur berupa jalan desa dan sentra pertanian	1 Paket	5 Paket	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Sosnakertrans	
			Jumlah Tenaga Kerja pada PK produktif berupa pembuatan kolam, pakan ternak dan kompos	0	5 Paket	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Sosnakertrans	
			Pelatihan dan Bantuan alat-alat TTG	0	5 Kegiatan	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Sosnakertrans	
			Pelatihan Kewirausahaan bagi calon pengusaha dan usaha mikro	0	5 Kegiatan	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Sosnakertrans	
			Pelatihan dan pemagangan ketrampilan	0	5 Paket	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Sosnakertrans	
		6	Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial						

		Arah Kebijakan :						
		1 Meningkatkan kualitas kebijakan. Manajemen dan kelembagaan pelayanan sosial				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosnakertrans
			Terlaksannya Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	0	4 tahun	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	BAPPEDA
			Terlatihnya keterampilan kerja bagi anak terlantar anak jalanan anak cacat dan anak nakal	0	4 Kegiatan	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosnakertrans
			Terbantunya PMKS di trauma centre	0	4 Kegiatan	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan / Sosnakertrans
			Terbantunya dalam memperoleh kemudahan informasi	0	4 Kegiatan	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan / Sosnakertrans
			Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana	0	1 Paket, 3 Kegiatan	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan / Sosnakertrans
			Tertanganinya masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	1 Paket	5 Paket	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan / Sosnakertrans
			Terlaksananya Monit. eval, Pelap Keg Progr plyanan dan Rehab. Kesjt Sosial	0	5 Kali Kegiatan	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan / Sosnakertrans
			Meningkatnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha	0	2 kegiatan	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosnakertrans
			Meningkatnya jarring kerjasama pelaku-pelaku UKS masyarakat	0	4 kegiatan	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosnakertrans

			Meningkatnya kualitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat	1 Kegiatan	4 Kegiatan	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosnakertrans
			Terlatihnya keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	1 Kegiatan	4 Kegiatan	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Sosial	Dinas Sosnakertrans
			Terbantunya eks penyandang penyakit sosial	0	4 Paket	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Sosial	Dinas Sosnakertrans
			Meningkatnya keterampilan berusaha eks penyandang penyakit sosial	0	1 kegiatan	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Sosial	BNK
		2	Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan kesejahteraan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan fakir miskin		5 Kegiatan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial	Dinas Sosnakertrans
			Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin	0 Tahun	4 Tahun	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan /Sosnakertrans
			Tersedianya fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin	0	4 Kegiatan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial	Sosnakertrans
			Tersedianya sarana dan prasarana pendukung bagi keluarga miskin	0	4 Kegiatan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial	Sosnakertrans

			Terlatihnya keterampilan bagi PMKS	0	4 Kegiatan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial	Sosnakertrans
			Terlaksananya monitoring penyaluran raskin	100%	100%	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Sosial	Bagian Adm. Perekonomian Setda B/S
			Terdatanya penyandang cacat dan penyakit jiwa	0	3 Kegiatan	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Sosial	Sosnakertrans
			Tersedianya sarana dan prasarana para Penyandang Cacat dan Trauma	0	4 Paket	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Sosial	Sosnakertrans
			Terlaksananya diklat bagi Penyandang Cacat dan Trauma	0	5 Kegiatan	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Sosial	Sosnakertrans
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	1 Paket	5 Paket	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Sosial	Sosnakertrans
			Terlaksananya rehabilitasi sedang /berat bangunan panti asuhan/jompo	0	4 Paket	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Sosial	Sosnakertrans
			Terlaksananya Kegiatan Operasional, sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	1 Paket	5 Paket	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Sosial	Sosnakertrans
			Terlaksananya sosialisasi fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin	0 Tahun	4 Tahun	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Sosial	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
			Terlaksananya kegiatan pelatihan keterampilan bagi penyandanga masalah kesejahteraan sosial	0 Tahun	4 Tahun	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Sosial	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
			Terlaksananya pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	0 Tahun	4 Tahun	Program pembinaan anak terlantar	Sosial	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan

			Terlaksananya kegiatan Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar	0 Tahun	4 Tahun	Program pembinaan anak terlantar	Sosial	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
			Terlaksananya penyaluran dana bantuan kepada KUBE anak terlantar	0 Tahun	5 Tahun	Program pembinaan anak terlantar	Sosial	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
			Terlaksananya Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	0 Tahun	4 Tahun	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
			Terlaksananya Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	0 Tahun	4 Tahun	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
			Terlatihnya keterampilan bagi keluarga miskin	0	4 Kegiatan	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
			Tersedianya fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin	0	4 Kegiatan	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
			Tersedianya sarana dan prasarana pendukung bagi keluarga miskin	0	4 Kegiatan	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
			Terlatihnya keterampilan bagi PMKS	0	4 Kegiatan	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
			Terlatihnya keterampilan bagi anak terlantar	1 Kegiatan	5 Kegiatan	Program pembinaan anak terlantar	Sosial	Dinas Sosnakertrans
			Terdatanya penyandang cacat dan penyakit Jiwa	0	3 Kegiatan	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Sosial	Dinas Sosnakertrans
			Tersedianya sarana dan prasarana para Penyandang Cacat dan Trauma	0	4 Paket	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Sosial	Dinas Sosnakertrans
			Terlaksananya diklat bagi Penyandang Cacat dan Trauma	0	5 Kegiatan	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Sosial	Dinas Sosnakertrans

		7	Optimalisasi pengelolaan investasi					
			Arah Kebijakan :					
		1	Meningkatkan promosi investasi yang berdimensi lokal, regional, nasional dan internasional			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal Daerah	Dinas Koperindag dan Sekretariat Daerah (Bag. Ekonomi)
			Terwujudnya kerjasama di bidang penanaman modal dengan berbagai pemerintah daerah dan swasta	10%	70%	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal Daerah	Bagian Adm. Perekonomian Setda B/S
			Terbina dan terpantaunya pelaksanaan penanaman modal dengan baik	20%	90%	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal Daerah	Bagian Adm. Perekonomian Setda B/S
			Tersedianya peralatan teknologi informasi (ICT)	0 TAHUN	4 TAHUN	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal Daerah	KPTSP
			Tersedianya pengolah data dan pemeriksa lapangan	0 TAHUN	4 TAHUN	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal Daerah	KPTSP
			Adanya identifikasi izin usaha	0 TAHUN	4 TAHUN	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal Daerah	KPTSP
			Tersedianya penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	0 TAHUN	4 TAHUN	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal Daerah	KPTSP
			Adanya pemrosesan perizinan	0 TAHUN	4 TAHUN	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal Daerah	KPTSP
			Tersedianya sosialisasi pelayanan perizinan	0 TAHUN	4 TAHUN	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal Daerah	KPTSP
			Adanya monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan	0 TAHUN	4 TAHUN	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal Daerah	KPTSP
			Terlaksananya Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	0 TAHUN	4 TAHUN	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal Daerah	KTSP

			Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	0 TAHUN	4 TAHUN	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal Daerah	KTSP
			Terlaksananya Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	0 TAHUN	4 TAHUN	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal Daerah	KTSP
			Terlaksananya Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	0 TAHUN	4 TAHUN	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal Daerah	KTSP
			Terlaksananya Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	0 TAHUN	4 TAHUN	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal Daerah	KTSP
			Terlaksananya Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	0 TAHUN	4 TAHUN	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal Daerah	KTSP
			Terlaksananya Kajian Kebijakan penanaman modal	0 TAHUN	4 TAHUN	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal Daerah	KTSP
			Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0 TAHUN	4 TAHUN	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal Daerah	KTSP
			Terlaksananya Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	0 TAHUN	4 TAHUN	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah		KTSP
		2	Meningkatkan dan memperbanyak sumber, jenis dan nilai investasi baik dalam negeri maupun luar negeri	20%	90%	Terwujudnya promosi peluang investasi daerah	Penanaman Modal Daerah	Bagian Adm. Perekonomian Setda B/S
				20%	90%	Terciptanya fasilitasi bagi para investor	Penanaman Modal Daerah	Bagian Adm. Perekonomian Setda B/S
				0%	100%	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Penanaman Modal Daerah	Bagian Adm. Perekonomian Setda B/S
		3	Debirokrasi prosedur investasi dari dalam maupun luar negeri.			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal Daerah	Dinas Koperindag, Sekretariat Daerah dan KPTSP

		4	Menjamin keamanan dan iklim bisnis yang menguntungkan				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal Daerah	Dinas Koperindag dan Sekretariat Daerah (Bag. Ekonomi)
10	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur	Strategi:							
		1	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur yang memadai						
		Arah Kebijakan:							
		1	Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi dan drainase	Terlaksananya Perencanaan Teknis Jalan	27 Dokumen	215 Dokumen	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
				Tersedianya transportasi jalan (hotmix)	5 Paket	35 paket	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
				Tersedianya transportasi jalan (lapen)	7 Paket	56 paket	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
				Tersedianya transportasi jalan (Koral)	2 Paket	86 paket	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
				Tersedianya transportasi jembatan	-	27 Paket	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
				Tersusunnya Dokumen perencanaan jalan	27 Dokumen	215 Dokumen	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
				Tersusunnya Dokumen perencanaan jembatan	16 Dokumen	32 Dokumen	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
				Terpeliharanya transportasi jalan	5 Paket	52 Paket	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
				Terpeliharanya transportasi jembatan	18 Paket	71 Paket	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas PU

			Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi	33 paket	57 paket	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	0 kegiatan	4 kegiatan	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Meningkatnya Jaringan Irigasi yang memadai	20 Paket	60 paket	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Tersedianya bangunan Jaringan Irigasi	1 paket	23 paket	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Tersusunnya perencanaan Jaringan air bersih/air minum	0 paket	3 Paket	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Terbangunnya jaringan air bersih/ air minum	7 Paket	8 Paket	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Tersusunnya perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	0 Nas	4 Nas	Program Pembangunan saluran drainase/gorong- gorong	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong	10 Paket	6 Paket	Program Pembangunan saluran drainase/gorong- gorong	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Terciptanya Saluran Drainase	0 Tahun	4 Tahun	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- gorong	Pekerjaan Umum	DKPTK
			Terpeliharanya Saluran Drainase	0 Tahun	4 Tahun	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- gorong	Pekerjaan Umum	DKPTK
			Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong	10 Paket	6 Paket	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- gorong	Pekerjaan Umum	DKPTK

						Program Pembangunan turap/talud/brojong	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Tersusunnya perencanaan pengembangan infrastruktur	0 Paket	5 paket	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Terbangunnya/Meningkatnya Infrastruktur	2 Paket	5 paket	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Terpeliharanya transportasi jalan	5 Paket	52 Paket	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Terpeliharanya Daerah Milik Jalan (DAMIJA) dalam Kota	0 Tahun	4 Tahun	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	DKPTK
			Terlaksananya Pegecatan Trotoar	0 Tahun	4 Tahun	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	DKPTK
			Terpeliharanya transportasi jembatan	18 Paket	71 Paket	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
						Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	0	5 Tahun	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			Terbangunnya reservoir pengendalian banjir	0 Paket	3 Paket	Program pengendalian banjir	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir	0 Paket	3 Paket	Program pengendalian banjir	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Tertatanya lingkungan permukiman penduduk perdesaan	0 Paket	10 Paket	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih perdesaan	0 Paket	10 Paket	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Terbangunnya pasar perdesaan	0 Paket	8 Paket	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Pekerjaan Umum	Dinas PU

			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pemakaman dengan baik	1 Paket	5 Paket	Program pengelolaan areal pemakaman	Perumahan	Dinas Sosnakertrans
		2	Meningkatkan sarana dan prasarana kebinamargaan			Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		3	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi darat	1	5	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perhubungan	Dinas Hubkominfo budpar dan Pariwisata
			Terwujudnya peningkatan pengelolaan terminal Gunung Ayu dan pengadaan atribut LLAJ	0	5	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perhubungan	Dinas Hubkominfo budpar dan Pariwisata
			Terpeliharanya Terminal Gunung Ayu	0	5	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Perhubungan	Dinas Hubkominfo budpar dan Pariwisata
			Meningkatnya pengetahuan hukum lalu lintas bagi para sopir	1	4	Program peningkatan pelayanan angkutan	Perhubungan	Dinas Hubkominfo budpar dan Pariwisata
			Bertambahnya wawasan pengetahuan antar sopir	0	4	Program peningkatan pelayanan angkutan	Perhubungan	Dinas Hubkominfo budpar dan Pariwisata
			Meningkatnya disiplin para pengendara kendaraan bermotor	1	5	Program peningkatan pelayanan angkutan	Perhubungan	Dinas Hubkominfo budpar dan Pariwisata
			Meningkatnya motivasi para sopir untuk mematuhi peraturan lalu lintas	0	4	Program peningkatan pelayanan angkutan	Perhubungan	Dinas Hubkominfo budpar dan Pariwisata
			Meningkatnya pelayanan pada penyedia jasa angkutan	0	1	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perhubungan	Dinas Hubkominfo budpar dan Pariwisata
			Meningkatnya pelayanan pada penyedia jasa angkutan	0	1	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perhubungan	Dinas Hubkominfo budpar dan Pariwisata

			Tersedianya rambu-rambu lalu lintas di jalan raya	0	2	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Perhubungan	Dinas Hubkominfo budpar dan Pariwisata
			Tersedianya marka jalan	0	2	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Perhubungan	Dinas Hubkominfo budpar dan Pariwisata
			Tersedianya pagar pengaman jalan	0	4	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Perhubungan	Dinas Hubkominfo budpar dan Pariwisata
			Tersedianya Traffic light	0	4	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Perhubungan	Dinas Hubkominfo budpar dan Pariwisata
			Tersedianya balai penguji kendaraan bermotor	0	1	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Perhubungan	Dinas Hubkominfo budpar dan Pariwisata
			Tersedianya alat penguji kendaraan bermotor	1	2	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Perhubungan	Dinas Hubkominfo budpar dan Pariwisata
			Tersedianya alat penguji kendaraan bermotor	0	2	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Perhubungan	Dinas Hubkominfo budpar dan Pariwisata
		4	Meningkatkan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perhubungan			Program perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA dan Sekretariat Daerah (Bagian Adm. Pembangunan)
		5	Mengembangkan prasarana lingkungan, air baku dan limbah	0 Paket	5 Paket	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Terselenggaranya Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penanganan Sampah Perkotaan	0	2 Tahun	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA

			Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	0	2 Tahun	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA	
			Tersedianya prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	0 Paket	11 Paket	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pekerjaan Umum	Dinas PU	
			Tersedianya prasarana dan sarana air limbah	0 Paket	5 Paket	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pekerjaan Umum	Dinas PU	
			Terfasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah	0 Paket	5 Paket	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pekerjaan Umum	Dinas PU	
			Terfasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum	0 Paket	5 Paket	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pekerjaan Umum	Dinas PU	
		6	Mengembangkan perumahan rakyat yang sesuai standar dan terjangkau	Tersusunnya penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan	0 Paket	1 dokumen	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan	Dinas PU
			Tersusunnya norma, standar, pedoman dan manual (NSPM)	0 Paket	1 dokumen	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan	Dinas PU	
			Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	0 Paket	1 Paket	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan	Dinas PU	
			Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha	0 Paket	4 Paket	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan	Dinas PU	
			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Jasa Konstruksi (Orang, Perorangan, Badan Usaha)	1 Kali	1 Kali	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Pekerjaan Umum	Bagian Adm. Pembangunan Setda B/S	
			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi	0	1 Kali	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Pekerjaan Umum	Bagian Adm. Pembangunan Setda B/S	
			Terbangunnya sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	0 Paket	5 Paket	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Pekerjaan Umum	Dinas PU	

			Tersedianya rumah bagi PNS	0	4 tahun	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Pekerjaan Umum	DP Korpri
			Terlaksananya Koordinasi Penanganan Perumahan	0	2 Tahun	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama masyarakat miskin	0 Paket	5 paket	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Perumahan	Dinas PU
			Tersusunnya kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang	0 Paket	1 Paket	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Perumahan	Dinas PU
			Terbangunnya sumur gali/MCK	7 Paket	58 Paket	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Perumahan	Dinas PU
			Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	0	4 tahun	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Perumahan	BAPPEDA
			Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bengkulu Selatan	0	4 Tahun	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Perumahan	BAPPEDA
			Terlaksananya Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian kebijakan tentang pembangunan perumahan	0 Tahun	4 Tahun	Program Lingkungan sehat Perumahan	Perumahan	DKPTK
			Terfasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	0 Paket	4 Paket	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Perumahan	Dinas PU
			Terfasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial	0 Paket	4 Paket	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Perumahan	Dinas PU
			Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	0 Paket	4 Paket	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Perumahan	Dinas PU
			Terkoordinasi perijinan pemanfaatan gedung	0 paket	4 paket	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Perumahan	Dinas PU

		7	Meningkatkan pemberdayaan dan pemerataan pembangunan sarana prasarana komunikasi dan informatika serta penyebaran informasi	Terlaksananya peraturan perundang-undangan penyiaran dan KMIp	0	4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	Dinas Hubkominfobud par dan Pariwisata dan Sekretariat Daerah
				Terlaksananya jaringan komunikasi dan informasi	0	4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	Hubkominfobud par
				Terlaksananya pengembangan sumber daya informasi	0	4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	Hubkominfobud par
				Tersedianya alat Studio	0	5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	Hubkominfobud par
				Terlaksananya pengkajian dan pengembangan sistem informasi	0	4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	Hubkominfobud par
				Terlaksananya pengembangan komunikasi	0	4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	Hubkominfobud par
				Terlaksananya kerjasama informasi dan media massa	1	5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	Hubkominfobud par
				Terlaksananya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	1	5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	Hubkominfobud par
				Terlaksananya penyuluhan bagi masyarakat	0	5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	Hubkominfobud par
				Terlaksananya penelitian bidang kominfo	0	4	Program Pengkajian dan penelitian bidang kominfo	Komimfo	Hubkominfobud par
				Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	0	5 tahun	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komimfo	BP4K
				Terlaksananya Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	0 TAHUN	4 TAHUN	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Komunikasi dan Informatika	KPTSP
				Terlaksananya Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang pelayanan perizinan	0 TAHUN	4 TAHUN	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Komunikasi dan Informatika	KPTSP

			Terlaksananya Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Pelayanan Perizinan	0 TAHUN	4 TAHUN	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Komunikasi dan Informatika	KPTSP
			Terlaksananya Fasilitas Penyelesaian Prosedur Pelayanan Perizinan	0 TAHUN	4 TAHUN	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Komunikasi dan Informatika	KPTSP
			Terlaksananya Fasilitas Penyelesaian Prosedur Pelayanan Perizinan	0 TAHUN	4 TAHUN	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Komunikasi dan Informatika	KPTSP
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0 TAHUN	4 TAHUN	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Komunikasi dan Informatika	KPTSP
			Terselenggaranya fasilitasi pengentasan bid. Kominfo	0	4	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Komunikasi dan Informatika	BudparHub
			Tersedianya data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dalam bentuk website	0	1 website	Program Pengembangan data/informasi	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			Tersusunnya profile daerah sebagai sarana promosi keunggulan daerah	0	1 kegiatan	Program Pengembangan data/informasi	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
11	Meningkatnya rata2 lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas	Strategi: 1 Perluasan dan pemerataan akses pendidikan						
		Arah Kebijakan : 1 Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan						
			Terselenggaranya Program PPAUD di Kabupaten Bengkulu Selatan	1 tahun	5 tahun	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Pendidikan	DIKPORA
			Terlaksananya Program PAUD Percontohan	1 tahun	4 tahun	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Pendidikan	DIKPORA
			Terwujudnya kesejahteraan bagi tenaga pendidik PAUD	-	4 tahun	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Pendidikan	DIKPORA
			Terwujudnya sarana dan prasarana permainan edukatif anak usia dini	-	4 kali	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Pendidikan	DIKPORA
			Terbentuknya perpustakaan khusus untuk anak usia dini	-	8 buah	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Pendidikan	DIKPORA

		Terwujudnya proses pembelajaran yang berdasarkan 16 implementasi	-	4 tahun	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Pendidikan	DIKPORA
		Terhimpunnya data anak usia dini yang valid	-	4 dokumen	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Pendidikan	DIKPORA
		Terjalannya hubungan kerjasama antar sektor nasional dan internasional	-	8 kali	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Pendidikan	DIKPORA
		Terwujudnya tujuan program pendidikan anak usia dini	-	4 dokumen	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Pendidikan	DIKPORA
		Masyarakat lebih memahami arti pentingnya pendidikan anak usia dini	-	24 kali	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Pendidikan	DIKPORA
					Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
		Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	1 Tahun		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
		Tercapainya perlengkapan pakaian olahraga	0	1 Tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Sekretariat DPKorpri
		Tersedianya beasiswa untuk anak yang berprestasi	0	4 tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Sekretariat DPKorpri
		Terselesaikannya masalah-masalah atas kejadian luar biasa	0	4tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Sekretariat DPKorpri
		Tersedianya dana operasional Block Grant Widyakrama	0	1 tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
		Tersedianya Perlengkapan Raport SD	125 sekolah	125 sekolah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
		Tersedianya BOS SD/SDLB dan SMP/SMPLB	156 sekolah	156 sekolah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
		Terlaksananya Paket B setara SMP	1 tahun	1 tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA

			Terlaksananya Monitoring evaluasi dan pelaporan dana BOS SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB	1 dokumen	1 dokumen	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Terlaksananya percepatan SMP RSBI dalam Penerapan pembelajaran berbasis ICT dan Bilingual	1 sekolah/ tahun	1 sekolah/ tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Terlaksananya Olimpiade MIPA SD/MI	1 tahun	5 tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Terlaksananya UAS SD/MI	1 tahun	5 tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Terlaksananya Ujian Akhir Sekolah (UAS)/Ujian Nasional (UN) SMP/MTs	1 tahun	5 tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Tersedianya Perlengkapan Sekolah SMP (Raport SMP)	36 sekolah	36 sekolah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP/MTs	1 tahun	5 tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Terlaksananya Olimpiade Olahraga dan Seni Nasional (O2SN) SMP	1 tahun	5 tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Terlaksananya Pemberian Beasiswa Kepada Siswa SD/SMP	1 tahun	5 tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Tersedianya Sarana Penunjang Peningkatan Mutu Pendidikan (Paket I)	1 Tahun	5 tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Tersedianya Sarana Penunjang Peningkatan Mutu Pendidikan (Paket II)	1 Tahun	5 tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Tersedianya Gedung Sekolah Baru	285	25 buah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Tersedianya rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	189	25 buah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA

			tersedianya sarana dan prasarana olahraga SD dan SMP	28	25 buah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Tersedianya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	28	25 buah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Tersedianya ruang unit kesehatan sekolah	45	25 buah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Tersedianya ruang ibadah	9	25 buah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Tersedianya perpustakaan sekolah	118 buah	25 buah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Tersedianya jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	90 buah	50 buah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	118	10 paket	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	0	25 buah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	0	25 buah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah	0	25 buah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Terlaksananya Rehabilitasi sedang/bert bangunan sekolah	120	25 buah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	263	25 buah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	53	25 buah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	25	25 buah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA

			Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah	45	25 buah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah sekolah	118	25 buah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Tersedianya tenaga pendidik yang mempunyai kompetensi	0	5 tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Tersedianya tenaga penyusun kurikulum pada tiap satuan pendidikan	0	5 tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Tersedianya ruang kelas baru SMP	0	25 buah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Tersedianya dana pengembangan sekolah untuk SD dan SMP	0	165 sekolah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Terlaksananya Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	0	25 sekolah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Tersedianya comprehensive teacing and learning (CTL)	0	5 tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Terlaksananya Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	0	5 tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Terselenggaranya akreditasi sekolah dasar	0	5 tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Terselenggaranya Monitoring evaluasi dan pelaporan	1	5 tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA
			Tersedianya gedung sekolah	214 Unit	215 Unit	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	DIKPORA
			Tersedianya perpustakaan sekolah	13 Unit	14 Unit	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	DIKPORA
			Tersedianya ruang kelas sekolah	84 RKS	88 RKS	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	DIKPORA

		Tersedianya laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)	13 Unit	14 Unit	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	DIKPORA
		Tersedianyan perlengkapan sekolah	0 Tahun	5 Tahun	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	DIKPORA
		Terpeliharanya bangunan sekolah	0	1 Unit	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	DIKPORA
		Terpeliharanya ruang kelas sekolah	0	3 RKS	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	DIKPORA
		Terlaksananya Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	0	2 kali	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	DIKPORA
		Tersedianya Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	0	3 kali	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	DIKPORA
		Terselenggaranya paket C setara SMU	0	5 tahun	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	DIKPORA
		Terlaksananya Olimpiade olahraga SLTA	0	5 tahun	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	DIKPORA
		Terlaksananya Pelatihan penyusunan kurikulum	0	5 tahun	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	DIKPORA
		Terlaksananya Penyelenggaraan UN/US SMA/SMK dan MA	0	5 tahun	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	DIKPORA
		Pembinaan minat, bakat dan kratifitas siswa tingkat menengah	0	5 tahun	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	DIKPORA
		Terlaksananya Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	0	1 Kali	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	DIKPORA
		Terlaksananya Pra Olimpiade Saind SLTA	0	5 Tahun	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	DIKPORA

		2	Menambah dan meningkatkan pusat-pusat pembelajaran dan pelatihan untuk masyarakat	Terlaksananya Penyusunan Program Pendidikan Non Formal		4 TAHUN	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	DIKPORA
				Terciptanya Tenaga Pendidik PNF Yang Berkualitas		4 tahun	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	DIKPORA
				Terlaksananya Pendidikan Non Formal yang Diinginkan		4 TAHUN	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	DIKPORA
				Tercapainya Warga Belajar Yang terampil dan Berwawasan Pendidikan		4 TAHUN	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	DIKPORA
				Untuk Meningkatkan Pengetahuan Warga Belajar Tentang Keaksaraan		4 TAHUN	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	DIKPORA
				Untuk Meningkatkan Kecakapan Hidup Setiap Warga Belajar		4 TAHUN	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	DIKPORA
				Untuk Menunjang Kegiatan Belajar Mengajar PNF		4 TAHUN	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	DIKPORA
				Agar Masyarakat Luas Lebih Memahami Tentang Pendidikan Non Formal		4 TAHUN	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	DIKPORA
				Agar Tercapainya Tujuan Pendidikan Non Formal		4 TAHUN	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	DIKPORA
				Untuk Meningkatkan Pemahaman Guru Mengenai Materi dan Model Pembelajaran PNF	1 tahun	5 tahun	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	DIKPORA
				Memberikan Jaminan Mutu Kepada Masyarakat Terhadap PNF		4 TAHUN	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	DIKPORA
				Agar Terwujudnya Tujuan PNF Yang Diinginkan		4 TAHUN	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	DIKPORA
				Agar Masyarakat Luas Mengerti dan Memahami Tentang PNF		4 TAHUN	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	DIKPORA
				Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Satuan Pendidikan		4 TAHUN	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	DIKPORA

			Agar Masyarakat Luas Bisa Mendapatkan Pendidikan Setara Dengan SD dan SLTP	2 kali	10 kali	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	DIKPORA
			Agar Masyarakat Luas Bisa Mendapatkan Pendidikan Setara Dengan SLTA	2 kali	10 kali	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	DIKPORA
			Untuk Meningkatkan Mutu PUS		4 TAHUN	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	DIKPORA
		3	Meningkatkan fungsi perpustakaan menjadi learning society			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pendidikan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, DIKPORA
			Terlaksananya Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	0	5 Kegiatan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pendidikan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Terlaksananya Pengembangan minat dan budaya baca	0	5 Kegiatan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pendidikan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Terlaksananya Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	0	5 Kegiatan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pendidikan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepastakaan	0	4 Kegiatan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pendidikan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Terlaksananya bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	0	4 Kegiatan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pendidikan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Terlaksananya Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	0	5 Kegiatan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pendidikan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Tersedianya bahan pustaka perpustakaan umum daerah	1 Kegiatan	6 Kegiatan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pendidikan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0	5 Kegiatan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pendidikan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

			Terlaksananya Perpustakaan Keliling	0	5 Kegiatan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pendidikan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Terlaksananya Pengadaan sarana pengelolaan data perpustakaan umum daerah dan perpustakaan desa	0	5 Kegiatan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pendidikan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
12	Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas	Strategi:						
		1 Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan						
		Arah Kebijakan :						
		1 Meningkatkan kualitas pendidikan				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	DIKPORA
			Tercapainya Koordinasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	0	4 tahun	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Bappeda
			Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah	0	4 tahun	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Bappeda
		2 Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	DIKPORA
		3 Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	DIKPORA
13	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah, Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun serta Menurunnya disparitas dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan dan masyarakat.	Strategi:						
		1 Pembangunan sarana dan pasarana serta peningkatan mutu pendidik						
		Arah Kebijakan :						
		1 Menetapkan wajib belajar 9 tahun dan menerapkan jam wajib belajar bagi anak usia sekolah				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA

			Tercapainya koordinasi wajib belajar 9 tahun dan menerapkan jam wajib belajar bagi anak usia sekolah	0	4 tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA, BAPPEDA	
		2	Mendukung pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi(KBK) dan relevan dengan kebutuhan daerah			Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	DIKPORA	
		3	Meningkatkan akses pembelajaran melalui teknologi informatika			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DIKPORA	
						Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	DIKPORA	
		4	Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembaga pendidikan perguruan tinggi			Program Pendidikan Tinggi	Pendidikan	BAPPEDA dan DIKPORA	
14	Meningkatnya umur harapan hidup, Menurunnya angka kematian ibu dan bayi, Menurunnya prevalensi kekurangan gizi	Strategi:							
		1	Perluasan dan pemerataan akses kesehatan						
		Arah Kebijakan :							
		1	Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana kesehatan	Terlaksananya pembangunan puskesmas baru	14 PKM	4 PKM	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Pembantu	41 Pustu	3 Pustu	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Terpenuhinya kebutuhan Kendaraan Puskesmas Keliling	17 unit	6 unit	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan

			terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai	14 PKM	7 PKM	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terpenuhinya sarana dan prasarana Pustu	41 Pustu	3 Pustu	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			terpenuhinya sarana dan prasarana Pusling	17 unit	4 Unit	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap	4 PKM	2 PKM	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya peningkatan pustu menjadi puskesmas induk	14 PKM	1 PKM	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana Puskesmas	14 PKM	40 PKM	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu	41 Pustu	34 Pustu	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan

			Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana Puskesmas Keliling	17 Unit	14 Unit	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap	4 PKM	4 PKM	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas	14 PKM	2 PKM	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya rehab Puskesmas Pembantu	41 Pustu	11 Pustu	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya Monitoring evaluasi pelayanan kesehatan di puskesmas dan pustu	1 Kegiatan	4 Kegiatan	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terpenuhinya Rumah Dinas Dokter/Perawat/Bidan Yang Dibangun	67 Buah	28 Buah	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terpenuhinya Alat Medis dan Non Medis Puskesmas + Pustu + Poskesdes	14 PKM	5 PKM	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan

			Tersedianya rumah dinas dokter/ perawat / bidan	0 unit	6 unit	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya		RSUD HD
			Tersedianya Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP)	0 unit	7 unit	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Kesehatan	RSUD HD
			Tersedianya Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit	8 unit	9 unit	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Kesehatan	RSUD HD
			Pengadaan alat-alat rumah sakit	1 tahun	5 tahun	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Kesehatan	RSUD HD
			Terlaksananya Rehabilitasi bangunan rumah sakit	1 unit	1 unit	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Kesehatan	RSUD HD
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 tahun	5 tahun	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Kesehatan	RSUD HD
			Strategi:					
			1 Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan					
			Arah Kebijakan :					
			1 Memperbanyak dan pemerataan penempatan dokter umum dan spesialis serta tenaga medis			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian	BKD, Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah

	2	Meningkatkan pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin	Terlaksananya Pelayanan Operasi Katarak	0 Penderita	160 Penderita	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan THT	0 Penderita	2.400 Penderita	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Tertanganinya Penderita Bibir	0 Penderita	40 Penderita	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya Pelayanan sunatan Masal	0 Penderita	400 Penderita	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Jumlah Kasus yang tertangani	1.450 Kasus	6.376 Kasus	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terpenuhinya penanggulangan penyakit cacangan	850 Kasus	42.500 Kasus	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terpenuhinya pelayanan kesehatan kulit dan kelamin	105 Kasus	825 Kasus	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Tertanganinya kesehatan Balita yang mengalami Gizi Buruk	17 Kasus	25 kasus	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu	14 PKM dan 1 RSUD	60 PKM dan RSUD	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan jaminan pelayanan kesehatan	1 Kegiatan	4 Kegiatan	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan RSUD HD	
	3	Meningkatkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat	Terpenuhinya Kebutuhan Obat masyarakat Bengkulu Selatan	1 Tahun	5 Tahun	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Tercapainya Pemerataan obat dan perbekalan kesehatan meningkat	1 Tahun	5 Tahun	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan

			Termonitornya mutu obat RSU, Puskesmas, Apotik dan toko obat	1 Tahun	5 Tahun	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terpenuhinya Jumlah petugas yang terlatih	31 orang	164 Orang	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya Monitoring dan evaluasi program obat dan perbekalan kesehatan	124 kali	656 Kali	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya Pengambilan sampel tanaman obat untuk distandarisasi	0 Sampel	25 Sampel	Program pengembangan obat asli indonesia	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya Pertemuan dan Bintek dalam Rangka Mempromosikan Penggunaan Obat Bahan Alam	0 Kegiatan	4 Kegiatan	Program pengembangan obat asli indonesia	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Tersedianya Pelaporan Obat	1 Dokumen	4 Dokumen	Program pengembangan obat asli indonesia	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya kerjasama dengan lembaga / industri terkait dalam penelitian tanaman obat	0 Kegiatan	17 Kegiatan	Program pengembangan obat asli indonesia	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0 Kali	54 Kali	Program pengembangan obat asli indonesia	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya pertemuan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang obat dan makanan	0 Kegiatan	4 Kegiatan	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya Pertemuan pengelola industri rumah tangga pangan (IRTP) dan pengelola obat PKM & Apotek	1 kali	8 kali	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya Pengujian sampel makanan, minuman dan bahan berbahaya	3 sampel	26 sampel	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terpenuhinya Jumlah sarana yang di awasi	10 Unit	83 Unit	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	6 kali	88 kali	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kesehatan	Dinas Kesehatan

			Terlaksananya pengawasan ke toko-toko makanan hasil industri	0 kali	33 Kali	Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			terlaksananya pengawasan keamanan & kesehatan makanan Rumah tangga	0 kali	3 Kali	Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			terlaksananya pengawasan keamanan & kesehatan makanan Rumah tangga	0 kali	3 Kali	Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Terpenuhinya data yang cepat dan akurat	0 kali	2 Kali	Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Terpenuhinya Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Daftar Plafon Harga Obat (DPHO)	0 tahun	5 tahun	Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Kesehatan	RSUD HD	
		4	Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat	Tersusunnya pemetaan Informasi masyarakat kurang gizi	1 Kegiatan	4 Kegiatan	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya Pemberian Vitamin A dan Fe	16.342 orang	83.427 orang	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Terlaksananya perawatan Balita Gizi buruk	8 Orang	45 orang	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Tercapainya Peningkatan keluarga sadar gizi	1.238 KK	6.321 KK	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			tertanganinya balita gizi lebih	0 Orang	928 orang	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Terlaksananya kegiatan monitoring gizi	0 kali	224 kali	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Tercapainya Jumlah Puskesmas perawatan dan RSUD memiliki tenaga yang telah dilatih tata laksana gizi buruk	1 PKM	3 PKM	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Terlaksananya Jumlah Puskesmas Non Perawatan memiliki tenaga yang telah dilatih tatalaksana gizi buruk	0 PKM	10 PKM	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan	

			Terpenuhinya sarana dan alat dapur Puskesmas perawatan yang melaksanakan tatalaksana gizi buruk	0 PKM	4 PKM	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Tercapainya Jumlah Puskesmas perawatan yang memiliki dapur gizi	0 PKM	4 PKM	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terpenuhinya kebutuhan obat untuk penderita gizi buruk	0 Kasus	30 Kasus	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya kegiatan pendampingan gizi buruk oleh kader	0 Kasus	30 Kasus	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya YanKes Penduduk Miskin	5.023 jiwa	59.704 jiwa	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Tercapainya Jumlah Desa yang mendapatkan pengobatan massal	5 Desa	20 Desa	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			tersedianya sarana yankes yang memadai	56 Poskesdes	20 Poskesdes	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya Pencegahann dan Penanggulangan Penularan Penyakit dan Wabah	1 tahun	4 tahun	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya Perbaikan Gizi Masyarakat	1 tahun	4 tahun	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Tercapainya peningkatan kinerja Pelayanan Kesehatan	1 tahun	4 tahun	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya Peningkatan kinerja Pengelolaan obat Puskesmas dan apotek	24 Kegiatan	140 Kegiatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terpenuhi Peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat	1 Paket	5 Paket	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya Pengobatan Masal di Daerah Terpencil	5 Desa	20 Desa	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	0 Tahun	4 Tahun	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan

			Terlaksananya Pemilihan nakes Teladan, Pustu/ PKM Bersih dan berprestasi	1 kali	5 kali	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya Pemilihan Pustu / PKM bersih & berprestasi	1 kali	5 kali	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya Pemilihan Nakes Teladan	1 kali	5 kali	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Tersedianya insentif dokter PKM	27 orang	225 Orang	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terpenuhinya insentif perawat jaga PKM perawatan	4 PKM	26 PKM	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya Bintek / monitoring penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di PKM	1 Kegiatan	5 Kegiatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya kegiatan penyemprotan alat dan monitoring kesling oleh tenaga Sanitarian	98 Desa	649 Desa	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi program kegiatan upaya kesehatan	1 Kegiatan	4 Kegiatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Tersediannya peralatan medis dan non medis yg memadai	56 Poskesdes	30 Poskesdes	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terpantaunya Kondisi kesehatan Calon Jemaah Haji	127 orang	550 orang	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya kegiatan P3K	45 titik	230 titik	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan usila di pusat pelayanan kelompok lansia	0 kali	29 kali	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Tercapainya Jumlah Petugas PKM / Pustu yang mendapat pelatihan Yankes Lansia	0 Petugas	69 Petugas	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terbentuknya kelompok pelayanan Kesehatan lansia di desa	0 kelompok	29 Kelompok	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Kesehatan	Dinas Kesehatan

			Tercapainya Jumlah Petugas PKM & Dinkes pengelola program Perkesmas, Batra, Indera, gigi & mulut serta kesehatan jiwa yg mendapat pelatihan	0 Petugas	112 Petugas	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya Monitoring kegiatan program upaya pelayanan kesehatan lanjut usia ke PKM	14 kali	66 Kali	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Pertanian	Kantor Ketahanan Pangan dan Dinas Kesehatan
						Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		5	Meningkatkan pengembangan pola hidup bersih dan sehat			Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	0	4 tahun	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Bappeda
			Terpenuhinya Penunjang kegiatan CWSHP	13 Desa	16 Desa	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terpenuhinya Jumlah TTU yang dipantau	0 TTU	250 TTU	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Tercapainya Jumlah TP2 yang dipantau	0 TP2	40 TP2	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Tercapainya Jumlah TPA yang diawasi	0 TPA	4 TPA	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terpenuhinya Jumlah SAB yang diawasi kualitas airnya	0 SAB	500 SAB	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Tercapainya Kelompok K3 yang dibina	0 Kelompok	22 Kelompok	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya pengawasan Depot air	0 Depot	105 Depot	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan

			Terpenuhinya Jumlah Desa yang disuluh	0 Desa	145 Desa	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Tercapainya Jumlah Pokmas yang disuluh	0 PokMas	145 Pokmas	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Tercapainya Jumlah PKM yg mendapat sosialisasi	0 PKM	56 PKM	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Tercapainya Jumlah Desa yg mendapat sosialisasi	0 Desa	145 Desa	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terpenuhinya Puskesmas yg dibina	0 PKM	56 PKM	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terpenuhinya jumlah Desa yang dibangun sarana air bersih	30 desa	28 desa	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terpenuhinya Jumlah Desa yg di advokasi	0 Desa	90 desa	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terpenuhinya Jumlah titik sampel yg diawasi	0 Titik	72 titik	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terpenuhinya Puskesmas yg memiliki <i>Waterkit Test</i>	0 PKM	14 PKM	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terpenuhinya Jumlah desa yang diberikan penyuluhan jamban sehat	20 Desa	80 desa	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terpenuhinya desa yg melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	0 Desa	80 desa	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Tercapainya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Informasi dan Promosi Kesehatan	10 Sekolah	55 Sekolah	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan RSUD HD
			Terlaksananya Pembinaan UKS penanaman konsep PHBS pada semua tatanan	10 Kali	81 Kali	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan RSUD HD
			Tercapainya peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan oleh masyarakat	0 Desa	79 Desa	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan RSUD HD

			Terlaksananya Pelatihan dan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	0 petugas	66 Petugas	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan RSUD HD	
			Terlaksananya Monev program promosi kesehatan	14 Kali	66 kali	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan RSUD HD	
			Terlaksananya Kader Posyandu	0 kader	612 Kader	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan RSUD HD	
			Terlaksananya Pembinaan Kader Posyandu	0 kader	185 Kader	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan RSUD HD	
			Tersedianya sarana dan prasarana Kader Posyandu	0 Posyandu	185 Posyandu	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan RSUD HD	
			Tercapainya Jumlah Posyandu yang memperoleh dana operasional	0 Posyandu	185 Posyandu	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan RSUD HD	
			Terlaksananya pembinaan Desa Siaga	37 Desa	126 Desa	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan RSUD HD	
			Terkoordinasinya Penilaian kota Sehat / Adipura	1 Tahun	5 Tahun	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	DKPTK	
		6	Memperbanyak dan pemeratakan fasilitas kesehatan di perdesaan dan di daerah terpencil			Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
		7	Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular	Terpenuhi jumlah lokasi yang difogging	30 lokasi	165 lokasi	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terpenuhi jumlah alat Fogging fog	3 paket	18 paket	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Tersedianya vaksin setiap antigen	150 kasus	610 kasus	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Terlaksananya Imunisasi Balita dan anak sekolah	14.576 orang	60.776 orang	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan	

			Terlaksananya penanganan Kasus pada UPTD KESEHATAN	14 PKM	80 PKM	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Terlaksananya Eliminasi kasus penyakit endemik / epidemik	9 PKM	36 PKM	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Tercapainya Desa UCI	125 Desa	715 Desa	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Terlaksananya peningkatan surveillance dan penanggulangan wabah	14 PKM & 1 RSUD	70 PKM & RSUD	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Terpenuhinya peningkatan Pemahaman masyarakat terhadap penyakit	14 PKM	56 PKM	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Terlaksananya Pelaporan tepat dan akurat	14 PKM	56 PKM	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Terlaksananya pengendalian penyakit menular dan tak menular	14 PKM	56 PKM	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Terlaksananya spesimen penyakit menular dan tak menular	14 PKM	56 PKM	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
		8	Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita	Frekuensi Penyuluhan Kesehatan Anak balita di desa	0 Desa	159 Desa	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Tercapainya cakupan Imunisasi pada anak balita	185 Balita	740 Balita	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			frekuensi Pelatihan Perawatan kesehatan anak balita	0 Kali	8 Kali	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Terlaksananya Monitoring peningkatan pencapaian dan evaluasi program kesehatan anak balita	14 kali	66 Kali	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Tercapainya Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Desa dan Puskesmas	14 PKM	66 PKM	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Kesehatan	Dinas Kesehatan	

			Terlaksananya Penyuluhan kesehatan ibu hamil di Desa	0 Desa	159 Desa	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14 PKM	66 PKM	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Tercapainya Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	2.427 orang	12.250 orang	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			terlaksananya pelatihan Tenaga kesehatan tentang kesehatan ibu dan reproduksi	3 PKM	15 PKM	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Tercapainya jumlah bidan desa yang mendapat bimbingan	0 Bidan Desa	159 Bidan Desa	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Terlaksananya Monitoring Program keselamatan ibu dan anak	14 PKM	66 PKM	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Kesehatan lansia	0	4 tahun	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	BAPPEDA	
						Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan RSUD HD	
		9	Meningkatkan standarisasi, Promosi dan kemitraan pelayanan kesehatan	Tersusunnya RKA-DPA	2 kali	10 Kali	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terlaksananya evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	0 Kegiatan	5 Kegiatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Tersedianya data yang cepat dan akurat	1 Kegiatan	5 Kegiatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Tersusunnya naskah standar pelayanan kesehatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Tersusunnya naskah standar pelayanan kesehatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	2 Kegiatan	10 Kegiatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	

			Terlaksananya Registrasi, akreditasi, sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai standar	1 Kegiatan	5 Kegiatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Terpenuhinya tenaga kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Tersosialisasinya kebijakan penggunaan sarana dan prasarana dibidang kesehatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Tersedianya kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis dengan baik	0 tahun	5 tahun	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Kesehatan	RSUD HD
15	Meningkatnya peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan	Strategi:						
		1 Peningkatan peran, potensi dan prestasi pemuda dan olahraga	Terdatanya Potensi Kepemudaan	-	11 kecamatan	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA
		Arah Kebijakan :						
		1 Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan di segala bidang	Terbinanya organisasi kepemudaan	-	44 Organisasi	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA
			Terciptanya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	-	5 Tahun	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA
			Terlaksananya Pelatihan Paskibra	1 Tahun	5 tahun	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA
			Terseleksinya pengiriman Jambore Pemuda	1 Tahun	5 tahun	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA
			Terciptanya Lomba Usaha Kesehatan Sekolah	1 Tahun	5 tahun	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA
			Terlaksananya kegiatan Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	0 Tahun	4 Tahun	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Kemasyarakatan	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan SETDA
			Terlaksananya Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	0 Tahun	5 Tahun	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Kemasyarakatan	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan SETDA

		2	Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	-	4 Tahun	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA
				Terlaksananya Pelatihan keterampilan bagi pemuda	-	4 Tahun	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA
				Terciptanya peningkatan kesadaran masyarakat Terhadap Hardiknas	1 Tahun	5 Tahun	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA
				Terciptanya rasa solidaritas ikatan sosial di masyarakat	1 Tahun	5 Tahun	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA
		3	Melindungi segenap generasi muda dari berbagai pola hidup negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat				Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA, Sekretariat Daerah dan BNK
		4	Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga	Terciptanya peningkatan pembangunan	-	4 Tahun	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA
				Tersedianya sarana olahraga	-	4 Tahun	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA
		5	Meningkatkan pemasyarakatan, pembinaan dan prestasi olahraga	Terlaksananya identifikasi bakat dan potensi Pelajar Dalam Olahraga	-	4 Tahun	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA
				Terlaksananya identifikasi dan pengembangan olahrag Unggulan Daerah	-	4 Tahun	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA
				Tebinanya olahragawan berbakat	-	200 Orang	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA
				Terciptanya peningkatan kesehatan masyarakat	-	200 Orang	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA

			Terselenggaranya Masyarakat sehat jasmani dan rohani	1 Tahun	5 Tahun	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA
			Terpenuhinya Penghargaan Bagi insan Olahraga Yg Berdidikasi & Prestasi	-	120 Orang	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA
			Terciptanya pengembangan olahraga rekreasi	-	4 Tahun	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA
			Terbinanya olahraga yang berkembang dimasyarakat	-	14 Club	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA
			Terseleksinya atlet PORSENI tingkat SD & SMP	1 Tahun	5 Tahun	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA
			Terseleksinya Liga Pendidikan yang akan dikirim	-	196 Sekolah	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA
			Terlaksananya Pengiriman Atlet POPNAS	1 Tahun	3 Tahun	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA
			Terseleksinya atlet berprestasi ke tingkat wilayah	-	2 Tahun	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA
			Terseleksinya atlet berprestasi ke tingkat daerah	1 Tahun	2 Tahun	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA
			Terselenggaranya Lomba Senam	-	4 Tahun	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA
			Terciptanya Mutu Organisasi Olahraga	-	4 Tahun	Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA
			Terbinanya Organisasi Olahraga	-	26 Organisasi	Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga	Pemuda dan Olah Raga	DIKPORA
			Terlaksananya sosialisasi UU RI No.03 Tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional	0 Tahun	5 Tahun	Program Pengembangan kebijakan dan Manajemen olahraga	Kemasyarakatan	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan SETDA

16	Tumbuhnya iklim demokrasi yang kondusif	Strategi:						
		1 Meningkatkan peran serta dan inovasi masyarakat dalam berpolitik dan pengambilan keputusan						
		Arah Kebijakan :						
		1 Mengembangkan infrastruktur dan suprastruktur politik				Program pendidikan politik masyarakat	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Sekretariat DPRD, Kantor Kesbangpol
			Terlaksananya Program Pendidikan Politik Masyarakat	1 tahun	5 tahun	Program pendidikan politik masyarakat	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesbangpol
		2 Meningkatkan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat				Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Sekretariat DPRD, Kantor Kesbangpol
			meningkatnya wawasan kebangsaan pada masyarakat	1 tahun	5 tahun	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesbangpol
		Terlaksananya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	1 tahun	4 tahun	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesbangpol	
17	Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan daerah	Strategi:						
		1 Membangun sistem politik dan kerjasama antar pemerintah daerah sehingga mampu menciptakan stabilitas dan kemajuan daerah						
		Arah Kebijakan :						
		1 Mengoptimalkan peran politisi dan Kepala Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Tahun	5 Tahun	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Pemerintahan Umum	Sekretariat DPRD

			Terlaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi dg Pejabat Pemerintah Daerah	1 Tahun	5 Tahun	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Pemerintahan Umum	Sekretariat DPRD
			Terlaksananya Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan	1 Tahun	5 Tahun	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Pemerintahan Umum	Sekretariat DPRD
			Terlaksananya Rapat - rapat Paripurna	1 Tahun	5 Tahun	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Pemerintahan Umum	Sekretariat DPRD
			Terlaksananya Kegiatan Reses	1 Tahun	5 Tahun	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Pemerintahan Umum	Sekretariat DPRD
			Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	1 Tahun	5 Tahun	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Pemerintahan Umum	Sekretariat DPRD
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Tahun	5 Tahun	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Pemerintahan Umum	Sekretariat DPRD
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	5 Tahun	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Pemerintahan Umum	Sekretariat DPRD
						Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah
						Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah
		2	Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan	0 TAHUN	4 TAHUN	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Pemerintahan Umum	KPTSP
			Terlaksananya Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi	0 TAHUN	4 TAHUN	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Pemerintahan Umum	KPTSP
			Terciptanya kerjasama di bidang hukum	0 Dok	5 Dok	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Pemerintahan umum	Bagian hukum setda

18	Menumbuhkembangkan iklim yang harmonis dalam masyarakat	Strategi: 1 Menegakkan hukum dan keamanan Arah Kebijakan : 1 Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat						
						Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP dan Kesbangpol
						Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kesatuan Bangsa dan Politik
				0 Tahun	11 Kecamatan	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
				1 Tahun	5 Tahun	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
				1 Tahun	5 Tahun	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
				0 TAHUN	4 TAHUN	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	KTSP
				0 TAHUN	4 TAHUN	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	KTSP
				0 TAHUN	4 TAHUN	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	KTSP
				0 TAHUN	4 TAHUN	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	KTSP

						Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP	
			Terciptanya pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan	1 Tahun	5 Tahun	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP	
			Terciptanya kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	0 Tahun	11 Kecamatan	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP	
			terlaksananya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kesatuan Bangsa dan Politik	
		2	Menurunkan jumlah kasus penyakit masyarakat	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	0	1 kegiatan	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	BNK
			Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat	0	1 kegiatan	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	BNK	
			Terlaksananya Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	0 Tahun	11 Kecamatan	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP	
			Terciptanya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	0 Tahun	4 tahun	Program pengembangan wawasan kebangsaan		Satpol PP	
		3	Meningkatkan Tatahan Sosial yang Harmonis	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pemakaman dengan baik	1 Paket	5 Paket	Program pengelolaan areal pemakaman	Perumahan	Dinas Sosnakertran
			Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	0 Tahun	4 Tahun	Program pengelolaan areal pemakaman	Perumahan	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota	
			Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	0 Tahun	4 Tahun	Program pengelolaan areal pemakaman	Perumahan	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota	

			Terlaksananya Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal	0 Tahun	4 Tahun	Program pengelolaan areal pemakaman	Perumahan	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
			Tersusunnya Posedur Perizinan Pemakaman	0 Tahun	4 Tahun	Program pengelolaan areal pemakaman	Perumahan	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemakaman	0 Tahun	4 Tahun	Program pengelolaan areal pemakaman	Perumahan	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
19	Menumbuhkan pemahaman keagamaan	Strategi:						
		1 Meningkatkan peran pemerintah dan peran serta organisasi keagamaan dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang religius						
		Arah Kebijakan :						
		1 Meningkatkan peran perangkat agama dan lembaga-lembaga agama dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama				Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah
			Koordinasi Perkembangan Keagamaan Budaya Daerah	0	4 tahun	Program perencanaan sosial budaya	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			Terlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan	1 Tahun	5 Tahun	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan SETDA
			Terlaksananya pembinaan aliran kepercayaan masyarakat dalam Kabupaten Bengkulu Selatan	0 Tahun	5 Tahun	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan SETDA
			Terlaksananya Kegiatan Pelatihan dalam pembinaan dan pengetahuan pengurus masjid	0 Tahun	5 Tahun	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan SETDA

		2	Pembuatan dan penegakan regulasi penanganan penyakit masyarakat				Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah
			Terlaksananya kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba	1 tahun	1 Tahun		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
		3	Memperbanyak dan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan beragama				Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah
20	Meningkatkan aktifitas keagamaan	Strategi:							
		1	Memfasilitasi kegiatan pembangunan dan peningkatan SDM di bidang keagamaan						
		Arah Kebijakan :							
		1	Memberikan insentif bagi aktifitas pendidikan keagamaan				Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah
		2	Pembangunan dan perbaikan sarana ibadah				Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah
21	Meningkatnya minat masyarakat dan peran lembaga adat untuk melestarikan adat istiadat dan budaya lokal	Strategi:							
		1	Optimalisasi peran pemerintah dan lembaga adat (BMA)						
		Arah Kebijakan :							
			Terlaksananya Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	0	4 tahun		Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Kebudayaan	Bappeda
		1	Pembinaan terus menerus terhadap lembaga adat (BMA) dan komunitas pelestari budaya lokal	1	1		Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Kebudayaan	Dinas HubBudKominfo

		2	Penguatan terhadap kelompok dan komunitas pelestari budaya lokal			Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Kebudayaan	Dinas HubBudKominfo	
		3	Menetapkan kurikulum lokal (seni dan budaya) dalam pendidikan	Terlaksanannya Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	0	4 tahun	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Dinas HubBudKominfo, BAPPEDA
				Tercapainya Koordinasi pengembangan nilai-nilai seni dan budaya daerah	0	4 tahun	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	BAPPEDA
				Meningkatnya penyelenggaraan festival budaya daerah	1	1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Dinas HubBudKominfo
				Terlaksanannya fasilitasi partisipasi perkembangan budaya daerah	1	1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Dinas HubBudKominfo
				Terlaksanannya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	1	1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Dinas HubBudKominfo
		4	Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai seni dan budaya daerah				Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Dinas HubBudKominfo
22	Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dalam pembangunan daerah	Strategi:							
		1	Memberikan akses seluas-luasnya bagi perempuan dalam pendidikan dan kesehatan						
		Arah Kebijakan :							
		1	Meningkatkan kualitas perempuan melalui peningkatan keluasaan akses terhadap pendidikan	Meningkatnya kualitas perempuan dalam bidang pendidikan	-	5 tahun	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	BPPKB
\				Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan bagi perempuan		5 tahun	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	BPPKB
				Terwujudnya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang gender	0	200 Orang	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	BPPKB

			Terwujudnya perempuan bebas buta aksara	0%	200 Orang	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	BPPKB
			Terwujudnya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang gender	0	200 Orang	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	BPPKB
			Tersedianya kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	0	5 tahun	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	BPPKB
		2	Meningkatkan kualitas perempuan melalui keluasan akses terhadap pelayanan kesehatan		5 tahun	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	BPPKB
			Tersedianya Pelatih P2MBG yang terampil	0	80 Orang	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	BPPKB
			Terwujudnya SDM pendamping korban KDRT yang terampil	0	80 Orang	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	BPPKB
		3	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dengan keahlian dan keterampilan khusus					
			Terwujudnya peningkatan pengetahuan tenaga kerja perempuan	0	120 Orang	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	BPPKB
			Terciptanya perempuan pengusaha kecil yang mandiri	0	40 Klp	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		BPPKB
			Terlatihnya perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	0	5 Tahun	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Pemberdayaan Perempuan	BPPKB
			Berkembangnya manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha		5 tahun	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan	BPPKB
23	Semakin berdayanya perempuan dalam pembangunan	1	Pemberian dukungan bagi keleluasaan perempuan untuk berkarya	0	30 Orang	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	BPPKB
			Arah Kebijakan :	0	200 Kasus	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	BPPKB

		1	Memberdayakan perempuan dalam organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan	Terbinanya organisasi perempuan di Bengkulu Selatan	0	5 tahun	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan	BPPKB
				Meningkatnya pemahaman tentang kebijakan perlindungan perempuan		6 tahun	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan	BPPKB
		2	Memberikan akses seluas-luasnya bagi perempuan untuk berorganisasi dan bermasyarakat	Tersedianya peta potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pembangunan perempuan dan anak		5 tahun	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pemberdayaan Perempuan	BPPKB
				Meningkatnya produktivitas dan efektivitas organisasi perempuan		25 Organisasi	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan	BPPKB
24	Semakin tingginya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan	1	Pelibatan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah						
			Arah Kebijakan :						
		1	Memberikan porsi keterlibatan perempuan dalam pembangunan daerah	Meningkatnya peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik		50%	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	BPPKB dan Sekretariat Daerah
				Adanya pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	0	50 Orang	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan	BPPKB

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam melaksanakan pembangunan daerah dilakukan secara bertahap dan terarah dengan mempertimbangkan berbagai aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan yang adil dan berorientasi pada terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Hal ini selaras dengan kehendak pembangunan jangka panjang yang telah direncanakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025, dimana pembangunan yang dilakukan merupakan rangkaian upaya menuju tercapainya *grand design* yang ingin diwujudkan 20 tahun mendatang yaitu terwujudnya Kabupaten Bengkulu Selatan yang sejahtera, maju, mandiri dan demokratis berbasis agroindustri dan sumber daya manusia yang tangguh.

Dalam rangka menjabarkan amanat pembangunan jangka panjang tersebut, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan disusun dengan harapan dapat menjadi salah satu instrumen yang mampu menjadi pedoman bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan selama periode tahun 2010-2015. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja pembangunan daerah dirumuskan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang merupakan indikasi dari rencana program yang didasarkan pada arah kebijakan yang disertai dengan kebutuhan pendanaan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau lintas SKPD maupun antar kewilayahan. Program disusun dengan mempertimbangkan tingkat prioritas dari program tersebut, dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah dan juga faktor lain seperti keterbatasan waktu, anggaran, maupun kapasitas serta sumberdaya daerah. Program juga harus memiliki sasaran yang jelas dan dapat diukur hasilnya.

Kebutuhan pendanaan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan program pembangunan daerah adalah sebesar Rp. 1.889/832.391.541 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tahun 2011 sebesar Rp. 178.769.295.280;
- 2) Tahun 2012 sebesar Rp. 345.176.668.366;
- 3) Tahun 2013 sebesar Rp. 392.678.504.039;
- 4) Tahun 2014 sebesar Rp. 461.671.722.447; dan
- 5) Tahun 2015 sebesar Rp. 512.036.201.408.

Adapun rincian indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada tabel 8.1 berikut:

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bengkulu Selatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA					51,170,740,800		62,966,444,270		75,215,733,124		90,555,479,749		108,177,575,699		387,993,523,641	
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi pelayanan perkantoran		2,205,537,300		2,565,876,495		3,079,051,794		3,694,862,153		4,433,834,583		15,979,162,325	
02		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		153,590,000		246,628,500		271,954,200		326,345,040		391,614,048		1,370,131,788	
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		128,000,000		177,200,000		212,640,000		255,168,000		306,201,600		1,079,209,600	
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		86,513,500		70,740,525		84,888,630		101,866,356		122,239,627		466,248,638	
1	01	Pendidikan														
1	01	15 Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya pendidikan anak usia dini		264,562,000		1,004,246,300		1,205,095,560		1,791,114,672		2,149,337,606		6,414,356,138	
1	01	16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun		47,652,101,000		53,397,807,950		64,017,369,540		76,388,843,448		91,666,612,138		332,462,734,076	
1	01	17 Pendidikan Program Pendidikan Menengah	Terselenggaranya pendidikan menengah	-	472,556,000		714,180,300		857,016,360		812,419,632		974,903,558		3,501,075,850	
1	01	18 Pendidikan Program Pendidikan Non Formal	Terselenggaranya Pendidikan non formal	-	55,000,000		607,000,000		728,400,000		874,080,000		1,048,896,000		3,313,376,000	
1	01	19 Pendidikan Program Pendidikan Luar Biasa	Terselenggaranya pendidikan luar biasa	-			400,000,000		480,000,000		576,000,000		691,200,000		2,147,200,000	
1	01	20 Pendidikan Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan		139,717,000		174,018,000		208,821,600		250,585,920		300,703,104		1,073,845,624	
1	01	21 Pendidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Berkembangnya budaya baca dan pembinaan perpustakaan	-			80,000,000		96,000,000		115,200,000		138,240,000		429,440,000	
1	01	22 Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terselenggaranya manajemen pelayanan pendidikan	-	68,500,000		128,775,000		154,530,000		185,436,000		222,523,200		759,764,200	
1	18	15 Pemuda dan Olah Raga Program Pengembangan dan Kereserasian Kebijakan Pemuda	Tercapainya pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	-			1,300,000,000		1,560,000,000		1,872,000,000		2,246,400,000		7,565,950,000	

1	18	Pemuda dan Olah Raga										
1	18	16 Program peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya peran serta kepemudaan	293,775,000	590,000,000	708,000,000	849,600,000	1,019,520,000	3,460,895,000			
1	18	Pemuda dan Olah Raga										
1	18	17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Semakin meningkatnya pertumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	20,000,000	122,000,000	146,400,000	175,680,000	210,816,000	674,896,000			
1	18	Pemuda dan Olah Raga										
1	18	19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Berkembangnya kebijakan dan manajemen olahraga	-	300,000,000	360,000,000	432,000,000	518,400,000	1,610,400,000			
1	18	Pemuda dan Olah Raga										
1	18	20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	188,610,000	1,158,000,000	1,129,600,000	1,739,120,000	1,597,944,000	5,813,274,000			
1	18	Pemuda dan Olah Raga										
1	18	20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	188,610,000	211,151,500	253,381,800	304,058,160	364,869,792	1,322,071,252			
1	18	Pemuda dan Olah Raga										
1	18	21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	-	1,000,000,000	1,200,000,000	1,440,000,000	1,728,000,000	5,368,000,000			
1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										
1	19	17 Program pengembangan wawasan kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan	20,000,000	23,000,000	27,600,000	33,120,000	39,744,000	143,464,000			
DINAS KESEHATAN				15,344,071,000	33,233,743,000	37,429,358,800	43,135,957,560	45,776,882,744	174,800,013,104			
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	624,453,000	686,896,000	824,275,200	989,130,240	1,186,956,288	4,311,710,728			
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	64,755,000	301,230,000	361,476,000	433,771,200	520,525,440	1,681,757,640			
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	9,800,000	10,780,000	12,936,000	15,523,200	18,627,840	67,667,040			
1	02	Kesehatan										
1	02	15 Program obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan	1,772,888,000	2,042,676,000	2,451,211,200	2,941,453,440	2,755,525,000	11,963,753,640			
1	02	Kesehatan										
1	02	16 Program Upaya Kesehatan masyarakat	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat	7,164,596,000	9,819,951,000	11,783,941,200	14,140,729,440	16,968,875,328	59,878,092,968			
1	02	Kesehatan										
1	02	17 Program pengawasan obat dan makanan	Meningkatnya pengawasan obat dan makanan	-	77,060,000	92,472,000	110,966,400	133,159,680	413,658,080			
1	02	Kesehatan										
1	02	18 Program pengembangan obat asli indonesia	Tersedianya dan berkembangnya obat asli indonesia	-	195,760,000	90,912,000	109,094,400	130,913,280	406,679,680			
1	02	Kesehatan										
1	02	19 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	57,075,000	286,983,000	344,379,600	413,255,520	495,906,624	1,597,599,744			
1	02	Kesehatan										
1	02	20 Program perbaikan gizi masyarakat	Tersedianya upaya perbaikan gizi masyarakat	39,092,000	470,701,000	546,841,200	613,009,440	735,611,328	2,405,254,968			
1	02	Kesehatan										
1	02	21 Program pengembangan lingkungan sehat	Berkembangnya kualitas lingkungan sehat	3,886,840,000	1,329,400,000	1,595,280,000	1,914,336,000	2,297,203,200	11,023,059,200			

1	02	Kesehatan												
1	02	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit	1,278,396,000	7,166,235,000	10,399,482,000	13,919,378,400	2,429,974,080	35,193,465,480				
1	02	28	Kesehatan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Terjalannya kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	600,000,000	800,000,000	960,000,000	1,152,000,000	1,382,400,000	4,894,400,000				
DINAS PEKERJAAN UMUM					13,820,577,730	38,701,250,000	44,852,192,000	50,561,621,000	53,212,061,000	53,212,061,000				
01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	220,690,000	292,759,000	351,310,800	421,572,960	505,887,552	1,792,220,312				
02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	128,465,000	391,311,000	169,573,200	203,487,840	444,185,408	1,337,022,448				
03			Program peningkatan disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	-	35,000,000	-	-	-	35,000,000				
05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	39,000,000	42,900,000	51,480,000	61,776,000	74,131,200	269,287,200				
06			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,220,862,000	22,778,500,000	28,672,684,000	31,601,959,000	37,087,135,000	128,361,140,000				
1	03		Pekerjaan Umum											
1	03	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan	7,929,912,000	19,954,250,000	25,372,192,000	29,331,621,000	35,687,061,000	118,275,036,000				
1	03	16	Pekerjaan Umum Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terlaksananya pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	345,730	1,650,000,000	1,650,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	5,500,345,730				
1	03	24	Pekerjaan Umum Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Berkembangnya pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	4,359,320,000	8,547,000,000	9,405,000,000	11,805,000,000	8,900,000,000	43,016,320,000				
1	03	25	Pekerjaan Umum Program penyediaan dan pengolahan air baku	Tersedianya pengelolaan air baku secara maksimal	-	750,000,000	1,000,000,000	750,000,000	750,000,000	3,250,000,000				
1	03	27	Pekerjaan Umum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Berkembangnya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	-	1,450,000,000	1,200,000,000	1,350,000,000	1,250,000,000	5,250,000,000				
1	03	28	Pekerjaan Umum Program pengendalian banjir	Tersedianya program pengendalian banjir	-	550,000,000	700,000,000	700,000,000	-	1,950,000,000				
1	03	29	Pekerjaan Umum Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terlaksananya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	-	1,450,000,000	1,450,000,000	1,450,000,000	1,450,000,000	5,800,000,000				
1	03	30	Pekerjaan Umum Program pembangunan infrastruktur pedesaan	Terlaksananya pembangunan infrastruktur pedesaan	-	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	6,000,000,000				
1	04		Perumahan											
1	04	15	Program pengembangan perumahan	Terlaksananya pengembangan perumahan	650,000,000	1,025,000,000	775,000,000	775,000,000	775,000,000	4,000,000,000				

1	04	Perumahan												
1	04	16	Program lingkungan sehat perumahan	Terciptanya lingkungan sehat perumahan	881,000,000	775,000,000	750,000,000	750,000,000	750,000,000	750,000,000	3,906,000,000			
1	04	18	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Terlaksananya perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	-	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	2,000,000,000			
1	04	19	Perumahan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Terlaksananya peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	-	550,000,000	550,000,000	550,000,000	550,000,000	550,000,000	2,200,000,000			
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					2,617,335,000	9,316,970,000	10,136,364,000	9,879,636,800	11,523,164,160	43,473,469,960				
01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	220,690,000	292,759,000	351,310,800	421,572,960	505,887,552	1,792,220,312				
02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	128,465,000	391,311,000	169,573,200	203,487,840	444,185,408	1,337,022,448				
03			Program peningkatan disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	-	35,000,000	-	-	-	35,000,000				
05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	39,000,000	42,900,000	51,480,000	61,776,000	74,131,200	269,287,200				
06			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	65,000,000	155,000,000	96,000,000	115,200,000	138,240,000	569,440,000				
1	01	15	Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya pendidikan anak usia dini	-	25,000,000	30,000,000	36,000,000	43,200,000	134,200,000				
1	01	16	Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	-	25,000,000	30,000,000	36,000,000	43,200,000	134,200,000				
1	01	17	Pendidikan Program Pendidikan Menengah	Terselenggaranya pendidikan menengah yang baik	-	30,000,000	36,000,000	43,200,000	51,840,000	161,040,000				
1	01	17	Pendidikan Program Pendidikan Non Formal	Terlaksananya pendidikan non formal	-	30,000,000	36,000,000	43,200,000	51,840,000	161,040,000				
1	02	21	Kesehatan Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Terlaksananya pengembangan lingkungan sehat	-	150,000,000	180,000,000	216,000,000	259,200,000	805,200,000				
1	02	29	Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita	-	-	120,000,000	144,000,000	172,800,000	436,800,000				
1	05	15	Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya perencanaan tata ruang	-	900,000,000	-	-	400,000,000	1,300,000,000				
1	05	16	Penataan Ruang Program Pemanfaatan Ruang	Optimalnya pemanfaatan ruang daerah	-	-	1,150,000,000	-	-	1,150,000,000				
1	05	17	Penataan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	-	250,000,000	-	250,000,000				

02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	37,434,000	95,000,000	514,000,000	136,800,000	164,160,000	947,394,000
03		Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	-	24,500,000	13,000,000	-	-	37,500,000
05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	-	10,000,000	12,000,000	14,400,000	17,280,000	53,680,000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja keuangan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
1	07	Perhubungan							
1	07	15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	235,000,000	235,000,000	282,000,000	338,400,000	406,080,000	1,496,480,000
1	07	16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	120,000,000	120,000,000	144,000,000	172,800,000	207,360,000	- 764,160,000
1	07	17 Program peningkatan pelayanan angkutan	Meningkatnya pelayanan angkutan	56,000,000	160,000,000	192,000,000	230,400,000	276,480,000	- 914,880,000
1	07	18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	-	100,000,000	-	-	-	100,000,000
1	07	19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Meningkatnya pengamanan lalu lintas	233,680,000	700,000,000	720,000,000	864,000,000	1,336,800,000	3,854,480,000
1	07	20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	15,000,000	63,000,000	-	-	3,000,000	81,000,000
1	17	Kebudayaan							
1	17	15 Program Pengembangan Nilai Budaya	Berkembangnya nilai budaya daerah	27,000,000	30,000,000	36,000,000	43,200,000	51,840,000	188,040,000
1	17	17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terkelolanya keragaman budaya daerah	110,500,000	124,000,000	148,800,000	178,560,000	214,272,000	776,132,000
1	20	Pemerintahan Umum							
1	20	17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	20,000,000	50,000,000	60,000,000	72,000,000	86,400,000	288,400,000
1	25	Komunikasi dan Informatika							
1	25	15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Berkembangnya komunikasi, informasi dan media massa	26,000,000	260,000,000	312,000,000	374,400,000	449,280,000	1,421,680,000
1	25	16 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Terlaksananya kajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	-	50,000,000	60,000,000	72,000,000	86,400,000	268,400,000
1	25	17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya upaya peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	-	60,000,000	72,000,000	86,400,000	103,680,000	322,080,000

1	25	18	Komunikasi dan Informatika Program kerjasama informasi dan media massa	Terjalannya kerjasama di bidang informasi dan media massa	139,000,000	139,000,000	166,800,000	200,160,000	240,192,000	885,152,000		
2	04	15	Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Berkembangnya pemasaran bidang pariwisata	20,000,000	76,000,000	91,200,000	109,440,000	131,328,000	427,968,000	-	
2	04	16	Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Berkembangnya destinasi pariwisata di daerah	36,000,000	100,000,000	120,000,000	144,000,000	172,800,000	572,800,000		
2	04	17	Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan	Berkembangnya kemitraan dalam pengembangan kepariwisataan	-	20,000,000	24,000,000	28,800,000	34,560,000	107,360,000		
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP					1,385,000,000	1,945,000,000	3,252,200,000	3,210,640,000	3,946,208,000	13,739,048,000		
01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran	131,000,000	172,000,000	205,400,000	245,480,000	288,576,000	1,042,456,000		
02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	102,000,000	47,000,000	34,600,000	11,520,000	63,824,000	258,944,000		
06			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Berkembangnya sistem pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan	9,000,000	20,000,000	24,000,000	28,800,000	34,560,000	116,360,000		
1	08	15	Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Berkembangnya kinerja pengelolaan persampahan	79,000,000	300,000,000	302,000,000	243,200,000	357,840,000	1,282,040,000		
1	08	16	Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	29,000,000	243,000,000	291,600,000	421,120,000	385,344,000	1,370,064,000		
1	08	17	Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terlaksananya konservasi sumber daya alam	900,000,000	688,000,000	1,130,600,000	1,021,720,000	1,526,064,000	5,266,384,000		
1	08	19	Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	125,000,000	205,000,000	288,000,000	282,600,000	415,120,000	1,315,720,000	0	
1	08	20	Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian polusi	Meningkatnya pengendalian polusi udara	-	-	400,000,000	400,000,000	290,000,000	1,090,000,000		
1	08	21	Lingkungan Hidup Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	Berkembangnya ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan	-	-	150,000,000	100,000,000	150,000,000	400,000,000		
1	08	23	Lingkungan Hidup Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem pesisir dan Laut	Terlaksananya rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	-	-	100,000,000	60,000,000	72,000,000	232,000,000		
1	08	24	Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terkelolanya ruang terbuka hijau (RTH)	10,000,000	270,000,000	326,000,000	396,200,000	362,880,000	1,365,080,000		

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				3,420,000,000		3,455,000,000		4,146,000,000		4,975,200,000		4,847,040,000		20,843,240,000
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	-		216,500,000		259,800,000		311,760,000		374,112,000		1,162,172,000
02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	-		173,000,000		249,600,000		119,520,000		143,424,000		685,544,000
03		Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur (PNS)	-		32,500,000		15,000,000		15,000,000		-		62,500,000
05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	-		25,000,000		30,000,000		36,000,000		43,200,000		134,200,000
06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-		48,000,000		57,600,000		69,120,000		82,944,000		257,664,000
			Jumlah dokumen RKA/DPA	4 dokumen	-	4		4		4		4	16	64,416,000
1	10	Kependudukan dan Pencatatan Sipil				12,000,000		14,400,000		17,280,000		20,736,000		64,416,000
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tertatanya administrasi kependudukan	3,420,000,000		3,455,000,000	4,146,000,000		4,975,200,000		4,847,040,000		20,843,240,000
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA				453,993,000	1	1,504,000,000	1	1,804,800,000	1	2,143,760,000	1	2,572,512,000	4	8,479,065,000
01		Program pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya administrasi pelayanan perkantoran	169,187,000	1	244,000,000	1	292,800,000	1	351,360,000	1	421,632,000	4	1,478,979,000
02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	26,420,000		50,000,000		60,000,000		72,000,000		86,400,000		294,820,000
06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5,225,000		10,000,000		12,000,000		14,400,000		17,280,000		58,905,000
1	11	16	Pemberdayaan Perempuan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Menguatnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	-	180,000,000		216,000,000		259,200,000		311,040,000		966,240,000
1	11	16	Pemberdayaan Perempuan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Menguatnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	90,000,000	170,000,000		204,000,000		244,800,000		293,760,000		1,002,560,000
1	11	17	Pemberdayaan Perempuan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan	-	330,000,000		396,000,000		475,200,000		570,240,000		1,771,440,000
1	11	18	Pemberdayaan Perempuan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	45,000,000	100,000,000		120,000,000		144,000,000		172,800,000		581,800,000
1	11	19	Pemberdayaan Perempuan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Menguatnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	-	50,000,000		60,000,000		50,000,000		60,000,000		220,000,000
1	12	15	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana	Terlaksananya program keluarga berencana di daerah	73,161,000	160,000,000		192,000,000		230,400,000		276,480,000		932,041,000
1	12	16	keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Terlaksananya program kesehatan reproduksi remaja	-	30,000,000		36,000,000		43,200,000		51,840,000		161,040,000

1	04	18	Perumahan Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Terlaksananya perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	-	250,000,000	300,000,000	360,000,000	432,000,000	1,342,000,000	
1	05	15	Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya perencanaan tata ruang	-	70,000,000	84,000,000	100,800,000	120,960,000	375,760,000	
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						709,426,500	1,661,440,000	1,871,478,000	2,245,773,600	2,694,928,320	9,183,046,420
01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	164,065,500	200,560,000	240,672,000	288,806,400	346,567,680	1,240,671,580	
02			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	60,361,000	253,880,000	184,656,000	221,587,200	265,904,640	986,388,840	
03			Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur (PNS)	-	12,000,000	12,150,000	14,580,000	17,496,000	56,226,000	
05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	-	15,000,000	18,000,000	21,600,000	25,920,000	80,520,000	
06			Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	90,000,000	108,000,000	129,600,000	155,520,000	483,120,000	
1	15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								
1	15	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Berkembangnya sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	75,000,000	125,000,000	150,000,000	180,000,000	216,000,000	746,000,000	
1	15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								
1	15	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	126,000,000	120,000,000	144,000,000	172,800,000	207,360,000	770,160,000	
1	15	16	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								
1	15	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Berkembangnya kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	-	70,000,000	84,000,000	100,800,000	120,960,000	375,760,000	
2	06		Perdagangan								
2	06	15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Tersedianya perlindungan bagi konsumen dan pengamanan perdagangan	35,000,000	75,000,000	90,000,000	108,000,000	129,600,000	437,600,000	
2	06		Perdagangan								
2	06	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya efisiensi perdagangan Dalam negeri	97,000,000	205,000,000	246,000,000	295,200,000	354,240,000	1,197,440,000	
2	06	19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Terbinanya pedagang kaki lima dan asongan	-	65,000,000	78,000,000	93,600,000	112,320,000	348,920,000	
2	07		Perindustrian								
2	07	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Berkembangnya industri kecil dan menengah	47,000,000	260,000,000	312,000,000	374,400,000	449,280,000	1,442,680,000	
2	07	19	Program Pengembangan sentra- sentra industri potensial	Berkembangnya sentra-sentra industri potensial	105,000,000	170,000,000	204,000,000	244,800,000	293,760,000	1,017,560,000	

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						250,269,000	2,636,700,000	3,104,040,000	4,024,848,000	4,829,817,600	14,795,674,600
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		96,231,000	177,500,000	213,000,000	255,600,000	306,720,000	1,049,051,000	
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		7,348,000	1,397,500,000	1,677,000,000	2,012,400,000	2,414,880,000	7,509,128,000	
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur (PNS)		-	40,000,000	48,000,000	57,600,000	69,120,000	214,720,000	
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		-	25,000,000	30,000,000	36,000,000	43,200,000	134,200,000	
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		21,690,000	31,700,000	38,040,000	45,648,000	54,777,600	191,855,600	
1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri									
1	19	16 Program Pemeliharaan dan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terpeliharanya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		75,000,000	100,000,000	120,000,000	144,000,000	172,800,000	611,800,000	
1	19	17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan		-	400,000,000	420,000,000	504,000,000	604,800,000	1,878,800,000	
1	19	18 Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Berkembangnya kemitraan wawasan kebangsaan		-	50,000,000	60,000,000	72,000,000	86,400,000	268,400,000	
1	19	19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat		-	50,000,000	60,000,000	72,000,000	86,400,000	268,400,000	
1	19	21 Program Pendidikan Politik Masyarakat	Terlaksananya pendidikan politik masyarakat		25,000,000	315,000,000	378,000,000	753,600,000	904,320,000	2,375,920,000	
1	19	22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terlaksananya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		25,000,000	50,000,000	60,000,000	72,000,000	86,400,000	293,400,000	
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						952,714,000	1,494,927,000	1,793,912,400	2,152,694,880	2,583,233,856	8,977,482,136
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		582,859,000	548,752,000	658,502,400	790,202,880	948,243,456	3,528,559,736	
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		55,355,000	434,775,000	521,730,000	626,076,000	751,291,200	2,389,227,200	
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur (PNS)		39,100,000	58,100,000	69,720,000	83,664,000	100,396,800	350,980,800	
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kaapasitas sumber daya aparatur		20,500,000	20,500,000	24,600,000	29,520,000	35,424,000	130,544,000	
1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri									

1	19	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Perdagangan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan		174,014,000		180,800,000		216,960,000		260,352,000		312,422,400		1,144,548,400
2	06	15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Tersedianya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan		26,000,000		26,000,000		31,200,000		37,440,000		44,928,000		165,568,000
1	19	16	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri													
1	19	16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas untuk pencegahan tindak kriminal	Terpeliharanya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		54,886,000		66,000,000		79,200,000		95,040,000		114,048,000		409,174,000
1	19	17	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri													
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan		-		30,000,000		36,000,000		43,200,000		51,840,000		161,040,000
1	19	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri													
1	19	19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		-		100,000,000		120,000,000		144,000,000		172,800,000		536,800,000
1	19	20	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri													
1	19	20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat		-		30,000,000		36,000,000		43,200,000		51,840,000		161,040,000
SEKRETARIAT DAERAH																
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN																
						1,240,000,000		1,825,000,000		2,040,000,000		2,016,000,000		2,419,200,000		9,540,200,000
1	06	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur													
1	06	16	Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya kerjasama pembangunan		50,000,000		50,000,000		60,000,000		72,000,000		86,400,000		318,400,000
1	06	17	Perencanaan Pembangunan													
1	06	17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Terlaksananya pengembangan wilayah perbatasan		-		50,000,000		60,000,000		-		-		110,000,000
1	06	21	Perencanaan Pembangunan Daerah													
1	09	16	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tersedianya perencanaan pembangunan daerah		120,000,000		125,000,000		150,000,000		180,000,000		216,000,000		791,000,000
1	09	16	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terlaksananya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		950,000,000		950,000,000		1,140,000,000		1,368,000,000		1,641,600,000		6,049,600,000
1	09	17	Pertanahan													
1	09	17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan		-		50,000,000		60,000,000		72,000,000		86,400,000		268,400,000
1	09	18	Pertanahan													
1	09	18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Berkembangnya sistem informasi pertanahan		-		75,000,000		-		-		-		75,000,000
1	19	17	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri													
1	19	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan		20,000,000		25,000,000		30,000,000		36,000,000		43,200,000		154,200,000

BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN						3,420,721,000		3,771,090,000		4,333,308,000		5,199,969,600		6,239,963,520		22,805,052,120
01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		1,225,478,000		1,236,932,000		1,484,318,400		1,781,182,080		2,137,418,496		7,865,328,976
02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		2,030,843,000		2,161,510,000		2,593,812,000		3,112,574,400		3,735,089,280		13,633,828,680
03			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur (PNS)		27,375,000		27,648,000		33,177,600		39,813,120		47,775,744		175,789,464
03			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur				80,000,000		96,000,000		115,200,000		138,240,000		429,440,000
06			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		87,025,000		110,000,000		132,000,000		158,400,000		190,080,000		677,505,000
1	21		Kepegawaian													
1	21	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur		50,000,000		235,000,000		90,000,000		108,000,000		129,600,000		452,600,000
BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN						380,000,000		505,000,000		398,000,000		541,600,000		457,920,000		2,282,520,000
06			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		20,000,000		30,000,000		36,000,000		43,200,000		51,840,000		181,040,000
1	06		Perencanaan Pembangunan													
1	06	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya perencanaan pembangunan daerah		120,000,000		130,000,000		156,000,000		187,200,000		224,640,000		817,840,000
1	20		Pemerintahan Umum													
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		80,000,000		-		-		-		-		80,000,000
1	20		Pemerintahan Umum													
1	20	26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penataan peraturan perundang-undangan		80,000,000		185,000,000		126,000,000		151,200,000		181,440,000		723,640,000
1	21		Kepegawaian													
1	21	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur		80,000,000		160,000,000		80,000,000		160,000,000		-		480,000,000
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN						425,000,000		1,676,000,000		1,921,200,000		2,480,440,000		2,766,528,000		9,269,168,000
01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran		-		96,000,000		115,200,000		138,240,000		165,888,000		515,328,000
05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		25,000,000		330,000,000		396,000,000		475,200,000		570,240,000		1,796,440,000
1	20		Pemerintahan Umum													
1	20	17	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah		-		-		90,000,000		108,000,000		129,600,000		327,600,000
1	20		Pemerintahan Umum													
1	20	18	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah		-		75,000,000		90,000,000		108,000,000		129,600,000		402,600,000

1	18	Pemuda dan Olah Raga													
1	18	16 Program peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya peran serta kepemudaan		69,000,000		150,000,000		180,000,000		216,000,000		259,200,000		874,200,000
1	18	Pemuda dan Olah Raga													
1	18	19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Berkembangnya kebijakan dan manajemen olahraga		31,000,000		75,000,000		90,000,000		108,000,000		129,600,000		433,600,000
1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri													
1	19	17 Program pengembangan wawasan kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan		100,000,000		100,000,000		120,000,000		144,000,000		172,800,000		636,800,000
1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri													
1	19	18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Berkembangnya kemitraan wawasan kebangsaan		-		100,000,000		120,000,000		144,000,000		172,800,000		536,800,000
1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri													
1	19	20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat		-		50,000,000		60,000,000		72,000,000		86,400,000		268,400,000
BAGIAN HUMAS, PROTOKOL DAN SANTEL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN					3,750,000,000		4,940,000,000		5,928,000,000		7,113,600,000		8,536,320,000		30,267,920,000
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		3,400,000,000		4,200,000,000		5,040,000,000		6,048,000,000		7,257,600,000		25,945,600,000
1	25	Komunikasi dan Informatika													
1	25	15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Berkembangnya komunikasi, informasi dan media massa		186,000,000		380,000,000		456,000,000		547,200,000		656,640,000		2,225,840,000
1	25	Komunikasi dan Informatika													
1	25	17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		35,000,000		120,000,000		144,000,000		172,800,000		207,360,000		679,160,000
1	25	Komunikasi dan Informatika													
1	25	18 Program kerjasama informasi dan media massa	Terlaksananya kerjasama informasi dan media massa		129,000,000		240,000,000		288,000,000		345,600,000		414,720,000		1,417,320,000
SEKRETARIAT KORPRI KABUPATEN BENGKULU SELATAN							3,292,275,000		2,404,730,000		1,287,276,000		1,544,731,200		8,297,012,200
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		-		207,500,000		249,000,000		284,400,000		341,280,000		1,060,180,000
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		-		354,775,000		425,730,000		510,876,000		613,051,200		1,904,432,200
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur (PNS)		-		250,000,000		240,000,000		288,000,000		345,600,000		1,073,600,000
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		-		75,000,000		90,000,000		108,000,000		129,600,000		402,600,000
1	06	Pendidikan													
1	06	16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terlaksananya wajib belajar pendidikan dadasr sembilan tahun		-		1,000,000,000		50,000,000		60,000,000		72,000,000		1,182,000,000
1	06	Perumahan													
1	06	17 Program pengembangan perumahan	Berkembangnya program perumahan		-		1,000,000,000		1,200,000,000		-		-		2,200,000,000

1	06	21	Pemberdayaan Perempuan Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Terciptanya keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	-	25,000,000	30,000,000	36,000,000	43,200,000	134,200,000
1	09	16	Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Tersedianya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	-	100,000,000	-	-	-	100,000,000
1	09	17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	-	100,000,000	120,000,000	-	-	220,000,000
1	09	18	Kepegawaian Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur	-	180,000,000	-	-	-	20,000,000
SEKRETARIAT DPRD					14,700,509,000	21,078,870,000	25,294,644,000	30,353,572,800	36,424,287,360	127,851,883,160
01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya program pelayanan administrasi perkantoran	4,484,345,000	5,437,183,000	6,524,619,600	7,829,543,520	9,395,452,224	33,671,143,344
02			Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3,679,106,000	7,877,014,000	9,452,416,800	11,342,900,160	13,611,480,192	45,962,917,152
03			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tercapainya program peningkatan Disiplin Aparatur	156,250,000	171,875,000	206,250,000	247,500,000	297,000,000	1,078,875,000
05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	752,500,000	827,750,000	993,300,000	1,191,960,000	1,430,352,000	5,195,862,000
06			Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya program peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	80,473,000	88,520,000	106,224,000	127,468,800	152,962,560	555,648,360
1	20	15	Pemerintahan Umum Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tercapainya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	5,547,835,000	6,676,528,000	8,011,833,600	9,614,200,320	11,537,040,384	41,387,437,304
INSPEKTORAT					650,277,000	5,775,000,000	4,530,000,000	5,436,000,000	6,523,200,000	22,914,477,000
01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	192,202,000	420,000,000	504,000,000	604,800,000	725,760,000	2,446,762,000
02			Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	53,075,000	3,490,000,000	1,788,000,000	2,145,600,000	2,574,720,000	10,051,395,000
03			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur (PNS)	-	500,000,000	600,000,000	720,000,000	864,000,000	2,684,000,000
05			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	5,000,000	15,000,000	18,000,000	21,600,000	25,920,000	85,520,000
06			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	150,000,000	180,000,000	216,000,000	259,200,000	805,200,000
1	03	18	Pekerjaan Umum Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan	Terlaksananya rehabilitasi jalani dan jembatan	-	250,000,000	300,000,000	360,000,000	432,000,000	1,342,000,000

KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					499,999,000	7,840,798,000	9,378,957,600	11,254,749,120	13,086,863,944	42,061,367,664
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		160,886,000	528,449,000	634,138,800	760,966,560	913,159,872	2,997,600,232
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		339,113,000	4,804,849,000	5,765,818,800	6,918,982,560	8,302,779,072	26,131,542,432
03		Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur (PNS)		-	105,000,000	126,000,000	151,200,000	181,440,000	563,640,000
06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	60,000,000	72,000,000	86,400,000	103,680,000	322,080,000
1	16	Penanaman Modal Daerah			-					
1	16	15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi		-	387,500,000	435,000,000	522,000,000	626,400,000	1,970,900,000
1	16	Penanaman Modal Daerah			-					
1	16	16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi		-	285,000,000	342,000,000	410,400,000	492,480,000	1,529,880,000
1	16	Penanaman Modal Daerah			-					
1	16	17 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penanaman modal		-	35,000,000	42,000,000	50,400,000	60,480,000	187,880,000
1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			-					
1	19	15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan		-	65,000,000	78,000,000	93,600,000	112,320,000	348,920,000
1	20	Pemerintahan Umum			-					
1	20.	23 Program optimisasi pemanfaatan teknologi informal	Optimalnya pemanfaatan teknologi informasi		-	1,095,000,000	1,314,000,000	1,576,800,000	1,473,325,000	5,459,125,000
1	3	Pemerintahan Umum			-					
1	20.	24 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Intensifnya penanganan pengaduan masyarakat		-	30,000,000	36,000,000	43,200,000	51,840,000	161,040,000
1	3	Pemerintahan Umum			-					
1	20.	25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah		-	70,000,000	84,000,000	100,800,000	120,960,000	375,760,000
1	3	Pemerintahan Umum			-					
1	21	Kepegawaian			-					
1	21	16 Program Pendidikan Kedinasan	Terlaksananya pendidikan kedinasan (PNS)		-	110,000,000	132,000,000	158,400,000	190,080,000	590,480,000
1	25	Komunikasi dan Informatika			-					
1	25.	17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi		-	265,000,000	318,000,000	381,600,000	457,920,000	1,422,520,000
1	3	Pemerintahan Umum			-					
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					1,179,999,000	2,478,200,000	3,341,840,000	4,072,208,000	4,868,649,600	15,940,896,600
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		137,413,000	216,500,000	259,800,000	311,760,000	374,112,000	1,299,585,000
02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		15,169,000	173,000,000	249,600,000	119,520,000	143,424,000	700,713,000
03		Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur (PNS)		-	32,500,000	15,000,000	15,000,000	-	62,500,000
05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		-	25,000,000	30,000,000	36,000,000	43,200,000	134,200,000
06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		23,917,000	48,000,000	57,600,000	69,120,000	82,944,000	281,581,000
BPMD										

1	22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
1	22	15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pedesaan	565,000,000	844,000,000	1,137,800,000	1,185,360,000	1,422,432,000	5,154,592,000					
1	22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
1	22	16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Berkembangnya lembaga ekonomi pedesaan	75,000,000	300,000,000	360,000,000	732,000,000	878,400,000	2,345,400,000					
1	22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
1	22	17 Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	190,000,000	240,000,000	388,000,000	465,600,000	558,720,000	1,842,320,000					
1	22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
1	22	18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	95,000,000	445,000,000	584,000,000	825,800,000	990,960,000	2,940,760,000					
1	22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
1	22	19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Meningkatnya peran perempuan di pedesaan	75,000,000	150,000,000	255,000,000	306,000,000	367,200,000	1,153,200,000					
1	25	Komunikasi dan Informatika												
1	25	18 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Terjalannya kerjasama informasi dan media massa	3,500,000	4,200,000	5,040,000	6,048,000	7,257,600	26,045,600					
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH				543,570,000	1,752,500,000	2,103,000,000	2,019,600,000	2,332,800,000	8,751,470,000					
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	136,840,000	207,000,000	248,400,000	298,080,000	357,696,000	1,248,016,000					
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	69,630,000	527,500,000	633,000,000	255,600,000	216,000,000	1,701,730,000					
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	10,500,000	17,000,000	20,400,000	24,480,000	29,376,000	101,756,000					
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	11,000,000	13,200,000	15,840,000	19,008,000	59,048,000					
1	01	Pendidikan												
1	01	21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Berkembangnya budaya baca dan pembinaan perpustakaan	326,600,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000	4,191,560,000					
1	24	Kearsipan												
1	24	15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Terlaksananya perbaikan sistem administrasi kearsipan	-	160,000,000	192,000,000	230,400,000	276,480,000	858,880,000					
1	24	Kearsipan												
1	24	16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	-	75,000,000	90,000,000	108,000,000	129,600,000	402,600,000					
1	24	Pengadaan sarana penyimpanan data												
1	24	17 Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	-	35,000,000	42,000,000	50,400,000	60,480,000	187,880,000					

DINAS PERTANIAN						15,109,984,000	19,703,974,000	23,404,768,800	28,085,722,560	33,702,867,072	120,007,316,432
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		247,880,000	247,880,000	297,456,000	356,947,200	428,336,640	1,578,499,840	
02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		29,024,000	29,024,000	34,828,800	41,794,560	50,153,472	184,824,832	
05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		5,000,000	5,000,000	6,000,000	7,200,000	8,640,000	31,840,000	
06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		6,070,000	76,070,000	91,284,000	109,540,800	131,448,960	414,413,760	
2	01	Pertanian									
2	01	15 Program peningkatan kesejahteraan petani	Meningkatnya kesejahteraan petani		50,000,000	299,000,000	358,800,000	430,560,000	516,672,000	1,655,032,000	
2	01	16 Program peningkatan ketahanan pangan Pertanian/perkebunan	Meningkatnya ketahanan pangan pertanian/perkebunan		358,000,000	2,011,000,000	2,413,200,000	2,895,840,000	3,475,008,000	11,153,048,000	
2	01	18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan		515,000,000	1,506,000,000	1,567,200,000	1,880,640,000	2,256,768,000	7,725,608,000	
2	01	19 Pertanian Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan		13,754,010,000	15,000,000,000	18,000,000,000	21,600,000,000	25,920,000,000	94,274,010,000	
2	01	21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak		30,000,000	50,000,000	60,000,000	72,000,000	86,400,000	298,400,000	
2	01	22 Pertanian Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan		115,000,000	150,000,000	180,000,000	216,000,000	259,200,000	920,200,000	
2	01	24 Pertanian Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Meningkatnya penerapan teknologi peternakan		-	330,000,000	396,000,000	475,200,000	570,240,000	1,771,440,000	
KANTOR KETAHANAN PANGAN						448,250,000	1,817,250,000	1,820,700,000	2,174,040,000	2,608,848,000	9,422,588,000
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		96,363,000	113,750,000	136,500,000	163,800,000	196,560,000	706,973,000	
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		51,887,000	1,188,000,000	1,065,600,000	1,267,920,000	1,521,504,000	5,648,411,000	
02		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan		551,750,000	853,000,000	1,023,600,000	1,228,320,000	1,473,984,000	5,130,654,000	
2	01	16 Pertanian Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya ketahanan pangan pertanian / perkebunan		300,000,000	515,500,000	618,600,000	742,320,000	890,784,000	3,067,204,000	
DINAS KEHUTANAN DAN ESDM						837,754,000	16,413,000,000	19,575,600,000	23,590,720,000	28,188,864,000	88,605,938,000
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		227,364,000	335,000,000	402,000,000	482,400,000	578,880,000	2,025,644,000	
02		Program Peningkatan Sarana	Meningkatnya sarana dan								

03		dan Prasarana Aparatur	prasarana aparatur		23,390,000	883,000,000	939,600,000	1,227,520,000	1,353,024,000	4,426,534,000
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur (PNS)		-	750,000,000	900,000,000	1,080,000,000	1,296,000,000	4,026,000,000
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		-	15,000,000	18,000,000	21,600,000	25,920,000	80,520,000
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan		30,346,000	250,000,000	300,000,000	360,000,000	432,000,000	1,372,346,000
2	02	Kehutanan								
2	02	15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Terlaksananya pemanfaatan potensi sumber daya hutan		-	2,150,000,000	2,580,000,000	3,096,000,000	3,715,200,000	11,541,200,000
2	02	Kehutanan								
2	02	16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan		64,350,000	2,980,000,000	3,576,000,000	4,291,200,000	5,149,440,000	16,060,990,000
2	02	Kehutanan								
2	02	17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Terlaksananya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan		-	4,150,000,000	4,980,000,000	5,976,000,000	7,171,200,000	22,277,200,000
2	02	Kehutanan								
2	02	19 Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan	Terlaksananya pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan		92,304,000	1,050,000,000	1,260,000,000	1,512,000,000	1,814,400,000	5,728,704,000
2	02	Kehutanan								
2	02	20 Program Perencanaan dan Pengembangan Baton	Tersedianya perencanaan dan pengembangan baton		-	450,000,000	540,000,000	648,000,000	777,600,000	2,415,600,000
2	03	Kehutanan								
2	03	15 Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Hutan Pantai	Meningkatnya fungsi hutan mangrove dan hutan pantai		-	-	750,000,000	900,000,000	1,080,000,000	2,730,000,000
2	03	Kehutanan								
2	03	15 Program Penyuluhan Kegiatan RHL dan KTA	Terlaksananya penyuluhan kegiatan RHL dan KTA		-	-	500,000,000	600,000,000	720,000,000	1,820,000,000
2	03	Kehutanan								
2	03	15 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan	Berkembangnya sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan		-	-	500,000,000	600,000,000	720,000,000	1,820,000,000
2	03	Energi dan Sumberdaya Mineral								
2	03	15 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan		300,000,000	1,400,000,000	1,680,000,000	2,016,000,000	2,419,200,000	7,815,200,000
2	03	Energi dan Sumberdaya Mineral								
2	03	16 Program pengawasan dan penerbitan kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Terlaksananya pengawasan dan penerbitan kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan		-	600,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	3,220,800,000
2	03	Energi dan Sumberdaya Mineral								
2	03	17 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan		100,000,000	1,400,000,000	1,680,000,000	2,016,000,000	2,419,200,000	7,615,200,000
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP4K)					1,090,495,000	1,249,170,000	1,199,004,000	1,713,804,800	1,970,165,760	7,222,639,560
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		156,443,500	172,087,850	206,505,420	247,806,504	297,367,805	1,080,211,079
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		20,301,500	30,518,150	36,621,780	43,946,136	52,735,363	184,122,929

05		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		2,000,000		4,800,000		5,760,000		6,912,000		8,294,400		27,766,400
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan		1,750,000		10,000,000		12,000,000		14,400,000		17,280,000		55,430,000
2	01	Pertanian											0		-
2.01	01	15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kesejahteraan petani		143,655,000		158,020,500		189,624,600		227,549,520		273,059,424		991,909,044
2	01	Pertanian													
2.01	01	17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan		244,760,000		250,000,000		-		275,000,000		330,000,000		1,099,760,000
2	01	Pertanian													
2.01	01	18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan		120,735,000		132,808,500		159,370,200		191,244,240		229,493,088		833,651,028
2	01	Pertanian													
2.01	01	19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan		75,000,000		82,500,000		99,000,000		118,800,000		142,560,000		517,860,000
2	01	Pertanian													
2.01	01	20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Terlaksananya pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		160,850,000		176,935,000		212,322,000		254,786,400		305,743,680		1,110,637,080
2	05	Kelautan dan Perikanan													
2.01	05	22 Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	Berkembangnya sistem penyuluhan perikanan		-		50,000,000		60,000,000		72,000,000		-		182,000,000
1	08	Lingkungan Hidup													
1	08	17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Terlaksananya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan		100,000,000		110,000,000		132,000,000		158,400,000		190,080,000		690,480,000
1	22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
1	22	16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Terlaksananya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		50,000,000		55,000,000		66,000,000		79,200,000		95,040,000		345,240,000
1	25	Komunikasi dan Informatika													
1	25	15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Berkembangnya komunikasi, informasi dan media massa		15,000,000		16,500,000		19,800,000		23,760,000		28,512,000		103,572,000
DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATA KOTA					2,498,366,000		10,734,665,000		9,920,598,000		9,464,717,600		10,510,941,120		42,384,287,720
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		1,554,690,000		1,705,000,000		2,046,000,000		2,455,200,000		2,946,240,000		10,707,130,000
02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		358,608,000		940,665,000		1,128,798,000		1,354,557,600		778,749,120		4,561,377,720
03		Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur (PNS)		-		100,000,000		120,000,000		800,000,000		960,000,000		1,980,000,000
05		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		-		20,000,000		24,000,000		28,800,000		34,560,000		107,360,000
06		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Berkembangnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-		19,000,000		22,800,000		27,360,000		32,832,000		101,992,000
1	01	Lingkungan Hidup													
1	01	16 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Berkembangnya kinerja pengelolaan persampahan		-		815,000,000		216,000,000		259,200,000		311,040,000		966,240,000

1	02	Penyediaan lahan TPA	Tersedianya lahan TPA	-	-	425,000,000							
1	02	21 Peningkatan Operasi dan pencapaian kerja sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan	Terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	-	-	160,000,000	60,000,000	72,000,000		86,400,000			268,400,000
1	03	16 Pembuatan Kolam Lindi Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	terciptanya kolam lindi Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong	-	-	550,000,000	660,000,000	792,000,000		950,400,000			2,952,400,000
1	03	18 Pekerjaan Umum Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	-	-	72,500,000	87,000,000	104,400,000		125,280,000			389,180,000
1	04	15 Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terlaksananya lingkungan sehat perumahan	-	-	27,000,000	32,400,000	38,880,000		46,656,000			144,936,000
1	04	20 Perumahan Program pengelolaan areal pemakaman	Terlaksananya pengelolaan areal pemakaman	-	-	1,400,000,000	1,680,000,000	2,016,000,000		2,419,200,000			7,515,200,000
1	05	15 Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya perencanaan tata ruang	226,900,000		435,500,000	522,600,000	411,120,000		493,344,000			2,089,464,000
1	05	16 Penataan Ruang Program Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya pemanfaatan ruang yang baik	125,500,000		387,500,000	285,000,000	342,000,000		410,400,000			1,550,400,000
1	05	17 Penataan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang	49,600,000		132,000,000	158,400,000	190,080,000		228,096,000			758,176,000
1	06	15 Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Data / Informasi	Tersedianya data/informasi yang akurat	52,500,000		70,000,000	84,000,000	100,800,000		120,960,000			428,260,000
1	06	18 Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah strategis dan Cepat Tumbuh	Tersedianya perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	-		18,000,000	21,600,000	25,920,000		31,104,000			96,624,000
1	06	17 Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Berkembangnya wilayah perbatasan	-		1,000,000,000	-	-		-			1,000,000,000
1	08	15 Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Berkembangnya kinerja pengelolaan persampahan	130,568,000		2,822,500,000	2,700,000,000	360,000,000		432,000,000			6,445,068,000
1	08	24 Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terlaksananya pengelolaan ruang terbuka hijau	-		60,000,000	72,000,000	86,400,000		103,680,000			322,080,000
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					3,618,672,000	8,395,472,000	14,499,566,400	17,409,479,680		20,891,375,616			64,814,565,696
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	270,542,000		270,542,000	324,650,400	389,580,480		467,496,576			1,722,811,456
02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	40,900,000		440,900,000	529,080,000	634,896,000		761,875,200			2,407,651,200
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	20,450,000		20,450,000	24,540,000	29,448,000		35,337,600			130,225,600
2	05	Kelautan dan Perikanan											

2	05	15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	-	400,000,000	480,000,000	576,000,000	691,200,000	2,147,200,000
2	05	16	Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan	-	250,000,000	300,000,000	360,000,000	432,000,000	1,342,000,000
2	05	17	Kelautan dan Perikanan Program peningkatan kesadaran dan penegakkan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut	14,000,000	14,000,000	41,800,000	60,160,000	72,192,000	202,152,000
2	05	20	Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Berkembangnya budidaya perikanan	3,048,000,000	3,543,000,000	4,251,600,000	5,101,920,000	6,122,304,000	22,066,824,000
2	05	21	Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Berkembangnya perikanan tangkap	38,000,000	3,038,000,000	8,045,600,000	9,654,720,000	11,585,664,000	32,361,984,000
2	05	23	Kelautan dan Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran Produksi Perikanan	Terlaksananya optimalisasi pengelolaan pemasaran produksi perikanan	189,000,000	389,000,000	466,800,000	560,160,000	672,192,000	2,277,152,000
2	05	24	Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan air laut	Berkembangnya kawasan budidaya laut, air payau dan air laut	-	340,000,000	408,000,000	489,600,000	587,520,000	1,825,120,000
BADAN NARKOTIKA					289,910,000	-	-	-	-	289,910,000
01	13		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	89,240,000	-	-	-	-	89,240,000
1	13	20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Terlaksananya pembinaan eks penyandang penyakit sosial	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
1	19	20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Berkurangnya kejadian penyakit masyarakat	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*).

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Tujuan akhir otonomi daerah ditunjukkan dengan parameter tinggi kualitas manusia yang secara internasional diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM digunakan untuk mengecek apakah aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator Kinerja Kunci pada aspek kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah pertumbuhan PDRB/pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, inflasi, angka kemiskinan, angka pengangguran terbuka, angka melek huruf dan angka usia harapan hidup. Pada aspek pelayanan umum, IKK nya diantaranya angka partisipasi sekolah (APS), rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk dan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Indikator Kinerja Kunci pada aspek daya saing daerah diantaranya angka konsumsi rumah tangga perkapita dan rasio kualitas tenaga kerja (rasio lulusan S1/S2/S3).

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi/kabupaten/kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan *output* (nilai tambah) pada waktu tertentu. Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk.

Angka partisipasi sekolah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Rasio dokter per jumlah

penduduk adalah jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Angka konsumsi RT perkapita adalah rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah jumlah lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Untuk lebih jelasnya, penetapan indikator kinerja daerah secara rinci sebagaimana ditampilkan dalam tabel 9.1 berikut:

Tabel 9.1
INDIKATOR KINERJA DAERAH

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
A.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1	Pertumbuhan PDRB (%)	4.5	4.5	4.7	5.1	5.3	5.4	5.4
2	Laju Inflasi Kabupaten (%)	0	Dibawah Angka Nasional					
3	PDRB per kapita (Rp)	3,824,754	3,977,744	4,136,854	4,302,328	4,474,421	4,653,398	4,653,398
4	IPM	71,61	71,69	71,72	71,72	71,73	71,74	71,74
	Pendidikan							
A.2	Kesejahteraan Sosial Pendidikan							
5	Angka Melek huruf (%)	98.84	98,84-98,85	98,85-98,90	98,90-98,95	99,00-99,05	99,05-99,10	99,05-99,10
6	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	98.73	98,84-98,85	98,85-98,90	98,90-98,95	99,00-99,05	99,05-99,10	99,05-99,10
7	Angka partisipasi murni	90.45	91.35	91.45	91.54	91.63	91.72	91.72
	SD	99.49	99.59	99.69	99.79	99.89	99.99	99.99
	SLTP	78.1	85.91	86.77	87.64	88.51	89.40	89.40
	SLTA	75.78	83.36	84.19	85.03	85.88	86.74	86.74
8	Angka partisipasi kasar	99.12	99.22	99.32	99.42	99.52	99.62	99.62
	SD	100	100	100	100	100	100	100
	SLTP	82.57	90.83	91.74	92.65	93.58	94.51	94.51
	SLTA	78.98	86.88	87.75	88.62	89.51	90.41	90.41
9	Angka pendidikan yang ditamatkan (tahun)	97.97	98.95	99.05	99.15	99.25	99.35	99.35
	Kesehatan							
10	Angka kelangsungan hidup bayi	2,343	2,577	2,835	3,119	3,430	3,773	3,773
11	Angka usia harapan hidup (tahun)	67.25	73.98	74.71	75.46	76.22	76.98	76.98
12	Persentase balita gizi buruk (%)	0.11	0	0	0	0	0	0

	Kemisikinan							
14	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	25.37	24.36	23.38	22.45	21.55	20.69	20.69
	Kepemilikan Lahan							
15	Persentase penduduk yang tidak memiliki lahan	-	-	-	-	-	-	-
	Kesempatan Kerja							
16	Rasio Penduduk yang bekerja	61,219	67,341	74,075	81,482	89,631	98,594	98,594
17	Pengangguran terbuka (%)	12.53	11.28	10.15	9.13	8.22	7.40	7.40
	Kriminalitas							
18	Angka kriminalitas yang tertangani	145-147	147-149	149-151	151-153	153-155	155-157	155-157
A.3	Seni Budaya dan Olahraga							
19	Jumlah Grup Kesenian	6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	10-11
20	Jumlah Gedung kesenian	-	-	-	-	-	-	-
B	ASPEK PELAYANAN UMUM							
B.1	Pelayanan Dasar							
	Pendidikan							
	Pendidikan Dasar							
21	Angka partisipasi sekolah	99.73	99.74	99.75	99.76	99.77	99.78	99.78
22	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	0.15	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.24
23	Rasio Guru murid	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08
	Pendidikan Menengah							
24	Angka partisipasi sekolah	98.50	98.60	98.70	98.80	98.89	98.99	98.99
25	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	0.27	0.30	0.33	0.37	0.40	0.44	0.44
26	Rasio Guru murid	0.05	0,05-0,055	0,055-0,060	0,60-0,066	0,066-0,73	0,07-0,080	0,07-0,080
	Kesehatan							
27	Rasio posyandu per satuan balita	9.1	9,2 - 10,01	10,02-11,01	11,01-12,11	12,11-13,32	13,32-14,65	13,32-14,65
28	Rasio puskesmas, poliklinik/pustu persatuan penduduk	0.0001-0.0003	0.0003-0.0005	0.0005-0.0007	0.0007-0.0009	0.0009-0.0011	0.0011-0.0013	0.0011-0.0013
29	Rasio dokter persatuan penduduk	0.0004-0.0006	0.0006-0.0008	0.0008-0.0010	0.0010-0.0012	0.0012-0.0014	0.0014-0.0016	0.0014-0.0016
30	Rasio tenaga medis persatuan penduduk							
	- Bidan	0.001-0.004	0.004-0.007	0.007-0.0010	0.010-0.013	0.013-0.016	0.016-0.019	0.016-0.019
	- Perawat	0.00117-0.00120	0.00120-0.00123	0.00123-0.00126	0.00126-0.00129	0.00129-0.00132	0.00132-0.00135	0.00132-0.00135
	Sarana dan Prasarana Umum							
31	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	-
32	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	-	-	-	-	-	-	-
	Perhubungan							
33	Jumlah Pelabuhan terminal bis	1	1-2	1-2	1-3	1-3	1-4	1-4
B.2	Pelayanan Penunjang							
	Penanaman Modal							
34	Jumlah Perusahaan Penanaman Modal dalam negeri	-	-	-	-	-	-	-
35	Jumlah nilai investasi berskala Nasional	-	-	-	-	-	-	-
	KUKM							
36	Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD)	13-14	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	17-18
37	Jumlah Koperasi Non KUD	163-164	164-165	165-166	166-167	167-168	168-169	168-169
38	Jumlah UMKM non BPR/LKMUUKM	-	-	-	-	-	-	-

39	Jumlah BPR	-	-	-	-	-	-	-
	Ketenagaan Kerja							
40	Angka partisipasi angkatan kerja	71.01	71-75	75-80	80-85	85-90	90-95	90-95
	KB dan KS							
41	Jumlah Pasangan Usia Subur	28,492-28,640	28,640-28,790	28,790-28,940	28,940-29,090	29,090-29,240	29,240-29,390	29,240-29,390
42	Jumlah Peserta KB	25,534-25,791	25,791-26,048	26,048-26,315	26,315-26,572	26,572-26,829	26,829-27,086	26,829-27,086
	Pertanahan							
43	Persentase Luas lahan bersertifikat	40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	60-65
	Pemberdayaan Masyarakat Desa							
44	Jumlah LSM	-	-	-	-	-	-	-
	Perpustakaan							
45	Jumlah Perpustakaan	1	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	6-7
46	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	1833	1833-2016	2017-2217	2218-2439	2440-2683	2684-2952	2684-2952
	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat							
47	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	0.0068-0.0073	0.0073-0.0078	0.0078-0.0083	0.0083-0.0088	0.0088-0.0093	0.0093-0.0098	0.0093-0.0098
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
C.1	Kemampuan ekonomi Daerah							
48	Angka konsumsi RT per kapita	61.73-64.81	64.81-68.05	68.05-71.46	71.46-75.03	75.03-78.78	78.78-82.72	78.78-82.72
49	Persentase konsumsi RT untuk non pangan	38.27-40.18	40.18-42.19	42.19-44.3	44.3-46.51	46.51-48.84	48.84-51.28	48.84-51.28
50	Produktifitas 9 sektor PRDB	4.5-4.7	4.7-4.9	4.9-5.2	5.2-5.4	5.4-5.7	5.7-6	5.7-6
51	Pertanian	361,411-379,481	379,481-398,455	398,455-418,378	418,378-439,297	439,297-461,262	461,262-484,325	461,262-484,325
52	Pertambangan dan penggalian	3,168-3,326	3,326-3,492	3,492-3,667	3,667-3,850	3,850-4,043	4,043-4,245	4,043-4,245
53	industri pengolahan	15,245-16,007	16,007-16,807	16,807-17,647	17,647-18,530	18,530-19,456	19,456-20,429	19,456-20,429
54	Listrik	1,957-2,054	2,054-2,157	2,157-2,265	2,265-2,378	2,378-2,497	2,497-2,622	2,497-2,622
55	Bangunan	46,972-49,320	49,320-51,786	51,786-54,375	54,375-57,094	57,094-59,949	59,949-62,946	59,949-62,946
56	Perdagangan	264,932-278,178	278,178-292,087	292,087-306,691	306,691-322,026	322,026-338,127	338,127-355,034	338,127-355,034
57	Pengangkutan dan komunikasi	87,896-92,290	92,290-96,905	96,905-101,750	101,750-106,838	106,838-112,180	112,180-117,789	112,180-117,789
58	Keuangan	49,537-52,013	52,013-54,614	54,614-57,345	57,345-60,212	60,212-63,223	63,223-66,384	63,223-66,384
59	Jasa-jasa	244,385-256,604	256,604-269,434	269,434-282,906	282,906-297,051	297,051-311,904	311,904-327,499	311,904-327,499
C.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Aksesibilitas Daerah							
60	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan	-	-	-	-	-	-	-
61	Panjang Jalan	741,95-764,20	764,20-840,62	840,62-924,69	924,69-1.017,16	1.017,16-1.118,87	1.118,87-1.230,76	1.118,87-1.230,76
	Fasilitas Bank							
62	Jumlah Bank	15-16	15-17	15-18	15-19	15-20	15-21	15-21
	Fasilitas Listrik							
63	Jumlah RT yang menggunakan listrik	20.960-22.008	22.008-23.108	23.108-24.263	24.263-25.477	25.477-26.750	26.750-28.088	26.750-28.088
	Ketersediaan Penginapan							
64	Jumlah Penginapan/Hotel	11	12 - 13	14-15	16-17	18-19	20-21	20-21

	Iklim Berinvestasi							
65	Angka kriminalitas	284	255-230	229-207	206-185	184-167	166-150	166-150
66	Jumlah Peristiwa Kejahatan Yang Diselesaikan	145-152	152-159	159-167	167-176	176-185	185-194	185-194
67	Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas	29-26	26-23	23-21	21-19	19-17	17-15	17-15
68	Sumber Daya Manusia							
69	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan	208-228	228-251	251-276	276-304	304-334	334-368	334-368
70	Rasio Ketergantungan	-	-	-	-	-	-	-

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2010-2015 merupakan instrumen penting untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan program pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan selama 5 (lima) tahun kedepan, sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang maju dan sejahtera.

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang lebih maju dan lebih sejahtera perlu didukung oleh : (1). komitmen dan kepemimpinan daerah yang baik, bersih dan amanah; (2). konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (3). kebijakan yang berpihak pada masyarakat; (4). partisipasi masyarakat, dunia usaha serta para pemangku amanah secara aktif, kreatif dan positif. Selain itu penerapan tiga pilar prinsip *Good Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pelaksanaan berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi pembangunan tersebut harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pemangku amanah.

RPJMD sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah terutama pada akhir periode kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dijadikan sebagai pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya.

Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat kebijakan umum, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program kerja SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian RPJMD ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2010-2015, maka seluruh pemangku amanah diharapkan mampu memahami substansi dokumen perencanaan ini dan menterjemahkannya secara kreatif dan inovatif tanpa keluar dari aturan yang ada. Bagi SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2010-2015 menjadi acuan utama untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD 2011-2015 dan Rencana Kerja (Renja) SKPD selama periode 2011-2015 serta dijadikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD dan

Renja SKPD digunakan sebagai bahan penyusunan APBD selama periode 2011-2015. Dokumen-dokumen tersebut menjadi bahan dalam evaluasi dan pelaporan kinerja kepemimpinan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selama kurun waktu 2011-2015.

RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2010-2015 merupakan acuan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya, sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Implementasi RPJMD ini mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas program dan kegiatan, lintas instansi serta lintas pemerintahan dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung jawab dan tugas masing-masing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap yang mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi sinergisitas, efisiensi dan akselerasi dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2010-2015 yang meliputi :

1. Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha serta para pemangku amanah lainnya berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya
2. RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2010-2015 menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD 2011-2015 yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda daerah serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan mengejar ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Unit satuan kerja vertikal setingkat, maupun lembaga-lembaga lokal non pemerintah atau lembaga internasional pemerintah dan non pemerintah yang melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan serta berbagai komponen masyarakat dalam berbagai bentuk partisipasinya berkewajiban berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyerasikan dan menjamin konsistensi terhadap RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2010-2015
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan, Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dan seluruh jajaran pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha secara bersama-sama mendukung konsistensi implementasi RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2010-2015, RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2010-2015 dan RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan selama kurun waktu 2011-2015.


BUPATI BENGKULU SELATAN
H. RESKANE AWALUDDIN